

POLITIK HINDU

Sejarah, Moral dan Proyeksinya

Nanang Sutrisno, Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari,
I Gede Sutarya, I Nengah Duija, Ni Kadek Surpi,
I Ketut Donder, I Gede Suwantana,
I Gusti Made Widya Sena
Ida Bagus Benny Surya Adi Pramana,
I Gusti Ngurah Santika, dkk., I Nyoman Yoga Segara

Editor: I Nyoman Yoga Segara

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR**



Judul:

POLITIK HINDU: Sejarah, Moral, dan Proyeksinya

Penulis:

Tim.

Editor:

I Nyoman Yoga Segara

Diterbitkan oleh:

IHDN PRESS

ISBN: 978-623-7294-15-3

Redaksi:

Jalan Ratna No. 51 Denpasar

Kode Pos 80237

Telp/Fax: 0361 226656

Email: ihdnpres@gmail.com / ihdnpres@ihdn.ac.id

Web: ihdnpres.ihdn.ac.id / ihdnpres.or.id

Cetakan pertama: Oktober 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Pengantar Editor

Bagi intelektual, merayakan hari ulang tahun tidak harus dengan mewah, meski tidak juga menolak perayaan dengan diiringi lagu dan kue tart, seperti layaknya sebuah pesta. Kali ini, akademisi Hindu memilih buku untuk menandai 16 tahun berdirinya Program Pascasarjana IHDN Denpasar. Sudah lama ulang tahun ini tidak dirayakan, baik dengan “pesta”, apalagi meluncurkan buku. Buku yang diluncurkan tepat tanggal 10 Oktober 2019 ini adalah kompilasi pemikiran para intelektual, baik dari dalam maupun luar IHDN Denpasar. Tema sentralnya politik yang dibahas mulai dari akar sejarahnya, praksisnya kini dan proyeksinya di masa depan. Awalnya, semua pemikiran ini akan dikluster berdasarkan sub tema, apa lacur keinginan itu masih belum terwujud. Menengahi kekurangan itu, semua artikel masih dapat dibaca berdasarkan pembabakannya.

Mengapa tema politik penting diangkat? Tema ini tentu bukan tema anyar dalam berbagai diskursus dikalangan Hindu. Jika ada perhelatan politik, semacam Pilkada dan Pilpres, tema ini selalu hadir. Ada debat di dalamnya, tak jarang ada juga fatalisme yang menjangkiti kepala kita. Akibatnya, tema politik ya begitu-begitu saja dari dulu hingga sekarang. Agar tidak hanya memenuhi ruang hampa, Program Pascasarjana IHDN Denpasar mengartikulasikan ke dalam bentuk buku, dengan maksud, *pertama*, untuk menjadi *homo academicus*, buku ini adalah perangsang lahirnya ide-ide kritis sekaligus menaikkan daya respons dan adaptif para intelektual terhadap isu-isu aktual yang sedang dan akan terjadi. Tentu, keinginan ini tak sebatas pada isu politik, tetapi juga isu-isu aktual lainnya, sehingga kita memiliki kapasitas untuk menanggapi dengan argumentasi berbasis data, baik etik maupun emik, fakta maupun empirik. Akademisi punya peluang untuk mengaksentuasikan pikiran dan gagasannya bukan saja untuk menghadapi tetapi juga memecahkan persoalan dalam kehidupan. Dengan ini, akademisi tidak bisa lagi berkelit,

apalagi membuat distansi dengan dunia sosial, dunia yang dihidupinya secara sadar, termasuk dunia politik.

Kedua, bukan kebetulan pada 2019 ini terdapat pesta demokrasi mahabesar, Pileg dan Pilpres. Kita sudah sama-sama tahu hasilnya, termasuk aneka ragam peristiwa yang menyertai siklus lima tahunan itu. Tentu bukan hanya soal riuh rendah Pilpres yang menjadi titik tekan dari buku ini, karena tahun sebelumnya juga berlangsung Pilkada serentak. Berbagai peristiwa yang berlangsung dalam hajatan politik itu, baik nyata maupun maya di media sosial, telah menghasilkan residu yang membekas lama dalam ingatan kolektif banyak orang, termasuk orang Hindu, lebih khusus lagi orang Bali. Kita semua pada akhirnya disadarkan untuk mencari posisi politik secara jelas. Mengapa kita terlibat begitu dalam, atau mungkin ada yang apatis, ada juga yang masgul. Apakah partisipasi kita dalam politik makro merepresentasikan kedirian kita secara mikro, atau sebagai Hindu yang dengannya itu ruh ajaran politik Hindu juga serta merta kita jalankan? Dua soal ini hendak dijawab dalam buku ini.

Setidaknya ada dua artikel yang secara implisit akan membahas akar-akar sejarah politik Hindu sehingga kita semakin percaya diri bahwa partisipasi kita adalah cerminan dari pemikiran politik Hindu yang sudah sangat lama dipikirkan oleh para maharsi. Nanang Sutrisno, mengawalinya dengan menjelaskan genealogi pemikiran Hindu, lengkap dengan kebangkitan sekaligus beberapa kemunduran yang pernah terjadi. Menurutnya, untuk memahami *landscape* itu, kita harus kembali membuka catatan yang ditinggalkan Kautilya melalui Arthashastra. Tak berhenti pada kitab ini, Nanang juga menceritakan sejarah pemikiran politik Hindu lainnya, lengkap dengan tokoh-tokoh yang membidaninya. Sejarah politik Hindu juga harus dibaca ulang saat memasuki nusantara. Nukilan dari simpulan artikelnya mengandung pesan yang jelas. Misalnya, ketika ia menyatakan bahwa relasi politik dan agama adalah keniscayaan dalam peradaban manusia. Tanpa politik, ajaran agama tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga sebaliknya,

tanpa agama, politik rentan mengalami degradasi dan menjauhkan masyarakat dari tujuan hidupnya. Sejarah politik Hindu di India menunjukkan relasi yang kuat antara aktivitas politik dengan perkembangan keagamaan dan kebudayaan masyarakatnya.

Artikel kedua disajikan Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari yang secara komprehensif berhasil mengelaborasi pemikiran Kautilya atau Cāṅakya. Menurutnya, upaya menyelami sejarah pemikiran Politik Hindu dapat diibaratkan seperti menyelami samudera pengetahuan yang luas. Dari berbagai macam literatur, ajaran serta dalil yang tersedia, Arthaśāstra sebagai *magnum opus* dari Maharsi Cāṅakya, merupakan salah satu rujukan yang dapat dijadikan sumber utama pembelajaran terkait sistem politik, filsafat politik kenegaram, kepemimpinan, sistem tata negara, dan juga etika-moral politik Hindu. Fokus pemikiran politik Acharya Cāṅakya berada pada tataran bahwa negara adalah institusi tertinggi yang wajib dan harus dijaga keberlangsungannya. Dalam hal ini, Raja sebagai pimpinan negara memiliki kuasa dan tanggung jawab dalam menjalankan roda negara. Politik kenegaraan Cāṅakya didasarkan pada tiga teori mendasar yakni teori Saptāṅga, Teori Maṅḍala dan juga teori sādḡunya.

Melanjutkan sejarah pemikiran politik Hindu dan kontekstualisasinya pada negara, dapat dibaca melalui artikel I Gede Sutarya. Yang menarik, Sutarya mempersoalkan bahwa demokrasi selalu menyisakan berbagai masalah sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang pemerintahan Hindu untuk menjadi alternatif. Pemerintahan Hindu yang menjadi peninggalan sampai sebelum era kolonial adalah kerajaan, tetapi penggalian sumber-sumber sejarah menunjukkan Hindu memiliki peninggalan negara republik. Kerajaan besar mengalahkan republik-republik ini sehingga yang tertinggal hanya republik-republik desa. Republik desa yang disebut grama telah disebutkan dalam Rigveda, sehingga merupakan republik asli Hindu yang di Bali disebut krama. Dalam konteks negara ini cocok dengan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan parlementer

di mana pemerintahan bertanggungjawab kepada legislatif. Pola ini sesuai dengan UUD 1945 yang belum diamendemen. Pola ini diterapkan dalam pemerintahan India modern. Pemerintahan dengan pola ini melalui kontrol publik yang didukung teknologi komunikasi menjadi sangat idial dalam demokrasi.

Artikel kedua dari I Nengah Duija juga mencoba menelisik persoalan negara dan posisi masyarakat sipil yang menjadi bagian di dalamnya. Menurutnya, masyarakat Hindu adalah salah satu komponen bangsa Indonesia yang utuh dari sebuah negara bangsa (*nation state*). Oleh karena itu, posisi dan kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya adalah sama, namun dalam konteks politik nasional seringkali terjadi persoalan apa yang oleh Antonio Gramsci sebagai sebuah kawasan politik hegemoni. Hegemoni yang terjadi adalah persoalan akses kekuasaan, ekonomi, sosial, budaya, agama, bahkan menjadi "mayoritas versus minoritas. Semua itu merupakan konstruksi sosial-politik negara yang terlampau dominan merambah ranah privasi warga negara.

Berlandaskan emikiran itu, maka dalam beberapa dekade belakangan ini muncul "penggugatan" terhadap dominasi kekuasaan negara dengan tumbuhnya apa yang disebut sebagai *civil society* (masyarakat sipil). Tumbuhnya masyarakat sipil ini ditentukan oleh gerakan kaum kelas menengah (*middle class*), munculnya LSM yang pro-rakyat, gerakan intelektual organik (meminjam istilah Gramsci) dan gerakan-gerakan sosial lainnya. Berkenaan dengan hal itu, maka masyarakat Hindu memiliki fungsi dalam menumbuhkan nilai-nilai sipil yang mampu menempa terbentuknya masyarakat sipil itu sendiri. Nilai-nilai itu merupakan kekuatan dasar (*spirit*) terbentuknya masyarakat sipil di Indonesia.

Bagaimana sistem politik bekerja dalam kehidupan, lalu diasumsikan menghasilkan peradaban dan tindakan yang sejalan dengan filosofi politik Hindu tersaji melalui artikel Ni Kadek Surpi yang menyatakan bahwa moral politik memberikan implikasi langsung pada kualitas peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

Surpi yang menggali pikiran dua tokoh berbeda latar belakang, pola pikir dan jaman, Cāṇakya dan Machiavelli, menurutnya telah terdapat titik temu pemikiran yang sama, yaitu pentingnya moral politik dalam kekuasaan. Artikel ini akan membahas moral politik Cāṇakya dan Machiavelli dalam memotret situasi politik Indonesia dewasa ini. Bahwa ada tatanan moral dan etika yang harus dipedomani oleh setiap politisi maupun pemimpin negara, bukan sekedar meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebab, pada hakikatnya kekuasaan bukanlah tentang siapa yang kuat, tetapi sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertulis dalam risalah kuno Arthaśāstra.

Bagaimana potret adab politik kita secara umum, I Ketut Donder, dengan diksi yang tegas dan telanjang, banyak melakukan kritik pedas. Ini penting sebagai pemantik untuk melakukan refleksi mendalam. Menurut Donder, masyarakat kini seolah tidak lagi mempercayai omongan manis para politikus, karena setiap kata-kata seorang politikus akan ditafsirkan oleh para pendengarnya sebagai perkataan hipokrit. Donder mencurigai kata-kata seorang politikus umumnya bersayap dan tidak segan-segan bercabang dan beranting *hoax*. Hal ini paling tampak pada dunia perpolitikan Indonesia tahun ini yang sangat mengotori layar-layar TV, HP dan laptop. Kondisi semacam ini mengingatkannya pada satu cerita dalam *China Katha* yang menceritakan tentang “*Gugatan Bangsa Hewan atas Kemuliaan Bangsa Manusia*”. Para bangsa hewan datang ke meja pengadilan seraya mengecam dan mengutuk perilaku manusia yang melebihi perilaku binatang.

Politik itu “kotor”, begitu banyak opini, terutama orang awam. Ketika menjadi praktis, opini itu mungkin ada benarnya, namun jika ditelisik ke akar sejarah, terlebih jika menggunakan cermin moral, opini itu bisa direduksi. Artikel I Gede Suwanta menjelaskan panjang lebar tentang tema ini. Menurutnya, Hindu memberikan ruang yang sangat luas di bidang politik, baik mengenai sumber daya manusianya, *skill* atau strategi politiknya maupun tujuan yang hendak dituju dalam berpolitik. Satu hal yang

pokok disini adalah politik hanyalah salah satu jenis kendaraan yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik. Melalui kekuasaan dalam hubungannya dengan pemerintahan negara bangsa, kendaraan politik ini bisa dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat yang merdeka, adil dan makmur. Dunia politik tidak bisa dipisahkan dari bidang kehidupan lainnya. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Siapapun dari mereka harus berpatokan dari prinsip Catur Purusa Artha di dalam menjalani bidang-bidang kehidupannya, tidak terkecuali di ranah politik praktis. Jadi, politik adalah bagian integral dari bidang-bidang kehidupan manusia di dalam upaya membangun kesadaran mereka ke arah yang lebih maju sehingga benar, moksartham jagathita bisa terwujud. Masalah baru muncul ketika politik ditumpangi oleh ambisi pribadi manusia-manusia yang terjun di dalamnya, yakni keinginan untuk berkuasa.

Soal politik lalu dikaitkan dengan gejala psikomatis, dijelaskan oleh I Gusti Made Widya Sena. Tahun 2019 dalam amatannya dianggap sebagai tahun yang monumental bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia ide dan gagasan politik di Indonesia. Berbagai bentuk ide dan gagasan dituangkan dalam setiap wadah dan komunikasi politik untuk mentransformasikan dirinya masing-masing. Mulai dari penyebaran pikiran di setiap media, massa dan elektronik hingga pada bentuk lainnya seperti pengerahan dan penggunaan massa demi mencapai kekuasaan politik. Menurut Widya Sena, dunia politik adalah dunia abu-abu, dunia di mana seseorang dapat melebarkan dan menguatkan kepakannya menuju tujuan yang diinginkannya. Sebagai salah satu simbol yang menguatkan tujuan tersebut tentunya adalah memiliki visi yang sama demi mencapai tujuan bersama. Walaupun didalamnya kepentingan itu kadang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi, waktu, kondisi, kebutuhan dan kebijakan yang diberlakukan. Itu mengapa tidak perlu kita sangsikan lagi jika sewaktu-waktu sahabat dunia politik dalam hitungan detik bisa berubah menjadi lawan politik. Setiap manusia

adalah subyek sekaligus obyek dari kekuasaan. Sumber kekuasaan meliputi berbagai hal, ada yang berupa kekerasan fisik, kedudukan, kekayaan, kepercayaan dan lainnya. Tentunya jika hal ini tidak disadari dengan baik, maka kondisi sosial masyarakat akan mengikuti naik turunnya perkembangan politik. Psikologi masyarakat akan terus mengalami perubahan senang dan sedih, bahagia dan kecewa yang pada akhirnya akan berdampak pada karakter moral sosial, kepribadian, dan kesehatan tubuh dan jiwa sosial. Jika terus dibiarkan berlarut-larut maka tidak hanya praktisi politik saja yang dapat stress namun masyarakat juga akan mengalami hal yang serupa. Ini tidak dapat dibiarkan karena akan mengancam kehidupan manusia secara makro. Untuk itu peran yoga sebagai jalan praktis-spiritual mengantarkan seseorang agar dapat melepaskan dan membebaskan dirinya dari berbagai belenggu pikiran dan stress yang dapat menyebabkan penyakit psikosomatis.

Artikel yang juga membicarakan titik temu politik dan moral disampaikan Ida Bagus Benny Surya Adi Pramana. Dalam artikelnya, ia banyak memberikan pesan moral dengan mengutip banyaknya sloka dan mantra dalam kitab suci yang mengajarkan tentang moral politik. Bahkan menurutnya, politikus haruslah seorang ksatria warna sehingga mereka berpegang teguh dari ajaran agama dalam menjalankan politik. Selain itu, politisi atau penguasa harus mampu melindungi semua profesi dan melaksanakan *Asta Brata*, serta kekuasaannya didasari oleh Susila atau ajaran etika. Hakikat kekuasaan adalah mengabdikan pada yang dikuasai agar yang dikuasai itu memperoleh nilai lebih dalam hidupnya. Pejabat negara diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menciptakan adanya rasa aman dan sejahtera dalam masyarakat, *prajanam raksanam dhanam*.

Politik dan kekuasaan tidak akan bisa memenuhi tujuan kehidupan, jika tidak dijalankan atau tidak ada penguasa dan yang dipimpinya. Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif sehingga tujuan hidup sesuai filsafat politik dapat direalisasikan. I Gusti Ngurah Santika, dkk memberikan penjelasan bahwa partisipasi

rakyat secara politik baru akan terlaksana bilamana sebelumnya didahului dengan kesadaran politik. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politiknya, umat Hindu sebagai haruslah mulai menyadari betul pengaruh hak-hak politiknya terhadap agenda pembangunan bangsa. Dengan demikian, untuk merangsang dan mendorong partisipasi politik umat Hindu, terlebih dahulu perlulah dibangkitkan kesadaran politiknya. Memperhatikan budaya dan iklim politik Indonesia saat ini, maka sudah waktunya peran tokoh Agama Hindu harus dioptimalisasikan, bukan semata-mata dalam rangka urusan kerohanian, tetapi juga dalam hal keduniawian terutama menyangkut urusan politik kebangsaan. Artinya menurut Santika, dkk., partisipasi aktif berjalan dua arah, antara yang dipimpin dan yang memimpin, antara penguasa dan rakyatnya.

Terkahir, I Nyoman Yoga Segara hanya memberikan refleksi kecil untuk dicecap ketika melihat ke dalam diri. Jika memang pemikiran politik, terutama dari Kautilya begitu mewah, seberapa menantanginya untuk menjadi hal nyata dalam dunia sosial kita. Yoga Segara mengajak kita untuk “belajar kembali”. Semoga bahasan yang berat dan serius dari para penulis artikel ini tidak bersifat utopia. Namun jika pembaca ingin tahu tentang politik Hindu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik Hindu, buku ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas.
Tabik.

Jalan Kenyeri, Denpasar, 30 Agustus 2019
INYS

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengantar Editor.....	iii
Sejarah Politik Hindu	
<i>Nanang Sutrisno</i>	1
Cāṇakya Arthaśāstra: Warisan Politik Kenegaraan Hindu	
<i>Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari</i>	19
Negara Hindu: Dari Republik Desa Ke Negara Republik	
<i>I Gede Sutarya</i>	32
Masyarakat Hindu Dalam Politik NKRI Menuju Masyarakat Sipil	
<i>I Nengah Duija</i>	41
Moral Politik dan Merosotnya Kualitas Peradaban Manusia	
<i>Ni Kadek Surpi</i>	58
Rekayasa Transformasi Genetika Mental Politik: Dari Semangka Berdaun Sirih Menjadi Rambutan Berbuah Durian	
<i>I Ketut Donder</i>	74
Politik Hindu, Antara Natural dan Moral	
<i>I Gede Suwantana</i>	100
Antara Politik, Psikosomatis dan Yoga: Refleksi Pembentuk Karakter Moral dan Spritual Sosial	
<i>I Gusti Made Widya Sena</i>	114
Politik Spiritual Menurut Ajaran Hindu	
<i>Ida Bagus Benny Surya Adi Pramana</i>	126

Kesadaran Politik: Dari Peran Tokoh Agama dan Partisipasi Politik Umat Hindu	
<i>I Gusti Ngurah Santika, I Gede Sujana, I Made Astra Winaya</i>	140
Kautilya Arthasastra: Sebuah Refleksi	
<i>I Nyoman Yoga Segara.....</i>	156

SEJARAH POLITIK HINDU

Nanang Sutrisno*

Pendahuluan

Pengungkapan sejarah politik Hindu dalam ranah ilmiah bukanlah perkara mudah karena minimnya bukti sejarah, terutama periode India Kuno hingga abad ke-6 SM. Masalah ini juga disampaikan Toynbee (2007: 189) bahwa peradaban India Kuno tidak meninggalkan catatan-catatan yang menerangkan sejarah politik mereka, kecuali artefak-artefak kuno yang lebih banyak memberikan informasi keagamaan. Oleh karena itu, para ahli sejarah umumnya menyebut periode sebelum Bimbisara (abad ke-6 SM) sebagai 'era kegelapan sejarah' (*the dark age of history*). Mengingat di balik kemajuan yang berhasil dicapai oleh peradaban India Kuno, ternyata tidak ditemukan tulisan yang menunjukkan risalah waktu (*chronogram*) guna memastikan kapan peradaban itu dibangun.

Mengacu pandangan Toynbee (2007: 69-70) bahwa setiap peradaban pasti dibangun melalui sistem politik sebagai capaian revolusi sosialnya, maka eksistensi sistem politik di India Kuno merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi, minimnya sumber sejarah primer (*primary historical sources*), seperti prasasti, maklumat raja-raja, numismatik (koin mata uang), dan catatan pribadi (monograf) para saksi sejarah (misalnya, pelancong asing), menyebabkan rekonstruksi sejarah politik India Kuno hanya bertumpu pada literatur keagamaan Hindu. Senada dengan itu, Raychaudhuri (2006: 2) juga menegaskan sebagai berikut:

No inscription or coin has unfortunately been discovered which can be referred, with any amount of certainty to the post-Parikshita-pre-Bimbisarian period. The South Indian plates purporting to belong to the reign of Janamejaya have been proved to be spurious. Our chief reliance must therefore be placed upon literary evidence.

* Penyuluh Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Penulis dapat dihubungi melalui email: nanangsutrisno1102@gmail.com

Unfortunately, this evidence is purely Indian, and is not supplemented by those foreign notices which have "done more than any archaeological discovery to render possible the remarkable resuscitation" of the history of the post-Bimbisarian period.

Bagi para sejarawan, prasasti dan koin mata uang (numismatik) dipandang sebagai sumber primer karena umumnya menunjukkan tahun pembuatan dan dinasti yang mengeluarkannya (Kamlesh, 2010: 8). Kendati demikian, kedua sumber primer ini tidak ditemukan pada periode India Kuno sebelum abad ke-6 SM, juga termasuk catatan orang-orang asing yang berkunjung ke India pada masa itu. Oleh karenanya, satu-satunya sumber sejarah yang diacu adalah literatur keagamaan dan kesusastraan Hindu. Dari literatur inilah diperoleh petunjuk mengenai politik, seperti kekuasaan, raja, dinasti, pemerintahan, dan sebagainya. Petunjuk-petunjuk ini diinterpretasi dan dikomparasikan dengan teks-teks lain untuk menyusun hipotesis sejarah. Hipotesis yang disampaikan ahli sejarah pun kerap berlainan, misalnya sejarah Parikshit dan dinasti Kuru yang terdapat dalam beberapa teks Hindu. Menurut Witzel (1989: 141), Parikshit diperkirakan memerintah sekitar abad ke-12 atau ke-11 SM, sedangkan Raychaudhuri (2006: 29) menyebutnya abad ke-9 SM. Perbedaan seperti ini niscaya terjadi karena kedudukan teks keagamaan sebagai sumber sejarah memiliki sejumlah kelemahan, seperti (a) perbedaan nama dalam peristiwa yang sama, atau sebaliknya, kesamaan nama dalam peristiwa yang berbeda; (b) berbaurnya antara fakta sejarah dan fiksi, atau peristiwa sejarah dan cerita roman; serta (c) bias subjektivitas dalam interpretasi teks (Mahajan, 2002: 16; Singh, 2008: 16).

Berbeda dengan masalah otentisitas dan validitas sumber sejarah (*historical sources*), juga pendisiplinan ilmu sejarah politik penting diperhatikan. Hal ini karena sejarah politik acap kali bersinggungan dengan cabang-cabang ilmu sejarah yang lain misalnya, sejarah kebudayaan, sejarah keagamaan, sejarah pemikiran politik Hindu, dan sejarah politik India. Sebagai bahan perbandingan misalnya, sejarah pemikiran politik Hindu memfokuskan kajiannya pada perkembangan pemikiran politik

Hindu dari masa ke masa, seperti konsepsi tentang negara, pemimpin, dan pemerintahan. Sementara itu, sejarah politik India mengkaji seluruh perkembangan politik bangsa India sejak India Kuno, Buddha, Islam, imperialisme Inggris, hingga India modern. Atas dasar itulah, ruang lingkup sejarah politik Hindu dibatasi pada perkembangan politik kerajaan (negara) Hindu, termasuk capaian-capaian terpenting setiap era.

Pembahasan

Sejarah Politik Hindu di India

1. Periode Weda (2000-600 SM)

Peradaban lembah sungai Sindhu menjadi petunjuk penting kemajuan yang dicapai bangsa pribumi India (Dravida) antara tahun 3000-2000 SM. Penggalan di seputar Harappa dan Mohenjodaro menunjukkan ciri peradaban yang mengesankan, seperti reruntuhan bekas kota yang tertata rapi, teknologi peralatan hidup (*life tools*) yang canggih, dan artefak-artefak religius (Radhakrishnan [*Intro.*], 1982: 81; Luniya, 2002: 23; Majumdar, 1998: 20-21; Mahajan, 2002: 54-94). Akan tetapi, tidak terdapat catatan sedikitpun tentang politik bangsa Dravida. Gambaran awal tentang aktivitas politik masyarakat India pertama ditemukan dalam *Catur Veda Samhita*, sekaligus petunjuk penting kebudayaan dan keagamaan bangsa Arya yang berkembang antara 2000—1000 SM (Phalgunadi, 2010: 9). Kitab *Rigveda Samhita* menjadi petunjuk politik Hindu periode Weda Awal (*Early Vedic Period*), kendati informasi tersebut bercampur dengan kepercayaan, mitos, dan petunjuk-petunjuk keagamaan lainnya.

Salah satu petunjuk politik ditemukan dalam Rigveda VII.18, 33, 83, yaitu perang Sudasa melawan aliansi sepuluh raja (*dasarajna yuddha*). Mengenai Sudasa, para ahli sejarah berbeda pendapat seputar, “apakah ia berasal dari klan Bharata atau Tritsu?” Dari peristiwa tersebut, sejumlah ahli sejarah mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut. *Pertama*, perang ini berlangsung di wilayah barat laut Doab terkait migrasi suku Bharata. Terdapat pola yang lebih sistematis dalam menguasai

wilayah ini, yakni mendorong penduduk asli ke wilayah pinggiran, lalu menguasai pusat kota (Thapar, 2000: 27). *Kedua*, perang ini cenderung adalah perang antarsuku daripada perang antarnegara karena istilah '*rajan*' mengacu jabatan kepala suku, bukan raja. *Ketiga*, indikasi awal sistem monarki *rajarshi*, misalnya Sudasa yang dihubungkan dengan Maharshi Vasistha dan Vishvamitra sebagai *purohita*. Dan *keempat*, nama *Bharatavarsa* ('tanah kaum Bharata')—wilayah India Kuno—menegaskan dominasi klan Bharata setelah berhasil menundukkan sepuluh klan yang lain. Penundukan ini selain berimplikasi pada perluasan wilayah kekuasaan Bharata, juga menunjukkan supremasi Bharata atas klan-klan lainnya.

Dalam perkembangan kemudian, klan Bharata beraliansi dengan klan Puru membentuk dinasti Kuru. Setelah itu, mereka juga menggandeng klan Pancala untuk menjalankan pemerintahan di sekitar lembah sungai Gangga dan Yamuna (Sharma, 2005: 109). Dinasti Kuru-Pancala menjadi penguasa Bharatavarsa (India Kuno) pada periode Weda Pertengahan (*Midle Vedic Period*) sekitar 1200-900 SM. Menurut Witzel (1995: 23-24), dinasti Kuru berhasil melakukan reorganisasi sosial terbesar pada zaman Rigveda Kuno dari masyarakat suku (*tribal society*) ke negara monarki (*monarchy state*), dan karenanya daerah Kuru dipandang sebagai negara pertama di India. Hal ini didukung pernyataan dalam *Yajurveda* dan sejumlah teks *Brahmana* bahwa kondisi sosial politik bangsa Arya telah begitu mapan sehingga ritual-ritual keagamaan dari tingkat keluarga (*grihya*) hingga ritual kenegaraan (*sautra*), seperti *Asvamedha*, *Vajapeya*, dan *Rajasuya* dapat terselenggara.

Raja dinasti Kuru yang paling populer disebutkan dalam kitab *Catur Veda Samhita*, *Brahmana*, dan *Upanisad* adalah Parikshit serta suksesornya, Janamejaya. Nama Parikshit ditemukan dalam *Atharvaveda Samhita*, XX. 127.7-10, sebagai raja wilayah Kuru yang menciptakan kemakmuran dan kedamaian. Kekuasaan kerajaan Kuru berdasarkan *Mahabharata* I.109.1, mencakup wilayah di sekitar lembah sungai Gangga dan Sarasvati yang dibagi menjadi

tiga bagian, yakni *Kurujangala*, *Kuru*, dan *Kurukshetra*. Wilayah *Kurukshetra* disebutkan pada bagian *Taittiriya Aranyaka* dengan batas-batas wilayah: Kandhava di selatan, Turghana di utara, dan Parinah di bagian barat, sedangkan ibukotanya di Asandivant (Raychaudhuri, 2006: 1-6).

Janamejaya adalah raja Kuru berikutnya. Teks *Aitareya Brahmana VIII.21*, menyatakan bahwa Maharsi Tura Kavaseya menobatkan Janamejaya dengan *Aindra Mahabhiseka* ('inisiasi Indra'). *Satapatha Brahmana XIII, 5.4.3*, juga menerangkan bahwa Janamejaya dan tiga saudaranya, yaitu Bhimasena, Ugrasena, serta Srutasena menyelenggarakan upacara *Asvamedha* dan *Brahmahatya* (upacara penebusan dosa leluhur atas pembunuhan para *Brahmana*) (Raychaudhuri, 2006:14). *Mahabharata* menjadi teks yang paling rinci menceritakan kisah leluhur Janamejaya, yaitu wangsa Bharata (Pandava dan Kaurava). Kendati demikian, kebenaran sejarah *Mahabharata* belum sepenuhnya disepakati para ahli sejarah dan Indolog.

Temuan arkeologi yang sering dihubungkan dengan *Mahabharata* adalah *Painted Grey Ware* (PGW) di seputar wilayah yang disebutkan dalam *Mahabharata*, seperti Hastinapura, Indraprastha, Ahicchatra, dan Kausambi. Berdasarkan temuan tersebut, Lal (1954/1955) menyusun hipotesis bahwa temuan ini sezaman dengan era *Mahabharata* sekitar 1100 SM. Akan tetapi, temuan *Ochre Coloured Pottery* (OCP) di Sanauli, Barnawa, dan Chandayana, Uttar Pradesh, menyajikan hipotesis berbeda. Munjul (dalam Benedetti, 2019) menyatakan bahwa OCP diperkirakan berasal dari tahun 2000-1800 SM atau zaman Harappa akhir (*Later Harappa*). Oleh karenanya, temuan kereta dan persenjataan perang di wilayah tersebut membuka peluang untuk membangun hipotesis baru bahwa *Mahabharata* terjadi sekitar milenium ke-2 SM atau semasa periode Weda Awal (*Early Vedic Period*). Dengan asumsi bahwa kereta dan persenjataan perang tersebut lebih menyerupai gambaran dalam *Bharatayuddha*. Kendati demikian, para ahli sejarah yang lain meragukan kesamaan antara *dasarajna yuddha* dan *Bharatayudha*, sehingga temuan OCP diperkirakan

adalah peninggalan bangsa Arya dari zaman *Rig Veda* awal, bukan zaman *Mahabharata*.

Kehancuran wangsa Kuru seperti digambarkan dalam *Mahabharata*, juga diperkirakan memiliki relasi historis dengan melemahnya pengaruh kekuasaan para suksesor Janamejaya. Dinasti Kuru, kemudian hanya memainkan peran politik minor dalam sejarah India Kuno pada zaman Weda Akhir (*Later Vedic Period*). Figur yang muncul berikutnya adalah Janaka, raja Videha yang dalam *Satapatha Brahmana V. 1.1.13* dan *Aitareya Brahmana VIII.14* disebut *Samraj* ('king of the king'). Menurut Raychaudhuri (2006: 27), era Janaka berjarak 5 sampai 6 generasi (150-200 tahun) dengan Janamejaya sehingga era ini diperkirakan berlangsung antara tahun 900–700 SM. Kisah Maharaja Janaka diceritakan dalam epos *Ramayana* sebagai ayah Dewi Sita, walaupun aspek historisnya masih perlu pengkajian lebih lanjut. Selain Videha, juga terdapat 9 (sembilan) negara berdaulat di India bagian utara (*Northern India*), yaitu Gandhara, Kekaya, Madra, Usinara, Matsya, Kuru, Pancala, Kasi, dan Kosala (Raychaudhuri, 2006: 33).

Memasuki abad ke-6 SM, sejarah politik India Kuno mengalami perubahan pascaruntuhnya monarki Videha-Janaka. Salah satunya ditandai dengan kemunculan negara-negara berdaulat "*Mahajanapada*" di wilayah India Kuno yang tidak lagi di bawah kekuasaan *Samraj*. Teks Buddha, *Anguttara Nikaya* menyebutkan 16 negara (*Solasa Mahajanapada*), yaitu Kasi, Kosala, Anga, Magadha, Vajji, Malla, Chetiya (Chedi), Vamsa (Vatsa), Kuru, Panchala, Surasena, Assaka, Avanti Machchha (Matsya), Gandhara, dan Kamboja. Agak berbeda dengan itu, teks Jaina, *Bhagavati Sutra*, memberikan daftar *Mahajanapada* yang terdiri atas: Kasi, Kosala, Bajji (Vajji), Anga, Magaha (Magadha), Malava, Moli, Malaya, Achchha, Banga, Ladha (Radha), Vachchha (Vatsa), Kochchha, Sambhuttara, Avaha, dan Padha (Pandya) (Raychaudhuri 2006: 59-60).

Dari daftar *Mahajanapada* tersebut dapat diketahui bahwa Kasi, Kosala, Anga, Magadha, dan Vajji adalah nama negara yang sama-sama disebutkan dalam kedua teks. Sementara itu, Malava

diidentikkan dengan Avati dan Moli diidentikkan dengan Malla. Menurut Raychaudhuri (2006: 61), dapat diprediksi bahwa *Anggutarā Nikāya* ditulis lebih dahulu daripada *Bhagavati Sūtra* sehingga ada beberapa negara dalam *Anggurata Nikāya* yang tidak disebutkan lagi dalam *Bhagavati Sūtra*. Besar kemungkinan, negara-negara tersebut telah hilang pengaruhnya (runtuh?) pada saat *Bhagavati Sūtra* ditulis. Sebaliknya, *Bhagavati Sūtra* menyebutkan sejumlah nama negara baru yang tidak seluruhnya berada di wilayah India Utara, tetapi juga berasal dari India bagian selatan (*Southern India*) dan timur jauh (*East Far Indian*). Terlepas dari hipotesis tersebut dapat dipahami bahwa *Mahajanapada* merupakan gambaran politik India Kuno pada periode Weda akhir (sekitar 600 SM). Bersamaan dengan itu, agama Buddha dan Jaina mulai meluas pengaruhnya di India.

2. Era Kemunduran Politik Hindu (543 SM-185 SM)

Era *Mahajanapada* diperkirakan berakhir sekitar abad ke-6 SM, ditandai keruntuhan kerajaan-kerajaan berkuasa tersebut dan kemunculan imperium Magadha sebagai kerajaan terbesar di India Kuno (Raychaudhuri, 2006: 98). Semula, Magadha hanyalah satu dari enam belas *Mahajanapada* yang wilayah kekuasaannya berada di sekitar Bihar, bagian selatan Gangga, dan beribukota di Rajagriha. Selain Magadha, sesungguhnya masih terdapat tiga negara berdaulat lainnya, yaitu Kosala, Vatsa, dan Avanti. Selain itu, juga lahir beberapa republik oligarki kecil lainnya, seperti Sakya di Kapilavastu, Koliya di Ramagama, Bhagga di bukit Susumara, Buli di Allakappa, Kallama di Kesaputta, Moriya di Phippalivana, dan Yakka (Yaksha?) di Alavaka yang didirikan oleh klan non-Arya (Raychaudhuri, 2006: 119-125).

Kerajaan Magadha didirikan oleh Bimbisara atau Srenika atau Seniya dari dinasti Haryanka. Dalam teks *Mahāvamsa* disebutkan bahwa Bimbisara dinobatkan pada usia 15 tahun oleh ayahnya (Bhattiya) dan memerintah di Magadha selama 52 tahun (546-494 SM) (Raychaudhuri, 2006: 116). Pembentukan imperium Magadha diawali perkawinan Bimbisara dengan anggota keluarga

penguasa Madra, Kosala, dan Vaisali. Perkawinan ini memuluskan jalan Bimbisara untuk melakukan ekspansi kekuasaan Magadha ke India bagian barat dan utara. Melalui ekspansi politiknya, Bimbisara berhasil menguasai wilayah Anga dan sebagian wilayah Kasi. Majumdar (1998) juga menyatakan bahwa Magadha menguasai daerah Bihar hingga Benggal setelah menaklukkan Vajji dan Anga. Berdasarkan teks *Mahavagga* diketahui bahwa wilayah kekuasaan Bimbisara meliputi 80.000 kota (Raychaudhari, 2006: 125).

Penguasa Magadha berikutnya adalah Kunika Ajatashatru, putra Bimbisara dan Kosala. Kunika Ajatashatru memerintah antara tahun 494-462 SM. Sejumlah teks Buddha menjelaskan bahwa Ajatashatru membunuh Bimbisara dan permaisuri Kosala melakukan bunuh diri (*satya*) demi cintanya pada sang suami. Pemerintahan Kunika Ajatashatru diwarnai dengan beberapa peperangan. Mengacu pada sejumlah teks Buddha dan Jaina diketahui bahwa Kunika Ajatashatru berperang melawan raja Pasanedi, penguasa Kosala, yang menarik kembali pemberian sebagian wilayah Kasi (pada era Bimbisara) setelah saudara perempuannya (permaisuri Bimbisara) wafat. Kunika Ajatashatru juga diceritakan berperang melawan raja Cethaka-Vaisali karena pelanggaran perjanjian terhadap wilayah Licchavi yang memiliki tambang permata nan berharga (Raychaudhuri, 2006: 128-131).

Suksesor Ajathashatru adalah Udayin atau Udayibhaddha. Catatan sejarah dalam *Parisishtaparvan* menunjukkan bahwa pada tahun keempat pemerintahannya, Udayin membangun ibukota baru di Pataliputra. Pemindehan kekuasaan dari Bihar (Rajagriha) ke Pataliputra ini diperkirakan akibat penyerangan Pradyota, raja Avanti, yang dari masa Kunika Ajatashatru menjadi musuh utama Magadha (Raychaudhuri, 2006: 131). Udayin memerintah antara tahun 462-446 SM, kemudian dilanjutkan Arunadha dan Munda (446-438 SM), serta Nagadasaka (438-414 SM), sekaligus menandai pergantian dari dinasti Hiranya ke dinasti Shishunaga. Dinasti Shishunaga memerintah Magadha

dari tahun 414 SM hingga 346 SM, dilanjutkan oleh dinasti Nanda (346-324 SM) (Bechert [Ed.], 1995: 126; Raychaudhuri, 2006: 129-142).

Pada masa selanjutnya, kerajaan Magadha diperintah dinasti Maurya yang berhasil menggulingkan kekuasaan dinasti Nanda. Chandragupta Maurya menjadi raja pertama (322 SM) dan memperluas kekuasaannya ke barat melintasi India Tengah dan Barat, serta menaklukkan *satrap* (provinsi) yang ditinggalkan Alexander Agung. Pada 317 SM, Chandragupta Maurya telah menduduki sepenuhnya daerah barat laut India (Mookerji, 1966: 31). Keberhasilan Chandragupta Maurya tersebut tidak lepas dari peran Maharsi Chanakya (Kautilya atau Vishnugupta), seorang Brahmana dari Takshashila yang menjadi penasihat sekaligus ahli strateginya. Pada masa ini, para pendeta atau Brahmana Hindu kembali dihormati dan menempati sejumlah posisi penting dalam struktur pemerintahan. Chandragupta Maurya memerintah antara 322-298 SM, kemudian dilanjutkan oleh Bindhusara (298-272 SM) dan Ashoka (272-232 SM). Sepeninggal Ashoka, kekuasaan dinasti Maurya dipandang telah melemah dan raja-raja dari dinasti Maurya yang masih tercatat antara lain: Dasaratha (232-224 SM), Samprati (224-215 SM), Shalisuka (212-202 SM), Devavarman (195-187 SM), dan Brihaddatha (187-185 SM).

Era Magadha dapat dipandang sebagai kemunduran politik Hindu karena para penguasanya tidak lagi mempraktikkan ajaran-ajaran Hindu dengan taat, tetapi menjadi era keemasan agama Buddha (*the golden age of Buddhism*) dan Jaina di lain pihak. Secara politik, raja-raja Magadha banyak menunjukkan sikap anti terhadap Hindu (Brahmanisme), seperti melarang seluruh upacara *yajna* menggunakan kurban binatang (Kundra, 1968: 40; Sharma, 2001: 148). Pada era kekuasaan dinasti Maurya, hampir seluruh raja Magadha dikaitkan dengan agama Buddha dan Jaina. Misalnya, teks Buddha mengklaim bahwa Bimbisara mencapai tingkat *Sotappana* (tingkatan pencerahan dalam ajaran Buddha) (Strong, 2007: 72). Teks-teks Jaina juga menyebut bahwa Bimbisara adalah pengikut Jaina dan setelah kematiannya terlahir kembali sebagai

Mahapadma (Padmanabha) salah seorang *thirtankara* masa depan (Dundas, 2002: 40-41). Demikian pula dengan Ashoka yang dipandang memiliki jasa paling besar dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tengah dan Asia Selatan (Strong, 2007: 145). Kendati demikian, era Maurya memberikan ruang yang lebih luas bagi para penganut Hindu untuk mempraktikkan agamanya, seperti membangun kuil-kuil Hindu. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Maharsi Kautilya dalam kebijakan politik dinasti Maurya sebagaimana dapat dirujuk dalam *Kautilya Arthashastra*.

3. Era Kebangkitan Politik Hindu (300 SM-700 M)

Kebangkitan politik Hindu ditandai kemunculan sosok Pusyamitra Shunga, seorang Brahmana yang menggulingkan kekuasaan Bhrihaddatha Maurya pada 185 SM (Thapar, 2013: 296). Dalam kitab *Harshacarita* diceritakan bahwa pada saat raja Brihaddatha sedang mengadakan inspeksi pasukan dalam sebuah parade, ia dibunuh oleh Pushyamitra—*senani* atau *senapati* perang Magadha. Setelah itu, Pusyamitra merebut kerajaan Magadha dari Maurya dan mendirikan dinasti Brahmana bernama Shunga (Majumdar, 1998: 116-117). Pada dasarnya, wilayah kekuasaan Magada di bawah dinasti Sunga meliputi bagian tengah kerajaan Magadha (Maurya) lama, juga pusat kota Ayodhya di India bagian tengah-utara (*middle-northern India*), seperti tertulis dalam prasasti *Dhanadeva-Ayodhya* (Sen, 1999: 169). Peranan Pushyamitra Sungha dalam kebangkitan kembali politik Hindu di Magadha terutama dapat dilihat dari sikap dan kebijakan politiknya terhadap agama Buddha yang hampir selama tiga abad menguasai India.

Berkenaan dengan Pushyamitra, sejumlah kitab agama Buddha dan catatan sejarawan Buddha dari Tibet bernama Taranatha (hidup sekitar abad ke-16 masehi) menyatakan bahwa Pushyamitra merupakan raja Brahmana yang kejam. Pushyamita disebut sebagai orang yang tidak percaya dengan ajaran-ajaran Sang Buddha dan dia sendiri yang memimpin penyerangan untuk membakar dan menghancurkan *Vihara* dan membunuh para

Bhikku (Sinha, 1985: 26-27). Pernyataan ini didukung kitab-kitab Buddha, seperti dalam *Divyavadana* berikut ini.

“...Pushyamitra melengkapi pasukannya empat kali lipat, bermaksud untuk menghancurkan agama Buddha, ia pergi ke Kukkutarama. ... Karena itulah, Pushyamitra menghancurkan *sangharama*, membunuh para bhikku di sana, lalu pergi. ... Setelah beberapa waktu, dia tiba di Sakala, dan berkata bahwa dia akan memberikan hadiah kepada siapa pun yang berhasil membawakannya kepala Bhikku Budha.” (Strong, 1989: 293).

Pushyamitra dipandang sebagai Brahmana yang gigih dalam melindungi, mempertahankan, dan menyebarkan kembali agama *Brahmana*. Dia menjadi pelopor yang mendobrak dan memusnahkan pengaruh agama Buddha di India. Pada masa pemerintahannya, ia menghidupkan kembali supremasi agama *Brahmana* dengan melaksanakan kembali kurban binatang (*pasuyajna*) yang sebelumnya dilarang oleh Maharaja Ashoka (Mani, 2005: 38). Dalam prasasti Ayodya, juga disebutkan bahwa Pushyamitra melaksanakan kembali ritual *Astwamedhayajna* dalam pemerintahannya (Mahajan, 2002: 364). Bersamaan dengan itu, sejumlah mazhab Hindu bermunculan, terutama mazhab Shaiva dan Vaishnava yang turut berperan menentang pengaruh agama Buddha di India (Phalgundi, 2010: 21).

Pushyamitra Sungha memerintah Magadha dari tahun 185 SM hingga 159 SM. Penerusnya berturut-turut adalah Agnimitra (149-141 SM), Vasujyesta (141-131 SM), Vasumitra (131-124 SM), Bhadraka (124-122 SM), Pulindaka (122-119 SM), Ghoshavasva (119-108 SM), Vajramitra (108-94 SM), Bhagabhadra (94-83 SM); dan Devabhuti (83-73 SM). Selepas kekuasaan dinasti Sungha, kerajaan Magadha diperintah dinasti Kanva antara 73 SM hingga 30 SM (Thapar, 2003: 296). Dinasti Kanva kemudian dikalahkan oleh dinasti Salivahana. Bukti-bukti epigrafis dan numismatik menunjukkan bahwa setelah dinasti Salivahana, hegemoni kerajaan Magadha telah berakhir dan muncul kerajaan baru di bawah dinasti Mitra dari Kausambhi dari abad ke-1 SM hingga abad ke-3 M (Bhajpai, 2004: 38-39). Periode ini menunjukkan lenyapnya imperium Magadha di India.

Setelah abad ke-3 M, lahir beberapa negara baru di India. Dinasti Kushana menguasai sebagian besar wilayah Srilanka pada abad ke-4 Masehi dan Smith (1958) menyebutnya sebagai “Ashoka kedua” dalam sejarah Buddhisme. Kemudian muncul era ‘Gupta kedua’ yang dipimpin Chandragupta, Samudragupta I, dan Samugragupta II (abad ke-4 hingga ke-7 M). Periode Gupta ini disebut sebagai periode akhir Hindu klasik ‘*late clasical period of Hinduism*’ (Michael, 2004: 41). Dari abad ke-7 hingga ke-10, terdapat tiga dinasti yang menguasai India Barat, yaitu Gurjara Pratihara di Malwa, Pala di Bengal, dan Rasthrakuta di Deccan. Pada masa ini, Muhammad bin Qasim juga telah melakukan invasi ke wilayah Sindhu (711 M). Setelah abad ke-13, India telah dikuasai kesultanan Islam yang berpusat di Delhi hingga abad ke-16 M. Kerajaan Hindu yang muncul pada periode ini adalah Vijayanagar di India Selatan (1333 M). Setelah era kesultanan Islam, India memasuki imperialisme Eropa dan dikuasi kerajaan Inggris (1858-1947 M). Pascakemerdekaan India (15 Agustus 1947), India telah memasuki periode sejarah politik modern.

Kilas Sejarah Politik Hindu di Nusantara

Penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia berperan penting dalam transformasi sosial dan politik nusantara. Masuknya Hindu tidak saja mengeluarkan bangsa Indonesia dari kegelapan sejarah (*nirleka*), tetapi juga memperkenalkannya dengan sistem politik. Kehadiran kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 masehi menandai awal mula sejarah politik nusantara yang telah menyebutkan nama raja-raja, yaitu Kudungga dan Mulawarman. Hampir sezaman dengan itu, di Jawa Barat juga lahir kerajaan Hindu bernama Tarumanegara (400-700 M) yang didirikan Purnawarman. Berikutnya, Kerajaan Kalingga (618-906 M) di Jawa Tengah dipimpin seorang raja perempuan bernama Ratu Simha. Pada masa ini, diperkirakan bahwa kontak antara Hindu dan Buddha mulai berlangsung intensif (Soekmono, 1981: 37).

Politik Hindu di Jawa mengalami perkembangan pesat pada masa Mataram Kuno ditandai temuan prasasti dan artefak-

artefak keagamaan Hindu. Pada masa ini, dinasti Sanjaya (Hindu-Shiwa) dan dinasti Syailendra (Buddha Mahayana) menjadi penguasanya Menurut Rassers (dalam Sedyawati, 2009: 19), Siwa dan Buddha di Jawa Tengah menjadi agama negara yang terkait dengan wangsa-wangsa kerajaan yang berkuasa. Semasa dengan itu, di Jawa Timur muncul kerajaan Hindu bernama Kanjuruhan seperti tertulis dalam prasasti Dinoyo berangka tahun 760 M. Prasasti ini menceritakan bahwa pada abad ke-8, terdapat kerajaan yang dipimpin Dewasimha, berputra Limwa yang menggantikan sebagai raja bergelar Gajayana.

Kerajaan Hindu di daerah Jawa Timur didirikan dinasti Isana (Isanawamsa) setelah berakhirnya kekuasaan Sanjayawamsa di Jawa Tengah. Raja pertama dinasti ini adalah Mpu Sindok (929-947 M), kemudian digantikan Dharmawangsa Teguh Anantawikramatunggadewa (991-1016 M). Pada masa ini, muncul perkembangan keagamaan yang luar biasa terutama penulisan kembali teks-teks Hindu dan Buddha ke dalam bahasa Jawa Kuno. Penerus Dharmawangsa Teguh adalah Airlangga yang digambarkan sebagai titisan Wisnu. Diceritakan bahwa sebelum mangkat (1049 M), Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala (Singhasari) beribukota di Kahuripan dan Panjalu (Kadiri) yang beribukota di Daha.

Pada mulanya, kerajaan Panjalu (Kadiri) lebih berkembang. Raja pertama Kadiri adalah Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu dengan prasasti berangka tahun 1104 M, dilanjutkan oleh Kameswara (1115-1130 M). Penerusnya adalah Jayabaya (1130-1160 M) yang dikekalkan dalam *Kakawin Bharatayuddha*, gubahan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Raja Jayabaya diganti Sarweswara (1160-1170 M), serta Aryeswara (1170-1180). Raja terakhir Kadiri adalah Krtajaya (1200-1222 M) dan pada masa inilah pemerintahan berpindah ke Singhasari (Soekmono, 1973: 57-58) setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Krtajaya dalam pertempuran di Genter.

Singhasari dipimpin oleh Ken Arok (1222-1227 M), sebelum digulingkan oleh Anusapati (1227-1248 M). Anusapati

digulingkan oleh Tohjaya dan Tohjaya akhirnya digulingkan oleh Ranggawuni–putra Anusapati. Sejak 1248 M, Singhasari diperintah Ranggawuni bergelar Sri Jaya Wisnuwardhana yang namanya dikekalkan dalam prasasti. Pada tahun 1254 M, Wisnuwardhana melantik puteranya, Krtanegara sebagai raja Singhasari. Singhasari meraih puncak kejayaan pada masa Kertanegara. Dalam teks *Negarakertagama* disebutkan bahwa Kertanegara berhasil menaklukkan Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku). Selain itu, Kertanegara juga telah membangun hubungan politik dengan Campa dengan memberi salah satu putrinya kepada raja Campa, Jaya Simhawarman III.

Kejayaan Singhasari mengalami kehancuran pada 1292 M, akibat serangan kerajaan Kediri yang bangkit lagi setelah dipimpin Jayakatwang. Diceritakan bahwa Raden Wijaya yang sedang mengejar tentara Kediri ke utara terpaksa melarikan diri setelah tahu Singhasari jatuh. Raden Wijaya menyeberang ke Madura untuk mencari perlindungan dan bantuan dari Arya Wiraraja di Sumeneb. Atas saran dan jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya menghambakan diri ke Jayakatwang di Kediri dan ia dianugerahi tanah di desa Tarik. Kemudian, memanfaatkan penyerangan pasukan Tiongkok ke Singhasari, maka Raden Wijaya berhasil menguasai Singhasari dan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Dengan bantuan pasukan Singhasari yang kembali dari ekspansi Pamalayu ke Sumatera, maka Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pertama Majapahit bergelar Krtarajasa Jayawardhana (1293-1309 M). Raden Wijaya digantikan Kalagemet atau Jayanegara (1309-1328 M). Jayanegara digantikan Bhre Kahuripan bergelar Tribhuwananottunggadewi Jayawisnuwardhani (1328-1360 M). Pada tahun 1331 M, muncul pemberontakan di Sadeng dan Keta yang berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Tribhuwananottunggadewi menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanagara (1360-1369 M) dan Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih.

Pada masa inilah, Majapahit mengalami masa keemasan. Seluruh wilayah nusantara (Indonesia sekarang) berhasil dikuasi Mahapahit, juga sejumlah wilayah di Asia Tenggara sekarang. Selain negarawan, Gajah Mada dikenal pula sebagai ahli hukum dan politik. Gajah Mada menyusun kitab *Kutaramanwa* sebagai kitab hukum di Kerajaan Majapahit berdasarkan kitab hukum *Kutarasastra* (lebih tua) dan kitab Hindu *Manawadharmasastra*. Pasca kematian Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa suram dan menuju kehancurannya, sekaligus ditandai dengan masuknya Islam ke Jawa. Satu-satunya kitab yang menunjukkan akhir Majapahit adalah *Pararaton*, meskipun uraiannya juga belum sepenuhnya diterima oleh kalangan sejarah. Penerus Majapahit akhir adalah Kertabumi atau Brawijaya yang memerintah pada tahun 1453-1478 M, tetapi tidak diketahui mengenai perjalanan kerajaannya.

Setelah berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, Blambangan menjadi kerajaan Hindu yang baru dapat ditaklukkan oleh Mataram Islam dan VOC pada 1771 M (Sudjana, 2001). Satu-satunya kerajaan Hindu yang tetap mencatatkan eksistensinya hingga era kolonial adalah Bali. Sejarah kerajaan Bali merentang dari periode Bali Kuno (abad ke-8 sampai ke-14 M) hingga Bali Majapahit (abad ke-14 sampai era kemerdekaan). Kemampuan Bali bertahan secara politik menjadikannya satu-satunya pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu di nusantara hingga saat ini. Dengan berakhirnya kerajaan Bali seiring perubahan sistem politik nasional, maka berakhir pula sejarah politik Hindu nusantara.

Simpulan

Relasi politik dan agama menjadi keniscayaan dalam peradaban manusia. Tanpa politik, ajaran agama tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga sebaliknya, tanpa agama, politik rentan mengalami degradasi dan menjauhkan masyarakat dari tujuan hidupnya. Sejarah politik Hindu di India menunjukkan relasi yang kuat antara aktivitas politik dengan perkembangan

keagamaan dan kebudayaan masyarakatnya. Pelaksanaan upacara-upacara keagamaan seperti *rajasuya*, *vajapeya*, dan *asvamedha* sebagai ritual kenegaraan (*royal sacrificed*) bukan saja menunjukkan kekuasaan seorang raja, melainkan juga ketataan mereka terhadap ajaran agamanya. Kedudukan literatur keagamaan sebagai literatur politik, juga sekaligus menegaskan pentingnya spirit keagamaan dalam pembangunan politik Hindu.

Daftar Pustaka

- Bechert, Heinz (Ed.). 1995. *When the Buddha Live? The Controversy on the Dating of the Historical Buddha*. Delhi: Sri Satguru.
- Benedetti, Giacomo. 2018. "Mahābhārata and archaeology: the chariot of Sanauli and the position of Painted Grey Ware", in *new-indology.blogspot.com*, published on 13 January 2019.
- Bhajpai, K.D. 2004. *Indian Numismatic Studies*. New Delhi: Abhinav Publications.
- Dundas, Paul. 2002. *The Jains*. London and New York: Routledge.
- Kamlesh, Kapur. 2010. *Portraits of a Nation: History of Ancient India*. New Delhi: Sterling Publisher Pvt. Ltd.
- Kundra, D.N. 1968. *New Textbook of History of India*. New Delhi: Gurdas Kapur.
- Lal, B.B. 1954/55. "Excavation at Hastinapur and other explorations in the Upper Ganga and Sutlej Basins 1950—52", in *Ancient India. Bulletin of the Archaeological Survey of India No. 10 & 11*. New Delhi, p. 4—151.
- Mahajan, V.D. 2002. *Ancient India*. New Delhi: S. Chand & Co. Ltd.
- Majumdar, R.C. 1998. *Ancient India*. New Delhi: Motilal Banarsidass
- Mani, Chandra Mauli. 2005. *A Journey Through India's Past: From Earliest Time to the Last Hindu Emperor*. New Delhi: Northern Book Centre.
- Michael, Axel. 2004. *Hinduism. Past and Present*. New Jersey: Princeton University Press.
- Mookerji, Radhakumud. 1966. *Chandragupta Maurya and His Time*. New Delhi: Motilal Banarsidass.

- Phalgunadi, I Gusti Putu. 2010. *Sekilas Sejarah Evolusi Agama Hindu (Edisi Revisi)*. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Radhakrishnan, Sarvepalli (Introduction). 1982. *The Culture Heritage of India, Volume I: The Early Phases (Prehistoric, Vedic and Upanisadic, Jaina and Buddhist)*. Kolkata: Ramakrishnan Mission Institute of Culture.
- Raychaudhari, Hemcandra. 1927. *Political History of Ancient India: From the Accession of Pārikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty*. (Originally published 1923). New Delhi: Cosmo Publications.
- Sen, Sailendr Nath. 1999. *Ancient Indian History and Civilization. Second Edition*. New Delhi: New Age International, Pvt. Ltd.
- Sharma, L.P. 2001. *History of Ancient India*. New Delhi: Konark Publisher Pvt. Ltd.
- Sharma, Ram Saran. 2005. "The Age of Rigveda" in *India's Ancient Past*. New Delhi: Oxford University Press.
- Singh, Upinder. 2008. *A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century*. New Delhi: Darlin Kindersley Pvt. Ltd.
- Sinha, Binod Chandra. 1985. *Glorious Art of the Sunga Age*. Delhi: Durga Publications.
- Soekmono. 1981. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Strong, John. S. 2007. *Relics of the Buddha*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sudjana, I Made. 2001. *Nagari Tawon Madu Sejarah Politik Blambangan Abad XVIII*. Kuta-Bali: Larasan Sejarah.
- Taphar, Romila. 2000. *History & Beyond*. London: Oxford University Press.
- _____. 2013. *The Past Before Us: Historical Traditions of Early North India*. London: Oxford University Press.

- Toynbee, Arnold. 2007. *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, Naratif, dan Komparatif*. Judul Asli *Mankind and Mother: Earth A Narrative History of The World*. Terjemahan: Agung Prihantoro, dkk., Kamdani (Peny.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Witzel, Michel. 1989. "Tracing the Vedic Dialect", in *Dialectes dans les litteratures Indo-Aryennes*. Caillat (Ed.). Paris, p. 1—146.
- _____. 1995. "Early Sanskritization. Origins and Development of the Kuru State", in *Electronic Journal of Vedic Studies (EJVS)* 1-4, p. 1—26.

CĀṆAKYA ARTHAŚĀSTRA: Warisan Politik Kenegaraan Hindu

Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari*

Pendahuluan

Bagai menyelam di tengah samudera pengetahuan yang luas, demikianlah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan upaya menyelami sejarah pemikiran Politik Hindu. Ajaran-ajaran serta dalil yang membahas mengenai sistem politik, filsafat politik kenegaram, kepemimpinan, sistem tata negara, etika politik maupun pemikiran-pemikiran politik Hindu dapat di lacak keberadaannya dari puluhan ribu tahun yang lalu, dimulai dari pustaka R̥gveda. Selain itu Rāmāyaṇa, dan Mahābhārata juga merupakan kitab politik disamping kitab yoga. Dhanurveda, turunan dari Yajur Veda yang merupakan bagian integral dari Catur Veda merupakan salah satu kitab yang membahas secara detail mengenai ilmu pertahanan, ilmu militer, ilmu pemerintahan, serta tata kehidupan masyarakat sipil. Pemikiran politik Hindu juga bisa pelajari dari ajaran-ajaran para Mahatma seperti Manu dan Kauṭilya melalui karya-karya mereka. Merujuk pada sumber yang lebih tua, pemikiran politik Hindu bahkan dapat dilacak pada kepustakaan tertua di dunia R̥gveda, sampai pada Atharvaveda, bagian terakhir dari Catur Veda Samhita.

Manu atau Svayambhuwa terkenal melalui karyanya berjudul Manusmṛti. *Manusmṛti* juga dikenal dengan nama Manava Dharma Shastra. Kitab ini memegang posisi sentral dan penting dalam literature Hindu. Manusmṛti merupakan smṛiti tertua yang merupakan gudang informasi mengenai kehidupan sosial, peradilan dan politik hindu. Sebagian besar komentator pemikiran India Kuno berpandangan bahwa Manu (Svayambhuva) hidup pada abad keempat sebelum masehi.

* Alumni Universitas Pertahanan, Researcher The Hindu Center of Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ayunikkia@gmail.com

Sehingga kitab ini merupakan pengejawantahan hukum hindu dan bentuk normal masyarakat serta peradaban Hindu di periode tersebut. Manusmṛti merupakan satu dari sembilanbelas jenis dharmashastra, yang merupakan bagian integral dari kitab-kitab Smerti (Doniger dan Smith, 1991: 16).

Sementara itu, Kauṭilya atau sering pula disebut Cāṇakya atau Vishnugupta merupakan Mahatma, filsuf, ahli strategi, dan diplomat ulung yang terkenal melalui karya karya seperti Arthaśāstra, Cāṇakya Nīti, Cāṇakya sūtra, Vṛddha Cāṇakya dan Laghu Cāṇakya. Arthaśāstra adalah karya beliau yang paling monumental. Sebagai seorang Perdana Menteri dari Raja Chandragupta, dinasti Maurya, Ide-ide politik dan administrasi yang dituangkan oleh Cāṇakya memberikan focus perhatian kepada Raja dan Kerajaan, sebagai bentuk representasi negara pada masa itu. Berdasarkan Filosofi yang dipegangnya, demi kelancaran administrasi negara serta demi terciptanya kesejahteraan rakyat, seorang Raja harus fasih dan menguasai betul Veda serta empat ilmu pemerintahan (Ānvīkṣikī, Trayī, Vārtā dan Daṇḍanīti).

Meskipun ada spekulasi bahwa politik di India kuno lebih tua dari Manusmṛti dan Arthaśāstra, tetapi karena tidak adanya catatan tertulis, sulit untuk melacak ide-ide politik dan administratif dari para pemikir periode pra Manu dan pra Kauṭilya. Jadi, Terlebih lagi hasil karya para Mahatma sebelum masa mereka telah hilang dan hanya sebagaian kecil referensi yang tersisa dari karya para mahatma tersebut ditemukan dalam Mahabharata, dan Arthaśāstra. Hal yang kemudian tidak dapat dipungkiri adalah Kauṭilya Arthasahstra telah menjadi sebuah ringkasan yang paling komprehensif (walau susunanannya tidak berurutan) dari semua Arthaśāstra sebelum masa dituliskannya Arthaśāstra oleh Kauṭilya atau Cāṇakya (Kaur, 2011). Sehingga untuk mengerucutkan tulisan ini, penulis akan meletakkan fokus kepada sejarah dan pemikiran Maharsi Cāṇakya, dalam karya monumentalnya Arthaśāstra.

Pembahasan

Sejarah Pemikiran Politik Hindu: Cāṇakya dan Arthaśāstra

Arthaśāstra disusun oleh Cāṇakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. Arthashastra karya Cāṇakya terdiri dari 32 bagian, 15 adikarana dengan 150 bab dan 600 sloka. Dengan demikian Arthaśāstra dapat pula dikatakan sebagai sebuah kompendium tentang bagaimana mengelola suatu Negara secara lengkap dan detail. Atas karya yang begitu monumental ini, Cāṇakya dianggap sebagai tokoh politik Hindu yang legendaris, sehingga kejeniusannya sering disepadankan dengan para filsuf dan negarawan barat seperti Plato, Aristoteles, dan Machiavelli.

Menurut Max Weber dalam kuliah politiknya yang terkenal yaitu *"Politics of Vocation"*, pemikiran Machiavelli justru bukanlah pemikiran yang brutal melainkan moderat, jika dibandingkan dengan pemikiran Sun Tzu dalam *"The Arts of War"* dan pemikiran Kautilya dalam *"Arthashastra"*. Kedua pemikiran ini juga berisikan anjuran dalam statecraft (seni memerintah) yang bahkan lebih kejam dengan menggunakan konsep penggunaan mata-mata, membunuh seorang musuh politik, penggunaan tentara bayaran, bahkan penyiksaan. Bahkan sebenarnya konsep penggunaan tentara bayaran sudah dikenal oleh Aristoteles (tentang tirani Pisistratus) dan Tacitus (tentang penguasa Tiberius) namun Machiavelli baik dalam kedua tulisannya tidak menganjurkan pemimpinnya untuk melakukan hal demikian. Machiavelli bahkan terkesan lebih lunak hanya dengan menganjurkan paham oportunisme politik yang berlandaskan pada sikap tamak, kejam, tidak dapat dipercaya, congkak dan keras kepala.

Secara garis besar Arthaśāstra merupakan sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan

pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. Bagaimana sebuah panduan praktis yang tak terlalu mengikat dan baku untuk dapat menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara.

Cāṇakya atau Kauṭilya sebagai penulis risalah ini merupakan seorang perdana menteri sekaligus penasihat politik utama Raja Chandragupta dan anaknya, Bindusara di Kerajaan Maurya. Naskah yang disusun sekitar 300 SM ini memuat doktrin kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keinginan raja ambisius untuk menjadi penakluk/penguasa dataran India (Karad, 2015: 322-332). Raja atau pemimpin negara berupaya mengakumulasi *power* negaranya untuk jadi yang terkuat.

Dengan demikian negaranya akan aman dari serangan negara lain. Arthaśāstra disusun oleh Cāṇakya dengan latarbelakang sistem internasional yang anarki, tanpa adanya supremasi yang lebih tinggi dari negara. Keadaan ini diperparah dengan ketiadaan kesepakatan bersama mengenai penghormatan atas kedaulatan dan batas-batas suatu negara, selayaknya yang berkembang pada masa modern saat ini. Pada masa dinasti Candragupta, sistem yang ada mengembangkan apa yang disebut sebagai pandangan realisme, yang mengedepankan *self-help*, upaya negara untuk terus mengakumulasi *power* agar *sustainability* negara tetap terjaga. Pandangan yang berkembang antar negara adalah pilihan hanya ada dua, antara menaklukkan atau ditaklukkan. Pengembangan *power* atau *growth* negara bisa terjadi ketika negara berhasil mengakuisisi wilayah kerajaan tetangganya atau kerajaan lainnya. Karena dengan akuisisi ini kerajaan mendapat tidak hanya penambahan wilayah, namun juga perbendaharaan yang diperoleh melalui upeti dari raja yang telah dikalahkan, dan juga sumber daya alam yang terdapat pada kerajaan yang telah ditaklukkan tersebut (Avalokitesvari, 2018).

Fokus pemikiran politik Acharya Cāṇakya berada pada tataran bahwa Negara adalah institusi tertinggi yang wajib dan

harus dijaga keberlangsungannya. Dalam hal ini Raja seagai pimpinan negara memiliki kuasa dan tanggung jawab dalam menjalankan roda negara. kekuasaan raja memang absolut, namun bukan berarti Raja dapat bertindak semena-mena. Karena tujuan utama dari raja adalah kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. Ini merupakan hal yang paling ditegaskan oleh Cāṇakya kepada seorang pemimpin negara. Sebagaimana kutipan inilah yang digunakan sebagai pembuka kitab Cāṇakya Arthaśāstra yang di transliterasi oleh L.N. Rangarajan.

प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्
prajā.sukhe sukhaṃ rājñāḥ prajānāṃ ca hite hitam

In The Happiness of his subject lies the king's happiness; in their welfare his welfare. He shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects.

Dalam kebahagiaan rakyatnya disanalah terletak kebahagiaan raja; dalam kesejahteraan rakyatnya disanalah letak kesejahteraan raja. Apa yang berharga bagi sang raja sendiri belum tentu demikian pula bagi negara, tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya menjadi bermanfaat bagi diri sang raja, apapun yang menyenangkan rakyatnya (Arthaśāstra 1.19.34)

Upaya membahagiakan dan mensejahterakan rakyat merupakan tugas utama seorang raja. Karena bagi Cāṇakya sumpah suci seorang raja adalah kesediaannya untuk bekerja secara aktif guna memajukan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Tugas raja/penguasa tidak hanya untuk mencari kesenangan pribadinya, namun juga bagaimana mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Bila penguasa sejahtera namun rakyatnya tidak, maka sesungguhnya penguasa tersebut telah gagal untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Pemimpin negara harus berusaha mencegah gangguan timbul, mengatasi ancaman yang sudah muncul, serta menghancurkan dan menghentikan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara.

Ajaran Politik Negara dalam Arthaśāstra

Ācārya Cāṅkya selalu menekankan bahwa dalam menjalankan diplomasi, raja/pemimpin negara selayaknya selalu berpedoman pada beberapa hal. Pertama adalah keadaan internal negara yang tercermin dari elemen elemen pembentuk negara yang dijabarkan dalam teori *saptāṅga*. Hal penting berikutnya adalah teori Maṅḍala yang membahas mengenai konstelasi geopolitik negara yang akan diajak bekerjasama atau akan ditaklukkan. Pasca menentukan posisi dari negara yang ditargetkan tersebut, langkah selanjutnya adalah kebijakan apa yang akan diambil untuk menghadapi negara tersebut yakni *śāḍguṇya* atau *six fold foreign policy*. Berikutnya, baru diputuskan upaya apa yang akan ditempuh sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri tersebut (*catur upaya*), apakah *sama*, *dama*, *bedha* dan atau *danda*. Tetapi, yang perlu ditekankan adalah sifat dari kebijakan dan arahan dari Cāṅkya ini tidak bersifat kaku dan harus sama dengan yang tertulis. Justru kalau dipandang dan diaplikasikan demikian, filsafat politik dari Cāṅkya ini akan mudah usang dan termakan zaman. Maka dari itu, fleksibilitas dan dinamisme-nya harus tetap dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan konstelasi perpolitikan internasional yang terjadi.

Teori Saptāṅga

Saptangga Theory menggambarkan mengenai tujuh elemen yang membentuk sebuah negara. Negara dalam Arthaśāstra dianalogikan sebagai organisme yang berkembang dan *prakritis* adalah bagian tubuhnya (Sukra, 2012). Tujuh bagian ini, antara lain *Swamin* (Ruler, Raja/Penguasa/Pemimpin negara); *Amatya* (*concilors*/anggota dewan/mereka yang mewakili institusi negara); *Janapada* (*Territory/resources*/sumber daya negara, termasuk wilayah dan penduduk); *Durg* (*Well-fortified Sovereign entity*/entitas berdaulat yang dibentengi); *Kosa* (*Treasury*/Perbendaharaan); *Danda/Bala* (*Military/Army and order keeping*/Militer dan penjagaan ketertiban); dan *Mitra* (*Friend/ Ally/ teman dan sekutu negara*) (Kautilya Arthaśāstra 6.1.1).

Cāṅkya menggambarkan ketujuh elemen pembentuk negara itu sebagai eksposisi dari teori Maṅḍala (*circle of state*) yang kemudian membentuk dasar dari kebijakan luar negeri di lingkungan yang didominasi oleh ekspansionisme teritori atau penaklukan teritori. Maka dari itu, sebelum melanjutkan sebuah ekspedisi untuk menaklukkan wilayah lain, raja atau pemimpin negara harus menggunakan langkah-langkah preventif dan defensif untuk menghalau bahaya/ancaman yang mungkin melemahkan salah satu unsur penyusun negaranya sendiri. Menurut Cāṅkya, raja harus selalu berusaha dengan sangat gigih untuk melakukan tugas dan tanggung-jawabnya terhadap rakyat negaranya. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi memberikan perlindungan, melayani administrasi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Konsep *Saptāṅga* teori ini tidak hanya dipandang sebagai tujuh elemen yang harus dimiliki negara yang menginginkan kekuatan yang mumpuni bagi bangsanya. Dalam interpretasi yang lain Konsep *Saptāṅga* juga dimaknai sebagai *Elements of Sovereignty*. (Singh, 2012: 32). Di mana sebuah negara selayaknya menjaga ketujuh elemen ini dari ancaman yang bisa melemahkan salah satunya. Karena pelemahan salah satu elemen dalam *Saptāṅga* ini dapat memicu kelemahan pada elemen-elemen lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai kekuatan nasional yang komprehensif negara selayaknya mampu menjaga dan bahkan memperkuat kualitas ketujuh elemen *Saptāṅga* ini.

Tujuh *prakritis* bersama-sama termanifestasi menjadi *Shakti* atau kekuatan bagi negara. *Arthaśāstra* mengidentifikasi tiga *shakti*: *Prabhava-shakti*, *Mantra-shakti* dan *Utsaha-shakti*. *Prabhava-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk menghasilkan "efek" yang menguntungkan negara yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kekuatan militer suatu negara. Dengan demikian, dalam pendekatan ilmu Hubungan Internasional saat ini, dapat diasosiasikan dengan konsep *hard power*. *Mantra-shakti* dimaknai sebagai kekuatan untuk mempengaruhi, memberi nasihat, dan mendorong negara lain untuk dikooptasi oleh sang *vijigīṣu*.

Konsep kekuatan nasional menurut Cāṇakya berangkat dari keadaan *Saptāṅga* (tujuh elemen pembentuk negara) yang sehat dan kuat. Dengan demikian, sudah menjadi tugas penguasa negara untuk memajemen elemen-elemen ini dan mengoptimalkan posisinya hingga mencapai keunggulannya masing-masing. Coates dan Caton (dalam Adityakiran, 2015) berargumen, memiliki kesamaan yang mencolok dengan konsep 'soft - hard power' Nye: *mantrashakti* tidak lain adalah *soft power*, sementara *prabhavashakti* adalah *hard power*; dan di atasnya, Cāṇakya melayani dimensi lain *utsahashakti* untuk memberikan kekuatan pendorong untuk mengarahkan dua lainnya bersama dengan energi yang terfokus dan kokoh (Adityakiran dalam Gautam, 2015: 28-29).

Teori Maṇḍala

Maṇḍala Theory—The Circle of State Theory, menjabarkan konstelasi geopolitik dari sebuah negara, merujuk kepada *Vijigīṣu*/raja/negara penakluk, yang diposisikan berada ditengah negara-negara lain dalam konstelasi percaturan politik internasional dunia yang berupaya saling menaklukkan/memengaruhi satu sama lain. Teori Maṇḍala ini menyertakan setidaknya 12 kategori negara dalam lingkaran negara/*circle of a state*, yaitu (1) *vijigīṣu* (*the would be conqueror*) atau negara yang berhasrat untuk menaklukkan negara lain, (2) *ari* (*enemy*) musuh utama negara penakluk, (3) *mītra* (*the vijigīṣu's ally*) sekutu dari sang *vijigīṣu*, (4) *arimitra* (*ally of enemy*) sekutu dari musuh, (5) *mitramitra* (*friend of ally*) kawan dari sekutu sang *vijigīṣu*, (6) *arimitramitra* (*ally of enemy's friend*) kawan dari sekutu sang musuh, (7) *parsnigraha* (*enemy in the rear of the vijigīṣu*) musuh di garis belakang sang *vijigīṣu*, (8) *akranda* (*vijigīṣu's ally in the rear*) sekutu dari sang *vijigīṣu* di garis belakang, (9) *parsnigrahasara* (*ally of parsnigraha*) sekutu dari musuh di garis belakang sang *vijigīṣu*, (10) *akrandasara* (*ally of akranda*) sekutu dari akranda, (11) *madhyama* (*middle king bordering both vijigīṣu and the ari*) negara tengah yang berbatasan dengan *vijigīṣu* serta *aria tau* musuh.

Sementara itu yang (12) *udasina* (*lying outside, indifferent/neutral, more powerful than vijigīṣu, ari and madhyami*) negara netral/acuh tak acuh, berada diluar dari lingkaran, biasanya lebih kuat dari *vijigīṣu, ari*, dan juga *madhyami* (Kangle, 1986: 248). Namun hal yang perlu digaris-bawahi adalah dalam konstelasi geopolitik ini tidak serta merta kemudian secara harfiah menyatakan bahwa sang *vijigīṣu* atau negara yang berniat untuk menaklukkan menjadi pusat dari negara-negara lainnya. Ilustrasi di atas merupakan bentuk simbolis semata, di mana dalam keadaan nyata sangat memungkinkan terbentuknya Maṇḍala yang saling tumpang tindih, tergantung pada konstelasi arah kerjasama ataupun analisa lingkungan strategis dalam percaturan politik regional maupun global. Konstelasi geografis ini bersifat dinamis, di mana negara tetangga bisa saja bermusuhan, ramah atau bersifat hubungan vasal (negara bawahan) (Kangle, 1986: 249).

Teori Śāḍgunya: Enam Kebijakan Luar Negeri

Śāḍgunya teori merupakan enam kebijakan yang diterapkan oleh negara sesuai dengan keadaan lingkungan strategis dari negara tersebut terhadap negara-negara lain dalam lingkup percaturan politik internasional. Keenam kebijakan itu antara lain: *saṁdhi, vighraha, asana, yana, samsraya* dan *dvaiddbhava*.

Śāḍgunya Theory (*six fold foreign policy*) atau enam kebijakan politik luar negeri, menurut Cāṇakya merupakan penentuan (kebijakan) dari sebuah negara apakah akan mundur, stabil/berdiam diri atau maju pada sebuah keputusan terkait dengan hubungan luar negeri. Keenam kebijakan politik tersebut adalah membuat perdamaian (*saṁdhi*), melakukan peperangan (*vighraha*), tinggal diam/netral (*asana*), mempersiapkan diri untuk perang atau siaga (*yana*), mencari dukungan atau aliansi (*samsraya*), dan kebijakan ganda (*dvaiddbhava*) yaitu membuat perdamaian dengan negara satu sementara itu juga mengadakan peperangan dengan negara lainnya (Kauṭilya Arthaśāstra 7.13. 42-44: 366).

Sebuah negara bisa menjalankan lebih dari satu kebijakan di saat yang bersamaan dengan beberapa negara sekaligus. Karena

konsep aplikasi dari *śāḍgunya* ini tidak berlaku secara kaku sesuai urutan. Namun sesuai perkembangan kondisi lingkungan strategis negara saat itu. Dengan demikian, kondisi yang sedang berlangsung akan menentukan kebijakan apa yang sebaiknya akan digunakan.

Cāṅakya sendiri berpendapat bahwa ada dua acara yang dapat ditempuh oleh *vijigīṣu* guna mencapai tujuannya, yaitu perang atau diplomasi. Tentang *vijigīṣu*, Kauṭilya menjangkarkan idenya pada konsep Raja sebagai *vijigīṣu* (orang yang ingin menaklukkan), sebuah istilah teknis yang merujuk pada arti seorang penguasa yang menginginkan dan berkomitmen penuh untuk menaklukkan. Namun jika kita arahkan pada pengertian kekinian dengan situasi percaturan politik internasional *vijigīṣu* kemudian dapat dimaknai sebagai sebuah negara yang menginginkan untuk memperluas pengaruhnya (*power*) ke negara-negara lain secara terus-menerus. Ada beragam strategi diplomasi yang dijabarkan oleh Cāṅakya dalam Arthaśāstra, salah satunya adalah *atisaṃdhāna* yang merujuk pada pembuatan pakta atau perjanjian dengan pihak lain (negara lain) dan menggunakan perjanjian-perjanjian ini untuk mengecoh dan mengguguli pasangan potensial mereka. Bentuk sederhana dari istilah ini kemudian dikenal dengan *saṃdhi* yang tergabung ke dalam bagian pertama dari *śāḍgunya* atau enam kebijakan politik luar negeri (*six fold foreign policy*).

Istilah *saṃdhi* sendiri merujuk kepada pembuatan pakta atau aliansi dengan penguasa lain (negara lain) untuk mencapai tujuan bersama, seperti misalnya menyerang pihak ketiga. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, Cāṅakya juga menginstruksikan untuk menggunakan aliansi sebagai peluang untuk tidak hanya mengalahkan musuh bersama dan mencapai tujuan bersama. Namun juga sebagai sebuah proses untuk melemahkan atau mengalahkan sekutu *vijigīṣu* itu sendiri. Strategi ini kemudian terlihat seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Ini merupakan bagian dari "*Mantrayuddha*" atau "perang kecerdasan"

yang dijabarkan oleh Cāṇakya pada keseluruhan isi dari bagian buku ke-XII nya (Olivelle, 2016: 10-11).

Menariknya, Cāṇakya menempatkan *Mantrashakti* (diplomasi) sebagai sebuah kemampuan terkuat yang harus dimiliki dengan cakap oleh sebuah negara. Dalam ketiga *shakti*, *mantra shakti* ini paling penting dan paling kuat. Dengan demikian dapat dipastikan kecenderungan untuk menggunakan kekuatan narasi (menasehati, mempengaruhi, menarik dan mengkooptasi) negara-negara lain dalam kancah hubungan internasional seharusnya tidak luput dari perhatian negara. Cāṇakya mengibaratkan hal ini dalam sebuah ungkapan “*anak panah yang dilepaskan oleh seorang pemanah bisa saja membunuh satu orang atau bahkan justru tidak membunuh seorangpun. Namun kecerdasan yang dijalankan oleh orang bijak bahkan bisa membunuh anak yang ada di dalam kandungan*” (KA 10:6.51; Kangle, 1986: 458; Rangarajan: 625).

Arthaśāstra karya Cāṇakya sesungguhnya memberikan penekanan yang lebih kepada peranan diplomasi namun tidak memberikan preferensi atas perang. Hal ini kemungkinan besar karena sistem sosial masyarakat kerajaan Dinasti Maurya saat itu, yang menitikberatkan pengelolaan negara pada kaum Ksatria, yang seolah-olah dilahirkan dan ditakdirkan untuk “berperang”. Diplomasi bagi Cāṇakya dijalankan untuk mencapai beberapa hal seperti menarik sekutu, menunda perang jika sebuah negara itu lemah dan mudah diserang dan untuk membuat *post war arrangements for a new order*.

Simpulan

Hindu tidak memisahkan pemikiran politik dari agama dan negara, melainkan sebagai bagian utuh dari seluruh peradaban. Sejarah pemikiran politik Hindu bahkan dapat dilacak pada teks tertua di dunia *R̥gveda*, kemudian *Dhanurveda*, turunan dari *Yajur Veda* yang berisi pengetahuan politik, perang dan persenjataan. Selanjutnya *Rāmāyaṇa* dan *Mahābhārata*. Selain itu terdapat pustaka *Manusmṛti* dan *Arthaśāstra* yang merupakan compendium politik dan tata pemerintahan Hindu. Mengapa

Hindu menempatkan pemikiran politik dan tata negara pada porsi yang sangat penting? Sebab pada prinsipnya, Dharma tidak dapat tegak tanpa Artha (kesejahteraan) dan kesejahteraan sebuah negara bergantung pada faktor politik, kepemimpinan dan situasi negara secara umum.

Arthaśāstra yang ditulis oleh *Ācārya Cāṇakya* atau *Mahārṣi Kauṭilya* merupakan pedoman praktis yang ditulis dari pemikiran-pemikiran politik para *Rṣi* sebelumnya. Dengan demikian sejak jaman lampau, pemikiran politik dan tata negara mendapat porsi yang sangat besar dalam peradaban Hindu. Namun politik yang dimaksud bukan seperti apa yang ditunjukkan oleh para politisi dewasa ini yang berjuang didunia politik hanya untuk meraih kekuasaan semata, bahkan dengan cara-cara yang penuh tipuan dan merugikan masyarakat. Namun politik dan tata negara yang dimaksud adalah bagaimana membangun pemimpin, memilih para birokrat, menghadapi musuh dan menjalankan administrasi negara guna menjamin masyarakat mendapatkan pengayoman dan kesejahteraannya meningkat sebagai sebuah anugrah hidup pada sebuah tatanan negara yang baik.

Daftar Pustaka

- Adityakiran, G., 2015. "Kauṭilya's Pioneering Exposition of Comprehensive National Power in the Arthaśāstra", dalam P. K. Gautam, Saurabh Mishra and Arvind Gupta (eds), *Indigenous Historical Knowledge: Kauṭilya and His Vocabulary*, Volume I. New Delhi: IDSA, Pentagon Press.
- Avalokitesvari, Ayu Nikki, "Analisa Diplomasi Pertahanan Negara dalam Pandangan Chanakya Arthashastra, Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan Negara" *Tesis*. Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2018.
- Doniger, Wendy dan Brian K. Smith, 1991. *The Laws of Manu*. Penguin Challics.
- Kangle, R.P., 1986. *The Kauṭilya Arthashastra, Part II*.

- Karad, Satish, "Perspective of Kauṭilya's Foreign Policy: An Ideal of State Affairs", *Modern Research Studies*. Volume 2. Nomor 2, June 2015. Hlm. 322-332
- Kaur, Mohinder, 2011. "Political and Administrative Ideas of Manu and Kauṭilya: A Comparative Study". *Disertasi*. Department of Political Science, Punjabi University Patiala.
- Olivelle, Patrick. 2016. "Economy, Ecology and National Defence in Kauṭilya's Arthasāstra", dalam *Indigenous Historical Knowledge: Kauṭilya and His Vocabulary*. New Delhi: Pentagon Press and Institute for Defence Studies and Analyses.
- Sukra, Sukraniti, (Mumbai: Khemraj Shrikrisnadass, 2012) chapter 1, sutra 62
- Singh, Col. Harjeet, 2012. *The Military Strategy of The Arthasāstra*. New Delhi: Pentagon Press.

NEGARA HINDU: Dari Republik Desa Ke Negara Republik

I Gede Sutarya*

Pendahuluan

Demokrasi ternyata belum bisa menyelesaikan seluruh masalah politik umat manusia. Kecurangan dalam sistem demokrasi, hegemoni media massa, dan berbagai ketidakadilan sosial menjadi masalah demokrasi, padahal demokrasi diharapkan bisa membagi kekuasaan secara merata, tanpa hegemoni dan tirani. Fakta-fakta ini yang mendorong tumbuhnya penggalian terhadap nilai-nilai tradisional dalam politik sehingga mampu melengkapi demokrasi yang berlangsung.

Nilai-nilai dalam negara Hindu juga diperlukan sebagai alternatif pemikiran untuk menghadapi masalah ini, karena pada awal Indonesia merdeka, Soepomo dan Muhammad Yamin adalah tokoh-tokoh nasional yang menggali demokrasi tradisional Indonesia yang hidup di pedesaan. Pada masa-masa itu, demokrasi seperti *Negara di Minangkabau*, Sumatra sering menjadi contoh, termasuk di dalamnya demokrasi seperti pada desa pakraman di Bali. Demokrasi desa tersebut bersumber dari nilai-nilai Hindu.

Pada masyarakat Hindu, nilai-nilai tradisional tersebut hidup dalam masyarakat tradisional, melalui *grama* (desa tradisional Hindu) yang di Bali disebut dengan *krama*. Desa tradisional ini memiliki lembaga musyawarah untuk memilih pemimpin dan memutuskan masalah bersama. Tradisi ini efektif pada tingkat desa, tetapi pada konteks negara, hal ini sulit dilakukan, karena sulitnya bertemu secara langsung. Dalam

* Dosen pada Prodi Industri Perjalanan, Jurusan Pariwisata Budaya dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu, Pascasarjana IHDN Denpasar. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutarya@yahoo.com

konteks negara, Hindu masih terjebak dalam pola kerajaan yang totaliter dan bercorak feodal sehingga tidak bisa dikembangkan lagi dalam konteks kekinian yang egaliter. Oleh karena itu, masalah umat Hindu saat ini adalah menerapkan nilai-nilai tradisional pada *grama* tersebut dalam konteks negara.

Artikel ini mengulas tentang penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks negara, yang merupakan hasil studi pustaka tentang pemikiran politik Hindu. Studi pustaka ini dibandingkan dengan realitas pemerintahan desa di Bali dan India. Studi tentang pemerintahan-pemerintahan republik kuno juga dipelajari, dengan melihat realitasnya dalam pemerintahan desa yang menjadi miniatur negara. Pemerintahan desa adalah negara dalam konteks desa, yang dalam pemerintahan negara kuno sistem pemerintahan republik desa ini diterapkan secara lebih luas dalam konteks negara.

Pembahasan

Konsep republik disebut dengan *vairajya* dalam Aitareya Brahmana dan *gana* dalam Arthashastra. Megasthenes, utusan Yunani yang ke India pada 300 SM mencatat negara-negara republik seperti Maltecoroe, Singhoe, Moruni, Marohoe dan Rarungi. Republik ini berjalan sampai sekitar abad ke-4 Masehi, di mana wilayah seperti Punjab, Rajaputana dan Malwa diperintah dalam persemakmuran (Sarkar, 1920). Karena itu, konsep republik berjalan terus sampai kerajaan-kerajaan besar seperti Asoka dari Magadha menaklukan negara-negara republik tersebut.

Konsep republik ini berasal dari konsep Upanisad, yang memandang semua manusia adalah cahaya ketuhanan (atman), sehingga semua manusia memiliki potensi untuk mendapatkan pencerahan. Brihadaranyaka 6.5.7 menyatakan *Idam sarvam yadayamaatmaa* yang artinya semuanya adalah Atman (Radhakrishnan, 1994). Pernyataan Upanisad ini mendorong egalitarisme dalam era Maurya sekitar 200 SM di mana kaum Brahmana tidak hanya berasal dari keluarga tertentu, tetapi bisa berasal dari keluarga mana saja (Lubin, 2013).

Pandangan ini juga menyebar ke kalangan Hindu, seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa semua manusia bisa melakukan swadharmanya sesuai dengan bakatnya. Karena itu, Bhagavad Gita menolak sistem keturunan yang disebut dengan sistem kasta. Bhagavad Gita memperkenalkan konsep *varna* di mana kewajiban seseorang ditentukan oleh *guna* dan *karma* atau sifat dan bakat (Prabhupada, 2006). Konsep *varna* ini pun tidak terlepas dari kritik tentang dominasi dan hegemoni, sebab *varna-varna* tertentu seperti *brahmana* misalnya bisa melakukan hegemoni dalam pelaksanaan agama, tetapi hanya ini bisa dilaksanakan dalam konteks kritik terhadap hegemoni lama yang berdasarkan kasta (keturunan).

Berdasarkan catatan Megasthenes (Lubin, 2013: 32), *Brahmana* pada era Maurya digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu *Brakmane* dan *Sarmane*. *Brakmane* adalah *Brahmana* yang berdisiplin di ritual-ritual *Weda*, sedangkan *Sarmane* adalah *brahmana-brahmana* yang bertapa yang digolongkan sebagai *vanavasin*. Kelompok *Sarmane* (*Sramana*) ini yang membangun pembaharuan-pembaharuan pada masyarakat Hindu. Sebagian dari kelompok *Sramana* ini membangun agama-agama baru seperti *Buddha* dan *Jaina*, tetapi sebagian lagi tetap setia dalam *Veda* dengan melakukan berbagai pembaharuan.

Kelompok *Sramana* yang setia terhadap *Veda* membangun filsafat baru dalam Hindu yang disebut *Upanisad*. Kelompok ini yang membangun *Weda* terakhir atau yang disebut dengan *Wedanta*. *Bhagavad Gita* termasuk kelompok ini, yang memandang semua manusia adalah sama. *Brahmana*, *Ksatria*, *Vaisya* dan *Sudra* tidak dibangun berdasarkan keturunan, tetapi oleh bakat seseorang yang dikembangkan dalam masyarakat sesuai *Bhagavad Gita* IV.13 (Prabhupada, 2016). Pandangan ini yang memberikan inspirasi terhadap egaliterisme, walaupun banyak kritik yang juga tidak bisa diabaikan.

Filsafat egaliterisme ini yang menumbuhkan negara-negara republik kuno, tetapi negara-negara hanya bisa berupa negara-negara kecil yang tersebar di sekitar *Orrisa*. Negara-negara

ini kemudian dikalahkan Dinasti Maurya dari Magadha, karena republik hanya bisa dilaksanakan dalam skema negara-negara kecil. Walau pun negara-negara kecil ini kalah, tetapi ide-ide republik masih terus dikembangkan dalam bentuk republik desa, yang disebut dengan *grama*, yang kemudian di Bali menjadi *krama* (Sutarya, 2019: 68).

Grama telah disebutkan dalam Rig Veda X.107, di mana dalam mantra tersebut disebutkan pemimpin desa yang disebut *gramani* dipilih langsung oleh masyarakat desa (Ganguli, 1969:79). Taittiriya Samhita menyebutkan tiga pemimpin desa yaitu *gramani* (pemimpin yang dipilih), brahmana (kaum terpelajar) dan rajanya (prajurit). Ketiga pemimpin desa ini disebutkan juga dalam Arthashastra sebagai *gramasvami*, *gramika* atau *gramapati* (Ganguli, 1969: 80).

Penelitian pada desa kuno di India menunjukkan bahwa desa-desa kuno itu pada 600 Masehi memiliki majelis tertinggi. Majelis ini memiliki anggota 200, 420, 500 dan 1002, karena itu semua warga menjadi anggota majelis. Anggota majelis itu disebut dengan *mahajana* (Yerankar, 2004: 89). Mahajana ini rupanya yang disebut sebagai *gramani* dalam Rig Veda, yang dalam prasasti kuno di Bali disebut *kramani* (Wikarman, 2003). Hal ini menandakan kekuasaan tertinggi terdapat pada warga, yang di Bali disebut dengan *paruman desa* (Reuter, 2005; Stuart-Fox, 2010).

Mahajana ini membentuk dewan eksekutif yang disebut dengan *gramajanapada* dan di beberapa tempat di India disebut dengan *panchakula* (Yerankar, 2004: 90). Hal ini sama dengan di Bali yang membentuk *ulu apad* atau pimpinan desa (Reuter, 2005; Stuart-Fox, 2010). *Panchakula* yang di Bali disebut *ulu apad* ini yang memimpin desa dalam berbagai hal. Pada kasus India, desa-desa tersebut banyak melakukan tugas-tugas pengelolaan tanah warga desa dan pajak (Yerankar, 2004). Pada kasus Bali, tugas-tugasnya berkaitan dengan upacara pada suatu pura. Upacara ini berkait dengan kewajiban pemegang tanah, yang berkewajiban memelihara pura (Reuter, 2005; Stuart-Fox, 2010).

Pemerintahan republik desa ini telah berhasil di berbagai desa di Bali dan India, tetapi penerapannya dalam konteks negara mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan negara-negara republik cenderung kecil dan lemah karena tidak bisa dilakukan dalam skema negara besar dan tidak memiliki pemimpin yang kuat. Negara Republik Kalingga kuno gagal setelah mengalami serangan dari Asoka dari sekitar 200 SM, karena kecil dan tidak memiliki pemimpin yang kuat. Negara Kalingga di Jawa pada awal Masehi, mengalami kegagalan karena diserang kerajaan tetangga yang lebih kuat, karena itu republik Hindu ini hanya bisa diterapkan di desa (Sutarya, 2019). Menerapkannya dalam konteks negara masih menjadi tantangan, terutama dalam pembentukan sistem komunikasi dan kekuatan militer untuk melindungi negara republik tersebut.

Pada era modern, komunikasi sudah menggunakan teknologi yang semakin cepat dan terjangkau, sehingga aspirasi masyarakat bisa diketahui dengan cepat. Dalam konteks hubungan antar manusia sudah sampai pada pembentukan *global village*, di mana batas-batas wilayah, budaya dan ras sudah mulai melemah (Pamungkas, 2015). Karena itu, komunikasi menjadi melewati batas-batas wilayah, budaya dan ras. Hal ini yang menyebabkan manusia bisa melakukan komunikasi tanpa terhalang tempat, budaya dan ras.

Fenomena *global village* ini memudahkan berjalannya proses demokrasi, sebab jejak pendapat bisa dilakukan di mana dan kapan pun. Karena itu, konsep menempatkan kekuasaan tertinggi kepada publik atau dalam Hindu disebut *mahajana* menjadi bisa dilakukan. *Mahajana* atau *gramani* ini bisa membangun perwakilan yang akan membentuk dewan eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan. Konsep republik desa Hindu ini seperti konsep pemerintahan perlemitter.

Pemerintahan perlemitter adalah pemerintahan yang bertanggungjawab kepada perlemen atau legislatif (Lijphart, 2019). Perlemen itu adalah *gramani* (perwakilan masyarakat) yang membentuk dewan eksekutif yang menjalankan pemerintahan.

Dewan eksekutif ini disebut *panchakula* yang bertanggungjawab terhadap legislatif. Dalam konteks negara, tentu dewan eksekutif tidak hanya lima, tetapi bisa dikembangkan menjadi lebih luas.

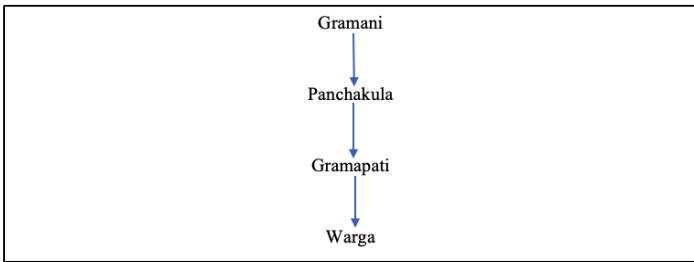
Pemerintahan desa di Bali mengembangkan *panchakula* ini menjadi *ulu apad* yang berjumlah 12, yang terdiri dari enam pimpinan dan enam wakil. Konsep 12 ini adalah pengembangan dari *panchakula*, di mana lima pimpinan ditambah satu kepala sehingga menjadi enam. Enam ini ditambahkan enam wakil sehingga berjumlah 12 orang (Suyana, 2019). Jika di Bali dikembangkan menjadi 12 maka dalam konteks negara pengembangan ini sangat dimungkinkan, menjadi dewan eksekutif yang membidangi berbagai kepentingan negara.

Pemerintahan India modern mengembangkan konsep ini, dengan membentuk parlemen yang membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen. Pemerintahan ini dipimpin perdana menteri. India juga membentuk kepala negara yang disebut presiden dan wakil presiden, tetapi pemerintahan dilakukan perdana menteri bersama kabinetnya, dengan presiden dan wakil presiden hanya menjadi kepala negara (Wikipedea, 2019). Sistem pemerintahan ini berangkat dari inspirasi pemerintahan desa, yang disebut *gramani*.

Konsep negara republik desa Hindu ini bisa diterapkan dalam konteks Indonesia sesuai UUD 1945 yang belum diamendemen. Pada UUD 1945 pasal 6 ayat 2 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam menjalankan kekuasaannya membentuk undang-undang harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga DPR ini seperti dewan eksekutif yang bekerja sehari-hari. Pola ini mirip dengan pola *gramani* yang membentuk *panchakula*, kemudian *panchakula* membentuk pemimpinnya yang menjadi kepala *grama*, atau disebut *gramapati* (pimpinan desa).

Penerapan pemerintahan republik seperti ini tentu bisa disesuaikan dengan bentuk negara yang terdiri dari negara federal dan kesatuan. Dalam negara federal bisa dibentuk perwakilan

negara bagian dan perwakilan rakyat. Dalam negara kesatuan, cukup hanya ada perwakilan rakyat dan perwakilan golongan. Perwakilan negara bagian dan perwakilan rakyat bersama memilih kepada negara, sedangkan perwakilan rakyat memilih kepala pemerintahan. Konsep pemerintahan di Indonesia sebenarnya seperti itu, di mana MPR sebagai perwakilan golongan dan rakyat memilih presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seharusnya dipilih perwakilan rakyat tetapi hal ini tidak disebutkan dalam UUD 1945 sehingga diamandemen ke presidensiil, padahal seharusnya diamendemen ke parlementer sehingga sesuai dengan konsep pemerintahan republik desa yang telah berlaku di desa-desa kuno di Indonesia.



Gambar 1: Pemerintahan Republik Desa
(Sumber: Ganguli, 1969; Shriram (2004))

Simpulan

Negara Hindu yang asli adalah negara republik, tetapi perkembangan kerajaan-kerajaan besar mematikan republik-republik Hindu. Karena itu, konsep republik hanya berlaku pada tingkat desa (*grama*), yang di Bali disebut *krama*. Pada pemerintahan desa, kekuasaan tertinggi dipegang warga, yang disebut *gramani*, di Bali disebut *kramani*. Gramani ini membentuk dewan eksekutif yang disebut *panchakula*, yang memilih satu pemimpin yang disebut *gramapati* (pemimpin desa). Di Bali berkembang menjadi ulu apad di mana *panchakula* itu menjadi enam orang. Hal itu berarti ada lima dewan eksekutif dan satu

kepala pemerintahan. Enam orang ini diisi wakil sehingga jumlah pimpinannya berjumlah 12 orang.

Pada konteks kekinian, republik desa ini bisa diterapkan dalam pemerintahan parlementer, yaitu pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu sesuai dengan UUD 1945, di mana presiden dan wakil presiden dipilih MPR tetapi kepala pemerintahannya dipilih DPR sehingga mencerminkan sebuah pemerintahan yang parlementer. Dalam konteks modern, negara seperti ini dapat diterapkan karena kontrol rakyat bisa dilakukan secara langsung dengan sistem komunikasi modern sekarang ini, melalui berbagai media yang ada termasuk media sosial. Dengan demikian konsep *gramani* atau *paruman desa* bisa diterapkan dalam konteks negara dengan menggunakan teknologi komunikasi.

Daftar Pustaka

- Ganguli, D.K. 1969. *The Village Headman in Ancient India. Proceeding of the Indian History*, 31, Halaman 79-84.
- Lijphart, Arend ed. (1992). *Parliamentary versus presidential government*. London: Oxford University Press.
- Pamungkas, Cahyo. 2015. Global Village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal Global & Strategis*, 9 (2).
- Prabhupada, Swami. 2006. *Bhagavad Gita Menurut Aslinya*. Indonesia: Bhakti Vedanta Books Trust.
- Radhakrishnan, S. 1994. *The Principal Upanisads*. New Delhi: HarperCollins Publishers.
- Reuter, Thomas. 2005. *Budaya dan Masyarakat di Pegunungan Bali*. Jakarta: Yayasan Obar.
- Sarkar, Benoi Kumar. 1920. *The Ganas or Republic in Ancient India*. https://en.wikisource.org/wiki/The_Ganas_or_Republics_of_Ancient_India.
- Stuart-Fox, David J. 2010. *Pura Besakih: Pura, Agama dan Masyarakat Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.

- Sutarya, I Gede. 2019. *Hindutoa: Inspirasi Hindu dalam Pembangunan Dunia*. Denpasar: Yayasan Wikarman.
- Suyana, I Wayan Erna. 2019. Ulu Apad: Tradisi Desa Adat Bali Mula di Era Modern. <http://kerta.desa.id/2017/12/14/ulu-apad-tradisi-adat-bali-mula-di-era-modernitas/>. Diakses 27 Mei 2019.
- Yeranker, Shriram. 2004. Village Administration in Ancient India. *The Indian Journal of Political Science*, 65 (1) Pages 89-99.
- Wikipedia. 2019. Government of India. https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_India. Diakses pada 27 Mei 2019.

MASYARAKAT HINDU DALAM POLITIK NKRI MENUJU MASYARAKAT SIPIL

I Nengah Duija*

“Sektarianisme dan ketidaktoleran serta serbuannya yang mengerikan juga fanatisme telah lama mewarnai bumi yang indah ini. Semua itu memenuhi bumi dengan kekerasan, dengan serbuan yang menumpahkan darah, yang menghancurkan peradaban dan membuat bangsa lain mengalami frustrasi... saya benar-benar berharap agar bel yang berdenting pagi ini, untuk menghormati pertemuan ini, akan mampu mengakhiri seluruh fanatisme dan mengikis habis berbagai penganiayaan, baik dengan pedang atau pena” (Vivekananda dalam Bagus, 1995)

Pendahuluan

Pada awal dua dasawarsa terakhir abad kedua puluh, kita menemukan diri kita berada dalam suatu krisis yang serius yaitu suatu krisis kompleks dan multidimensional yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Krisis ini merupakan krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral dan spiritual; yakni suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia (Capra, 1997: 3).

Dengan demikian berarti secara sosiologis masyarakat kita tengah mengalami transpormasi sosial yang telah menyentuh pada bagian dalam diri kehidupan umat manusia yakni spritualitas, moralitas dan intelektualitas. Kita menyadari bahwa perubahan adalah konsekuensi dari dinamika sebuah kehidupan masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan tidak pernah berada dalam keadaan statis, tetapi selalu berada dalam proses yang dinamis. Hal ini disebabkan oleh “dalam masyarakat selalu bekerja

* Dosen dan Guru Besar IHDN Denpasar, Rektor IHDN Denpasar 2013-2017. Penulis dapat dihubungi melalui email: nengahduija@yahoo.com

dua macam kekuatan” yaitu kekuatan yang ingin menerima perubahan (kaum progresif) dan kekuatan yang cenderung menolak perubahan (kaum konservatif). Dua kekuatan inilah yang merupakan dinamika sosial masyarakat yang selalu tarik-menarik (Kusumohamidjojo, 1999: 51).

Jika perubahan itu dipahami sebagai sebuah transformasi, maka dalam mencermati krisis budaya yang multi segi, kita perlu mengambil pandangan yang sangat luas dan memandang situasi kita dalam konteks evolusi budaya manusia. Kita harus merubah perspektif kita dari akhir abad kedua puluh ke suatu rentang waktu yang mencakup ribuan tahun; dari pengertian struktur sosial statis hingga persepsi pola-pola perubahan yang dinamis, dengan demikian krisis muncul adalah sebagai suatu aspek transformasi (*Op. cit*, 1997: 11).

Dalam perubahan masyarakat inilah terdapat masa-masa transisi, yang akan membawa masyarakat yang bersangkutan menuju dua arah yakni apakah menuju kemajuan ataukah sebaliknya sebuah kehancuran. Masa transisi ini juga melanda bangsa Indonesia pasca Soeharto yaitu transisi dari pemerintah otoriter birokratik ke arah Demokratisasi. Seperti kita pahami bahwa dalam sejarah berdirinya Republik ini, ternyata proses kesejatan kita untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikatakan masih “tambal-sulam”. Tidak adanya komitmen yang jelas dan tegas serta terlihat masih mencari-cari adanya kesamaan paham dan persepsi di dalam menjalankan perintah berbangsa dan bernegara. Ketidakadaan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan negara menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari apa yang kita sepakati bersama sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara seperti Pancasila dan UUD 1945 (Bagus, 1998: 2). Berdasarkan hal tersebut masyarakat Indonesia cenderung untuk dapat dipandang sebagai suatu “masyarakat besar yang belum selesai”, mungkin ini yang akhirnya memunculkan pernyataan Bekker yang dikutip juga oleh Ohmae “*Born between two worlds, the one dead, the other not yet alive*” artinya kita sedang berkelana diantara dua dunia: dunia yang satu

sudah mati, selagi dunia yang lain belum bahkan menghadapi resiko untuk tidak mampu lahir (Kusumohamidjojo, 2000: 3-5).

Wacana-wacana di atas, mencuat setelah era reformasi mulai digulirkan beberapa tahun yang lalu. Konsekuensi dari era reformasi itu ada dasarnya penggugatan terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gugatan-gugatan kedaerahan ini sebagai akibat dari keberhasilan Orde Baru dalam bidang ekonomi, perwujudan administrasi kenegaraan dan politik luar negeri, namun tidak dibarengi oleh keberhasilan dalam pembangunan kehidupan demokrasi (Hikam, 1996 : X). kematian Demokrasi" di masa Orba, berimplikasi pada ketidakmampuan anggota masyarakat untuk mengembangkan mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka sesuai dengan ciri khas etnis, agama, bahasa dan sebagainya. Padahal menurut Johan Lokc, manusia dilahirkan, sebagai mana telah dibuktikan dengan hak atas kebebasan sempurna dan hak untuk menikmati secara tak terbatas semua hak-hak dan privilese hukum kodrat, bersama-sama dengan setiap orang lain dengan kelompok orang mana saja di dunia ini dan pada hakekatnya mempunyai wewenang bukan untuk menyelamatkan harta benda, yaitu nyawanya, kebebasan dan harta miliknya terhadap kerugian dan usaha-usaha orang lain, tetapi juga mempunyai wewenang untuk menentukan dan menghukum pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap orang lain (Lubis, 1994: 76).

Masyarakat yang sentralistik yang segala aspek kehidupan, dimana terdapat Hirarki politik, ekonomi, idiologi tunggal yang tak mentoreril saingan dan pisi tunggal yang bukan saja yang mendefinisikan kebenaran, melainkan juga menentukan kebenaran perilaku individu, hal ini menyebabkan seluruh masyarakat mendekati kondisi tratomisasi dan kemudian perbedaan pendapat menjadi tanda pemberontakan (Gellner,1995: 1). Disinilah masyarakat tidak berdaya untuk mengimbangi kekuatan negara yang bersifat otoriter, padahal "pemberdayaan masyarakat" tertuang di dalam konsep *Civil Society*. Masalah pemberdayaan masyarakat dalam konteks *Civil Society* sangat

ditekankan karena dalam *Civil Society* wilayah kehidupan social yang terletak diantara “negara dan komonitas local” dimana terhimpun kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keberanekaragaman serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerinah (Alam, 1999: 1).

Meskipun diakui bahwa pendekatan negara dapat menjelaskan realitas politik Indonesia, tetapi disisi lain memiliki sejumlah kelemahan. pertama ia terlalu menekankan peranan negara seolah-olah sebagai aktor yang paling menentukan dalam kehidupan politik. Kedua cenderung mereduksi proses politik dengan melihatnya sebagai proses kelembagaan yang bersifat formal legalistic. Ketiga terkesan lebih melihat fenomena politik sebagai realitas pergulatan kepentingan di kalangan elit dalam upaya mempengaruhi merebut atau mempertahankan kekuasaan ditingkat negara. Keempat, karena ia lebih meletakkan perhatian pada artikulasi dan aktivitas kelembagaan negara maka aktivitas dinamika yang terjadi di lepel masyarakat, di luar negara sering kali amat diabaikan dengan demikian negara sangat mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat, maka dengan adanya *konsep civil society* dapat diartikan merupakan sebuah arus balik (Culla, 1999: 12).

Arus balik ini adalah bentuk reaksi positif untuk mengkritisi fenomena-fenomena yang secara tidak proporsional telah memarjinalkan, hak hidup masyarakat, hak budaya, hak bahasa, hak agama dan sebagainya. Sembari melakukan kritik tersebut, maka peran agama semakin penting. Orang kini semakin sadar bahwa peran serta tradisi dan ajaran agama makin penting bila proses modernisasi ingin berlanjut dan mengurangi kecenderungan eksploitatif dan destruktifnya. Agama dan pemimpin agama semakin diharuskan melibatkan diri dalam persoalan yang ditimbulkan oleh modernisasi, termasuk maraknya kekerasan dalam masyarakat (Hikam, 1999: 52). Politik global dipergantian millenium ditandai oleh dua peristiwa yang berjangkauan jauh. Peristiwa pertama adalah penyebaran ide-ide demokrasi untuk masyarakat dan kebudayaan yang berbeda

diseluruh dunia dan peristiwa kedua adalah penampakan kembali isu-isu etnik dan agama dalam urusan-urusan publik, apakah itu dengan nasionalisme Hindu di India, Islam, dan kewarganegaraan di Prancis, perang kebudayaan di Amerika Serikat atau gerakan-gerakan Islam di dunia Muslim, ini membuktikan bahwa perkiraan kaum modernis terkemuka perihal kematian agama dan etnisitas adalah sangat premature (Hafner, 2000: 15). Peran agama di era Globalisasi menjadi lebih kentara, manakala konsep teologis telah merambah realitas sosial yakni sampai pada tataran aksi (tindakan sosial). Di sini agama tidak hanya dipahami dalam kaitannya dengan perilaku individu terhadap sang maha pencipta, tetapi bagaimana konsep teologi tersebut mampu mengulangi persoalan-persoalan social kemanusiaan, membebaskan umat dari kemiskinan, ketakutan, kelaparan, narkoba, miras, kenakalan remaja, tauran remaja dan sebagainya (*liberation theology*). Jika agama telah mampu berperan dalam upaya pembebasan tersebut, maka agama akan dapat memperkuat masyarakat sipil sebagai persyaratan demokrasi yang damai. Untuk itu bagaimana agama Hindu dalam proses penguatan masyarakat sipil di tengah-tengah perubahan seperti yang terurai di atas?

Pembahasan

Sekitar Gagasan Civil Society

1. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Relevansi *civil society* akhir-akhir ini menjadi semakin dirasakan pentingnya mengingat semakin krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti diketahui krisis ekonomi dan politik sekarang ini yang tampaknya cenderung semakin memburuk, telah menempatkan Indonesia ke dalam situasi yang amat kritis dan rentan terhadap disintegrasi. Konflik kepentingan antar berbagai kelompok masyarakat semakin terbuka, kemampuan dan kredibilitas pemerintah sangat lemah untuk segera mencari jalan keluar dari kresis ini. Situasi menegaskan perlunya pemberdayaan *civil society* sebagai suatu upaya untuk mencegah ancaman-acaman disintegrasi itu menjadi realitas (Dwiyanto, 1999: 10).

Gagasan *civil society* yang diterjemahkan menjadi masyarakat madani sesungguhnya baru belakangan populer sekitar awal tahun 90-an di Indonesia, dan karena itu barangkali juga masih berbau “asing” bagi sebagian masyarakat kita. Konsep ini pada awalnya sebenarnya mulai berkembang di Barat, memiliki akar sejarah awal dalam peradaban masyarakat Barat, dan terakhir setelah sekian lama seolah-olah terlupakan dalam perdebatan wacana ilmu social modern, kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga awal 90-an. Selanjutnya, wacana ini oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia ikut dikaji, dikembangkan dan dieliminasi, sebagaimana realitas empiris yang dihadapi (Culla, 1999: 3). Konsep *civil society* baru menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat sekitar pertengahan tahun 1990, ketika pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara sedang maju dengan pesatnya. Perbincangan itu tumbuh ke permukaan antara lain, karena negara-negara yang sedang mengalami kemajuan ekonomi itu, relatif tidak tercipta peluang yang berarti bagi tumbuhnya peranan publik dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktek kehidupan, cengkraman negara begitu kuatnya mewarnai dinamika kehidupan publik (Sairin, 1999: 88).

Pada mulanya masyarakat sipil (*civil society*) adalah diskursus pemikiran krisis radikal sebagai media untuk menjelaskan dan dipahami dalam konotasi sebagai gerakan rakyat untuk melakukan resistensi terhadap negara yang pada konteks zamannya, negara dianalisis justru menjadi alat kapitalisme. Sejak itu *civil society* selalu merupakan diskursus pemikiran kritis terhadap Kapitalisme. Namun sejak tahun 90-an terjadi pergeseran diskursus terhadap masyarakat sipil, meskipun masih memiliki dimensi sebagai bangkitnya resistensi masyarakat terhadap negara dalam rangka demokratisasi, namun dimensi krtitik terhadap kapitalisme tidak kelihatan lagi. Pada saat bersamaan muncul juga gerakan resistensi masyarakat sipil yakni masyarakat adat untuk menuntut hak-hak mereka terhadap sumber alami dan hak

berbudaya yang jika dikaji lebih dalam justru datang dari paham pluralistik budaya yang berakar pada pemikiran posmodernisme (Fakih, 1999: 3-4). Memang kalau dilacak dari akar sejarah gagasan masyarakat madani telah berkembang jaman Yunani Kuno, kemudian berpengaruh pada tradisi pemikiran Romawi Kuno, abad pertengahan sampai pada pemikiran ilmu social kritis abad ke 19 seperti yang dikemukakan oleh Gramsci dengan konsep hegemoninya (baca Culla, 1999: 46-50). Masyarakat madani adalah istilah ungkapan yang dilontarkan oleh Dato Anwar Ibrahim pada sebuah Simposium Nasional Dalam rangka Forum Ilmiah Festival Istiqlal tahun 1995 (Gellner, 1995: 6). Konsep inilah yang dikembangkan oleh Emil Salim dan Nucrolish Majid sebagai diskursus pemberdayaan masyarakat di Indonesia sekitar tahun 90an.

Civil society adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai institusi non pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi negara, meskipun tidak menghalangi negara dari pemenuhan perannya sebagai penjaga perdamaian dan sebagai wasit dari berbagai kepentingan besar, namun tetap dapat menghalangi negara mendominasi dan mengatomisasi masyarakat (Gellner, 1995: 6). *Civil society* adalah arena tempat beradanya gerakan-gerakan social (seperti persatuan atas dasar kekerabatan, perhimpunan wanita, kelompok-kelompok agama, dan organisasi cendekiawan) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dari berbagai golongan dan profesi (seperti perhimpunan Sarjana Hukum, Persatuan wartawan, serikat buruh, asosiasi pengusaha dan sebagainya) yang mencoba membentuk diri mereka dalam suatu keteraturan supaya mereka dapat menyatakan dirinya dan menyalurkan kepentingan-kepentingan (Sagian, 1995: 126).

Civil society dapat pula didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma hukum yang diakui oleh warganya (Hikam, 1996: 3). Di Indonesia masyarakat

sipil tampak pada grup-grup sosial yang kegiatannya dimaksudkan untuk mencegah negara menguasai masyarakat. Lepas dari keberhasilan atau kegagalan aktivitas tersebut, grup-grup ini biasanya menciptakan sipil yang kuat kalau aktivitas mereka terorganisir sendiri dan memperlihatkan lingkup kepentingan yang luas. Untuk melihat aktifitas tersebut menurut tujuan, cara, ukuran dan batasannya, aktifitas sosial yang membentuk masyarakat sipil dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 1) ketahanan simbolik artinya ketahanan meliputi berbagai tindakan tak langsung melawan pemerintah yang otoritarian, 2) Ketahanan praktis atau langsung adalah aktifitas yang menyuarakan kepentingan social dan tuntutan berbagai tantangan langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu, 3) Ketahanan praktis simbolis suatu kombinasi dari butir 1 dan 2 (Hadiwinata, 1999: 11-14).

2. *Civil Society* dalam Masyarakat Multikultural

Struktur masyarakat Indonesia secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat-istiadat dan perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertical ditandai dengan adanya pelapisan social yakni lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1995: 28). Oleh karena itu masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar bersifat majemuk dan jamak, tetapi juga sungguh rumit serumit jalinan suatu labirin. Dalam hubungan dengan masyarakat yang sedemikian kompleks, sering ada godaan untuk memperkuat posisi negara (sebagaimana yang biasanya diwakili oleh pemerintah) untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan sentripetal dan menjaga kohesi masyarakat (Kusumohamidjojo, 2000: 149).

Untuk itu pengembangan masyarakat madani dalam kondisi masyarakat yang multietnis, multikultural, multiagama dan sebagainya memerlukan kerja keras untuk sampai pada penerapan konsep *civil society* itu. Tantangan sosial budaya yang cukup berat adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas itu

tidak hanya berkaitan dengan budaya (*multicultural*), tetapi juga dimensi social, politik dan ekonomi masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka selama 53 tahun, pluralitas masyarakat itu kurang dimanfaatkan sebagai potensi yang dapat didinamiskan untuk memacu pembangunan, namun justru kebijakan politik pembangunan selama ini adalah keanekaragaman diarahkan pada bentuk uniformitas (Sairin, 1999: 93). Untuk tumbuhnya *civil society* sudah semestinya diberikan kebebasan kepada seluruh anggota masyarakat untuk turut serta menyumbangkan atau mengekspresikan apa yang menjadi ide-ide atau gagasannya sesuai dengan konsep multikulturalisme (Qodir, 1999: 160). Sesungguhnya tanpa keanekaragaman, demokrasi nyaris sama dengan dictator massa (Craig, 1999: 127).

Seperti pandangan modernis sekuler peramalan akan kematian etnis dan agama dalam konteks masyarakat sipil, ternyata meleset, namun sebaliknya gerakan-gerakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat lebih banyak bercorak keagamaan. Hal ini disebabkan oleh agama-agama diminta agar semakin mempublik yaitu perduli terhadap persoalan-persoalan dasar seperti kemiskinan, kebodohan dan kekerasan yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat tanpa memandang asal-usul. Dalam rangka untuk mempublik itulah agama-agama tidak bisa lain kecuali terlibat sepenuhnya dalam wacana tentang HAM, demokratisasi, perlindungan lingkungan, masalah gender dan sebagainya (Hikam, 1999: 52). Organisasi keagamaan di Indonesia, ketika berinteraksi, berusaha untuk menengok kepada doktrin-doktrin mereka sendiri, karena mereka ingin memberikan konteks budaya dalam kegiatan-kegiatan mereka. Karena itulah karena pada masa-masa akhir orde baru, nampak sekali kegiatan wacana intelektual yang bersifat teologis (Rahardjo, 1999: XXI).

Membangun moralitas politik dalam konteks negara seperti Indonesia dibutuhkan sumbangan dari sisi keagamaan. Model-model ketatanegaraan sudah banyak di gagas selama ini. Sementara itu tidak bisa disangkal bahwa banyak bangunan dasar masyarakat Indonesia masih bertumpu pada agama dan nilai-nilai

kehidupan agama. Tetapi agaknya selama ini agama-agama di Indonesia masih belum banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran moral dalam politik, gejala yang nampak lebih banyak adalah agama-agama mengelompok dalam berbagai partai politik yang eksklusif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam bidang moral masih banyak dikuasai oleh moral para penguasa politik, dan agama hanya sekedar memberi legitimasi saja terhadap kiprah elit pemerintah (Sumartana, 1999: 285).

3. Agama Hindu Menuju Konsep *Civil Society*

Agama Hindu yang memisahkan realitas politik dengan realitas agama, sebagai salah satu faktor lambannya umat Hindu dalam menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dalam dimensi social kemasyarakatan. Padahal agama Hindu memiliki banyak refrensi yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan politik sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu konsep seperti itu adalah konsep Niti yang dapat diartikan tata cara memimpin yang benar atau tepat, politik, kebijaksanaan politik, kebijaksanaan duniawi (Zoetmulder, 1982: 1199). Dengan demikian pada prinsipnya Hindu mempunyai konsep politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya konsep Dharma negara juga merupakan pengejawantahan dari konsep kehidupan umat Hindu dalam hubungannya dengan negara. Artinya dalam politik keagamaan dalam suatu negara perlu diperhatikan Vivekananda: "Jika ada orang yang berharap behawa kerukunan suatu agama bias tercapai melalui kemenangan dari suatu ajaran agama dan penghancuran agama lainnya, maka kepadanya saya ingin berkata, Saudaraku, itu hanyalah impian" (adlam Bagus, 1995: 74). Ini perlu disikapi oleh karena gejala yang muncul akhir-akhir ini dalam kancah politik nasional kita adalah "penonjolan" aspek teologis dalam mencapai sebuah kemenangan mayoritas.

Hindu dalam wacana demokratisasi telah mengembangkkn konsep *tat twan asi* (universalisme humanis), seungguhnya telah dikumandangkan oleh Vivekananda

sebagaimana kutipan di depan bahwa cara berpikir sektarian dalam konsep negara dengan multiagama merupakan hal yang sangat tidak pantas. Setiap agama harus bias menghimpun berbagai semangat dan memelihara kepribadiannya dan tumbuh sesuai dengan hukum pertumbuhan (Vivekananda dalam Bagus, 1995: 75). Dari konsep inilah sesungguhnya lahir teologi pembebasan, karena menganggap semua manusia di muka bumi ini adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri, seperti di Amerika Latin muncul pemimpin dengan label teologi pembebasan (*liberation theology*) untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalis, Swami Agniwesh yang telah melakukan kegiatan kemanusiaan yaitu menanggulangi anak-anak korban narkoba dan di Indonesia muncul organisasi Islam Muhammadiyah yang mampu mengubah masyarakat desa yang dahulunya merupakan sarang pencuri, pembunuh menjadi orang yang saleh sesuai dengan konsep agama Islam (Bagus, 2001: 19).

Agama Hindu dalam hubungannya dengan negara sesungguhnya tersirat dengan adanya konsep dharma negara dan Guru Wisesa. Dharma negara adalah konsep hubungan umat Hindu sebagai komponen bangsa, memiliki kewajiban dan hak dalam negara RI ini. Namun persoalannya perlu penjabaran lebih lanjut terhadap konsep ini yang menyangkut hubungan yang seperti apa, bagaimana posisi umat Hindu dalam Politik Negera, bagaimana sikap umat Hindu dalam memandang negara dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan segera muncul. Yang tidak kalah pentingnya adalah penafsiran *guru wisesa*, apakah yang dimaksud adalah tunduk terhadap pemerintah atau negara. Untuk sebuah konsep tentu masih perlu dijabarkan sehingga umat Hindu menganggap wajib menghormati pemerintah, meskipun pemerintah itu korup. Menerima secara pasrah saja suatu system yang tidak adil berarti bekerja sama dengan sistem itu, dengan demikian kaum yang tertindas sama jahatnya dengan si penindas. Menolak bekerja sama dengan si jahat merupakan kewajiban moral seperti halnya bekerja sama dengan yang baik merupakan kewajiban moral juga (King, 1994: 219).

Umat Hindu sesungguhnya mempunyai konsep ke arah masyarakat sipil sebagaimana di katakana oleh Gandhi *civil disobedience* tak akan membawa suatu masyarakat ke-adaaan anarkis atau ketidakadilan. Konsep *civil disobedience* adalah hak umat Hindu untuk melakukan pengingkaran terhadap kebijaksanaan pemerintah, jika pemerintah membuat kebijaksanaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan sebagainya. *Civil disobedience* adalah hak tiap warga negara, ia tidak dapat dihapuskan jika kita hendak mempertahankan kehormatan manusia. Namun pengingkaran itu bersifat "civil" dan beradab, ia harus senantiasa jujur, sopan, berdisiplin dan bertahan, ia tidak boleh bersifat kekerasan dan tidak boleh mengandung kebencian (Sarma, 1952: 174).

Mengacu pada konsep di atas, maka muncul pertanyaan, apakah Hindu mampu mengembangkan *civil disobedience* sebagai bentuk mulai munculnya masyarakat sipil itu sendiri. Jawabnya tentu mampu asalkan ada muncul LSM-LSM Hindu, organisasi Hindu, termasuk Parisada, kaum intelektual muda Hindu, yang tidak saja memperjuangkan kualitas umat dalam hubungannya dengan spritualitas, namun juga mampu memperjuangkan hak-hak umat Hindu dari berbagai tekanan atas dominasi atau hegemoni penguasa atau negara. Kelompok-kelompok inilah yang senantiasa mengkritisi kebijakan pemerintah yang dapat memarjinalkan hak hidup, hak budaya, hak agama, hak bahasa dan sebagainya. Kelompok-kelompok inilah yang harus memberdayakan masyarakat baik tataran teologis melalui pendalaman Dharma, sraddha dan lain-lainnya. Maupun tataran aksi dengan konsep teologi pembebasan yakni kepedulian terhadap masalah sosial, politik, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Jika anda seorang demokrat sejati, anda mungkin mempunyai perbedaan tetapi anda akan berusaha menyesuaikan, anda akan berusaha untuk mengatasinya dengan kesepakatan bersama. Anda tidak akan pernah mampu mengatakan bahwa ada sebuah perbedaan dan sebuah perbedaan akan selalu membawa pada perselisihan dan perselisihan selalu

bermakna kekerasan. Ini adalah bukan tipe kehidupan yang anda harus ambil (Radhakrishnan, 2000: 86). Apa yang dikatakan oleh Radhakrishnan pada hakekatnya pondasi filosofis kehidupan demokrasi tanpa kekerasan atau *civil disobedience* yang merupakan bentuk resistensi umat terhadap politik NKRI. Perjuangan Hindu sesungguhnya masih panjang untuk bias mencapai akses penting yang mampu membawa kearah eksistensi Hindu dalam Negara RI ini. Pergulatan konsep *tujuh Kata* dalam UUD 1945 oleh Islam Radikal, belum selesai tetapi di tingkat Undang-undang masuk konsep syariat, dalam perda masuk di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu pertanyaannya apakah kita menerima apa yang terjadi seperti itu, atau melakukan gerakan, untuk itu mari kita bangun solidaritas intelektual Hindu untuk senantiasa menyikapi dan berperan serta dalam politik untuk ikut menentukan arah perjalanan Hindu ke depan.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan pembangunan masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society* merupakan reaksi kritis terhadap terlalu kuatnya dominasi negara dalam menentukan berbagai aspek kehidupan warga negara (rakyat). Wacana ini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar memiliki daya resistensi terhadap hegomonik negara. Meskipun secara konsep *civil society* telah berakar kuat dalam pemikiran ilmu social dunia Barat, namun perkembangannya di Indonesia boleh dikatakan baru tingkat wacana pada decade 1990an dan tiga tahun terakhir ini wacana ini sedikit tidaknya telah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dalam saluran reformasi.

Agama Hindu sebagai komponen masyarakat, juga tidak luput dari pemikiran reformasi tersebut. Oleh karena itu Hindu harus mampu berp[er]an serta dalam mengkritisis kebijakan pemerintah yang menyimpang dari kaidah hukum, keadilan, kemnusiaan, sebagai bentuk kewajiban moral dalam konsep guru wisesa dan dharma negara menuju masyarakat sipil di Indonesia.

Fenomena saat ini sungguh menggembirakan karena telah munculnya LSM-LSM yang bernafaskan agama Hindu, organisasi Hindu namun kita belum mengetahui visi dan misinya, apakah merupakan hanya memperjuangkan kualitas umat dalam hubungannya dengan tuhan saja atau memiliki misi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dari segi sekulernya (kemanusiaan dan sosial, HAM), bahkan meminjam istilah Gramsci menjadi *intellectual organic* yang militan dan mengkritisi setiap gejala yang dapat memarjinalkan hak-hak hidup warga masyarakat.

Agama Hindu akan mampu menuju terbentuknya masyarakat sipil, jika tumbuhnya kelompok-kelompok seperti diatas, yang mandiri, sukarela, tidak berafiliasi pada kekuasaan, tidak terkooptasi oleh penguasa/negara, tetapi justru merupakan kekuatan yang mampu mengimbangi dominasi atau hegomonik negara dalam menentukan segala aspek kehidupan umat manusia. Kaum agamawan Hindu harus berani mengatakan “ya, jika itu benar dan “tidak jika itu salah” yang berdasarkan pada standar kebenaran dan moralitas agama Hindu dan kemudian mampu menarik umatnya menuju standar kebenaran dan moralitas agama Hindu dan kemudian mampu menarik umatnya menuju standar nilai tersebut.

Daftar Pustaka

- Alam, Bachtiar, 1999. “Civil Society dan Wacana Kebudayaan” dalam *Kompas*, Hari Selasa, Tanggal 1 Juni.
- Andrain, Charles F, 1992. *Kehidupan Politik Dan Perubahan Sosial*. Penerjemah Luqman Hakim. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1995 (Penyunting). *Beberapa Permasalahan Sosial dalam perspektif Hindu Dharma. Pidato Swami Vivekananda pada Sidang Parlemen Agama-agama di Chicago*. Denpasar: Upada Sastra

- _____, 1998. "Menggugat Nasionalisme Indonesia: Antara Jepitan Kaum Separatis, Federal dan Loyalitas". *Makalah Seminar*. Denpasar Universitas Udayana.
- _____, 2001. "Menuju Parisadha Yang Melayani Umat". *Makalah* pada Seminar Nasional Menyongsong Mahasabha VIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia. Denpasar.
- Capra, Fritjof, 1997. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Penerjemah M. Thoyibi. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Craig, Chalhoun, 1999. "Nasionalisme dan *Civil Society*: Demokrasi, Keanekaragaman dan Penentuan Nasib Sendiri" dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* Volume 1, Edisi I Yogyakarta: INSIST.
- Culla, Adi Suryadi, 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus, 1999. "Membangun Masyarakat Madani : Tinjauan Birokratik-Politik" dalam *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium k -3. Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Malang* (ed). Yogyakarta: Aditya Media.
- Fakih, Mansour, 1999. "Masyarakat Sipil; Catatan Pembuka" dalam *Wacana Jurnal Ilmu Social Transformatif*, Volume 1 Edisi 1. Yogyakarta: INSIST.
- Gellner, Ernest, 1995. *Membangun Masyarakat Sipil*. Bandung: Mizan.
- Hadiwinata, Bob. S, 1999. "Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah Kelangsungan dan Trasformasinya" dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*. Volume 1, edisi 1. Yogyakarta: INSIST.
- Hafner, Robert W, 1999. *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Penerjemah Ahmad Baso. Jakarta: ISAI
- Hikam, Muhammad AS, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta : LPBES.

-
- _____, 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- King, Luther Martin Jr, 1994 "Langkah Menuju Kebebasan" dalam *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2000. *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Lengenberg, Michael Van, 1990. "The New Order State: Language, Ideology, Hegominy" dalam Arif Budiman (ed) *State and civil society in Indonesia*. Center of Southeast Asian Studies: Monash University.
- Lockce, John, 1994. "Traktat Kedua Mengenai Pemerintahan Sipil" dalam *Demokrasi Klasik dan Modern*. Mochtar Lubis (penyunting). Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasikun, 1995. *Sistem Social Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qodir, Zuly, 1999. *Prasyarat Budaya Civil Society Dalam Opini Masyarakat—Dari Krisis Ke Reformasi. Masyarakat Versus Negara Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: Harian Kompas.
- Radhakrishnan, S, 2000. *Pencarian Kebenaran*. Penerjemah Tri Budhi Sastrio. Yogyakarta: Forum Penyadaran Dharma bekerjasama dengan duta wacana University press.
- Rahardjo, Dawam M, 1999. "Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society" Kata Pengantar dalam *Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society*. Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (penyunting). Jakarta: LSAF.
- Sairin, Sjafrin, 1999. "Masyarakat Madani dan Tantangan Budaya" dalam *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3 : Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Malang* (ed). Yogyakarta: Aditya Media.
- Sarma, D.S, 1952. *Gandhi Sutra*. Terjemahan Soejono. Jakarta: Yayasan Pembangunan Jakarta.

- Setiawan, Bonnie, 1996. "Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat Sipil" dalam *Prisma Majalah*
- Siagian, Fasial, 1995. "Meretas Kepemimpinan yang Demokratis dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia Suatu Perspektif Dari Hubungan Negara dan Masyarakat" dalam *Analisis CSIS*. Tahun XXIV No. 2 Maret-April.
- Sumartana, 1999 "Posisi Kaum Agamawan Dalam Agenda Pemberdayaan Masyarakat Madani" dalam *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Millennium Ke 3*. Penyunting Taufik Abdullah, dkk. Yogyakarta: Aditya Media.
- Zoetmulder, PJ, 1982. *Old Javanese—English Dictionary* I dan II. Koninklijk Institut Vor Taal-Land En Volkenkunde. Gravenhage Martinus Nijhoff.

MORAL POLITIK DAN MEROSOTNYA KUALITAS PERADABAN MANUSIA

Ni Kadek Surpi*

Pendahuluan

Dua tokoh yang berasal dari jaman dan peradaban yang berbeda menyuarakan hal yang nyaris sama, yakni moral politik. Kauṭilya atau Cāṇakya yang berasal dari peradaban India dan Machiavelli yang lahir dari peradaban Barat walau mulai dari landasan yang berbeda, namun sejumlah pemikirannya memiliki benang merah. Hal ini mengindikasikan, politik dan kesejahteraan negara mendapat perhatian sejak jaman lampau hingga masa sekarang ini.

Peradaban Veda kental dengan doktrin *prithivi bhakti*. Artinya *Bhakti* hormat, penuh pengabdian secara murni dan tulus ikhlas, kepada *prithivi* (tumpah darah atau bumi tempat lahir, hidup dan mati). Konsep *prithivi bhakti* ini merupakan konsep teologi patriotik (konsep ini sangat kental dianut sejak zaman dahulu dalam Hindu) di dalamnya terkandung tugas dan kewajiban sebagai warga negara, pola membangun negara yang kuat, ideologi dan politik serta semangat dalam membangun negara. Politik dan ilmu tata negara yang merupakan bagian dari konsep ini diarahkan untuk kesejahteraan bangsa dan bhakti kepada *prithivi*-Tanah Air yang merupakan bagian dari pengabdian hidup dalam tatanan Veda. Konsep ini mencerminkan bahwa politik selain tujuannya yang mulia, harus kental dengan moral dan kebajikan sebagai dedikasi manusia mulia-para *Āryā* di India. Pustaka Suci Veda telah menyatakan bahwa kemerosotan moral politik suatu bangsa akan membuat merosotnya peradaban dan kualitas moral manusia secara umum.

Pembahasan

* Dosen pada Fakultas Brahma Widya, IHDN Denpasar. Penulis dapat dihubungi melalui: dosen.surpiaryadharm@gmail.com

Moral Politik dan Pengaruhnya bagi Kualitas Peradaban Manusia

1. Ilmu Politik dan Dharma Negara dalam Teks Hindu

Ajaran tentang Dharma Negara dalam Hindu mencakup aspek yang sangat luas, seperti kepemimpinan dan politik, pemerintahan, warge negara, angkatan bersenjata, keamanan, medan tempur hingga penghasilan dan pengadilan. Narasi Dharma Agama terdapat dalam Catur Veda (Ṛgveda, Samaveda, Yajurveda dan Atharvaveda) dan teks-teks penting dalam Hindu seperti Rāmāyana, Mahābhārata, Arthaśāstra hingga berbagai pustaka yang ditemukan di Asia Tenggara.

Selain itu, sebagai sebuah bangunan ilmu, Peradaban Hindu memiliki konsep teologi yang selama ini belum banyak dipaham baik di Timur maupun di Barat yakni Teologi *Motherland* atau Teologi Cinta Tanah Air (Ibu Perthiwi), yang bersumber dari Atharvaveda XII.1.2, Atharvaveda IX.10.12, Yajurveda XXV.17, Yajurveda IV.22 dan Atharvaveda XII.1.1. Teologi ini dapat diuraikan dari Kitab *śruti* dan *Smṛti* dan buku-buku yang membahas tentang Teologi Hindu. Konsep Teologi *Motherland* secara jelas dapat ditemui dalam Rāmāyana Yudha Kanda yakni :

*api svarṇamayī laṅkā na me lakṣmaṇa rocate |
jananī janmabhūmiśca svargādapi garīyasi ||*

*Even Lanka, decked with all it's gold doesn't endear itself to me;
Mother and Motherland are greater even than heaven.*

Sri Rama mengajarkan bahwa tanah air sesungguhnya lebih tinggi dari Sorga sehingga setiap Putra dari Ibu Pertiwi wajib mendedikasikan dirinya bagi negerinya. Konsep ini sangat penting dan sangat tegas menyatakan tanah air (Ibu Pertiwi/*Motherland*) yang nilainya lebih tinggi dari Sorga. Konsep ini juga membangun Teologi Patriotik sebagai Dharma Negara. Ajaran *Prthivi Bhakti* dalam *Mahābhārata* sangat menarik, yakni terdiri atas dasar-dasar mencintai tanah air, ilmu pemerintahan, keahlian setiap putra *Prithivi* yang diperlukan untuk membela *dharma* hingga sampai

pada aturan perang dan perdamaian. Perang besar atau Mahābhārata yang terjadi 5000 tahun yang lalu mencerminkan bagaimana seorang *Putra Prithivi* harus berdiri mengorbankan kehidupannya demi negara. Dalam Mahābhārata juga ditegaskan bahwa Hindu tidak mengejar perang atas agama, melainkan atas kebenaran melawan kebatilan, atas ketulusan dan kesungguhan melawan nafsu kekuasaan.

Ajaran Dharma Agama, *Prithivi Bhakti* dalam konsepnya yang lebih spesifik sebagai sebuah ilmu politik dan tata negara diuraikan oleh seorang *Rṣi* yang dianggap ahli politik India yakni Kautilya, Cāṇakya atau Viṣṇugupta yang menulis *Arthaśāstra* sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Risalah yang sangat komprehensif ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah serta fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada administrasi dalam negeri sekaligus hubungan luar negeri sebuah negara. Kompendium ini memberikan pendidikan kepada penguasa negara tentang cara untuk mencapai tujuan nasional negara seperti perluasan pengaruh dari kerajaannya. Kompendium ini tidak hanya luas, namun juga terperinci. Bagaikan sebuah panduan praktis yang tak terlalu mengikat dan baku untuk dapat menghadapi kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dari sebuah negara (Avalokitesvari, 2019: 41). Sil (1985: 102) menyatakan *Arthaśāstra* artinya *śāstra (science) of artha (wealth or territory with human population)*. Namun demikian dinyatakan *Arthaśāstra* bukan hanya “*the science of wealth*” tetapi juga “*political science*” atau “*the science of government*”. Cāṇakya secara khusus juga menulis tentang pemimpin, moral politik dalam *rājanītiśāstra* atau *rājanītisamuccaya*.

Arthaśāstra disusun oleh Cāṇakya berdasarkan sejumlah buku politik Hindu kuno, tradisi politik, dan pengalaman hidupnya. *Arthaśāstra* karya Cāṇakya terdiri dari 32 bagian, 15 adikarana (buku) dengan 150 bab, 180 *Prakarana* (bagian yang ditujukan untuk topik tertentu) dan 6000 sloka. *Adhikarana* (buku) pertama membahas mengenai Raja, pelatihan yang harus dilewati oleh Raja, prosedur pengangkatan menteri serta pejabat negara,

keamanan dan juga keselamatan negara. Pada *adhikarana* ketujuh Cāṇakya menjabarkan mengenai teori *mandala*, lingkaran negara (*Raj Mandala Theory/the circle of state theory*) dan juga teori enam kebijakan luar negeri (*Ṣāḍḡuṇya/Six fold Foreign Policy*) yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Teori-teori ini digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan, yakni memastikan kesejahteraan negara (Rangarajan: 10). *Adhikarana* selanjutnya membahas secara detail mengenai berbagai topik sebagai pengetahuan dalam membangun negara yang kuat, pertempuran maupun cara-cara rahasia untuk menaklukkan musuh. Dalam *Arthaśāstra*, Cāṇakya menguraikan dengan dengan cukup detail mengenai cara dan metode untuk membangun sebuah negara dan melestarikan kekuatannya dalam lingkungan yang kompetitif secara strategis dan dalam kekuasaan adversarial dengan bahaya *inheren* dari subversi politik serta ketidakstabilan sosial (Avalokitesvari, 2019: 43).

Konsep Dharma Negara, patriotik yang dinyatakan oleh banyak naskah seperti Rāmāyana, Mahābhārata, Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa, Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi Nusantara, Naskah Tanjung Tanah (naskah Hindu tertua di Asia Tenggara) menguraikan tentang jalan *kṣatriya* dan mempersembahkan hidupnya bagi ibu pertiwi sebagai persembahan tertinggi. Pengorbanan ini dianggap sebagai jalan terhormat dalam konsep teologi patriotik yang menjadi pondasi politik dan tata negara serta membangun kesejahteraan negara dalam Hindu.

2. Cāṇakya dan Machiavelli Memandang Moral Politik

Peradaban Veda telah melahirkan seorang pemikir politik Kautīlya atau Cāṇakya, sebagai penulis merupakan seorang perdana menteri sekaligus penasihat politik utama Raja Chandragupta dan anaknya, Bindusara di Kerajaan Maurya. Naskah diperkirakan disusun sekitar 300 SM (c. 321-298 B.C.E) politik (Chati, Avalokitesvari dan Surpi, 2018:221). Sil (1985:102) berdasarkan *Daśakumāracarita* tulisan Agashe (1965), *The*

Mundrarākshasa of visākhadatta (Kale, 1965) dan *The Viṣṇu Purānā* (Wilson, 1961) menyatakan Kauṭilya atau Cāṇakya hidup pada c.350-275 B.C. Menurut tradisi yang dipahami hingga sekitar lima abad setelah kematiannya, dia adalah seorang *Brāhmin* terpelajar dari India Timur yang melayani raja-raja Nanda di Magadha tetapi kemudian meninggalkannya untuk bekerja para pemerintahan Raja Candragupta Maurya, pendiri Maurya dinasti-dinasti kekaisaran India pertama setelah invasi Alexander Agung (326-325 SM). Dia kemudian mengundurkan diri dari pelayanannya dalam pemerintahan Candragupta. *Arthaśāstra* mungkin disusun dalam masa pensiun ini.

Sementara itu, pada jaman berikutnya pada peradaban yang jauh, kancah filsafat politik, renaisans melahirkan pemikir besar yakni Niccolo Machiavelli (1467-1527) yang pemikirannya seolah menjadi konsep politik dan negara pada jamannya dan masa berikutnya. Russell (2016: 662) menyatakan filsafat politiknya bersifat ilmiah dan empiris, yang didasarkan pada pengalaman kehidupannya sendiri, dan berbicara tentang cara untuk meraih tujuan, terlepas apakah tujuan itu baik atau buruk. Machiavelli menulis sejumlah buku yang selanjutnya diulas oleh sejumlah filsuf.

Kedua pemikir politik ini Cāṇakya dan Machiavelli sesungguhnya tidak pantas untuk dibandingkan dengan beberapa alasan, yakni *pertama*, kedua pemikir ini hidup pada jaman yang berbeda pada peradaban yang berbeda. *Kedua*, landasan berpikirnya tidak sama. Machiavelli menggunakan daya pikir dan pengalaman empirisnya semata dalam menyusun pemikiran politik, sementara Cāṇakya menulis menggunakan referensi yang sudah ditulis oleh para *Rṣi* jaman dahulu dan pengetahuan yang sudah tersebar pada sejumlah dinasti politik. *Ketiga*, Cāṇakya mendasarkan tulisannya dengan mengakar kuat pada agama dan *śāstra* bahkan mendedikasikan tulisannya tidak saja bagi pengetahuan dan peradaban tetapi kepada pencipta, sementara Machiavelli kadang mengutuk agama dan mengambil posisi yang berjauhan. Namun demikian, benang merah pemikirannya

tentang moral politik dan kebaikan sebuah negara dapat ditelusuri untuk dapat dijadikan pemikiran dan rujukan dalam membangun moral politik sebuah bangsa.

Segara (2014: 55) berpendapat, berbeda dengan Machiavelli yang 'hanya' bermain di wilayah politik modern, gagasan Kautilya dalam Arthaśāstra lebih komprehensif karena juga membicarakan banyak hal yang berkenaan dengan negara (politik, hukum, keadilan, ekonomi, kepemimpinan, dll) bahkan juga memaparkan hal-hal praktis seperti bagaimana penguasa mengelola pertanian, mineral dan energi untuk kepentingan rakyat banyak. Menurut hematnya, pada titik ini, Kautilya tidak cukup disamakan dengan Machiavelli yang lebih modern, tetapi juga sosok yang dapat disamakan dengan Plato dan Aristoteles pada masa Yunani klasik. Implikasinya, Kautilya tidak bisa hanya dibaca secara monolitik namun justru spektrumnya diperlebar mengingat Kautilya menjadi semacam glorifikasi dari banyak pemikiran dan tokoh.

Boesche (2002) yang membandingkan pemikiran Machiavelli dan Kautilya menyatakan walaupun penulis *The Prince* disebut sebagai "*a teacher of evil*" namun pemikirannya jauh lebih moderat walau tetap dikatakan radikal dijamannya. Sambil menghindari semua prinsip moral yang absolut dan tidak berubah, Machiavelli menilai tindakan baik atau buruk berdasarkan konsekuensinya. Bahwa tindakan semua orang dan terutama para pangeran,... semua orang melihat hasil mereka. Hasil yang paling dicari Machiavelli bukanlah barang yang absolut dan tidak lekang oleh waktu, tetapi barang umum atau barang publik, yang dapat diekspresikan beragam.

Basis moral Machiavelli menyarankan, seseorang harus rela kadang-kadang menggunakan cara-cara politik yang keras, kejam, atau yang umumnya dianggap tidak bermoral. Machiavelli setuju dengan orang-orang sezamannya bahwa tujuan politik yang tepat adalah kehormatan, kemuliaan, dan ketenaran. Nasihatnya yang terkenal bahwa seorang pangeran harus memperoleh kekuatan untuk menjadi tidak baik, dan memahami kapan

menggunakannya dan kapan tidak menggunakannya, sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, seorang pemimpin politik dan atau militer harus mengenali bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik atau besar atau mulia—sesuatu yang agung dan megah—seperti mendirikan negara baru atau mendirikan aturan hukum atau menyelamatkan pasukan, seseorang harus rela mengotori tangan seseorang dengan cara yang biasanya dianggap menjadi tidak bermoral, tindakan yang mungkin tidak akan pernah dipertimbangkannya dalam kehidupan pribadi seseorang. Jika seseorang ingin mencapai suatu kebaikan, Machiavelli berpendapat, maka kadang-kadang—tidak selalu berarti—seseorang harus mau melakukan apa yang secara luas dianggap sebagai tindakan jahat atau tidak bermoral (Boesche, 2002: 254-255). Pendapat ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan *Cāṇakya* bahwa musuh yang jahat dan kejam harus ditundukkan dengan berbagai cara demi melindungi negara. Namun bukan berarti seorang pemimpin boleh menggunakan cara-cara tidak terpuji pada setiap kesempatan. Namun harus mengetahui kapan menggunakan cara-cara tersebut.

The Prince secara eksplisit menanggalkan pertimbangan moralitas yang menjadi kepedulian perilaku para penguasa (Russell, 2016: 666). Dinyatakan bahwa seorang penguasa akan mati jika ia selalu berbuat baik, dia harus selicik serigala dan segalak singa. Bab XVIII dalam bukunya tersebut yang berjudul "*In What Way Princess Must Keep Faith*" dapat dipahami bahwa raja-raja harus menjaga imannya ketika memang diperlukan, tetapi bukan sebaliknya seorang raja pada suatu saat harus mengingkari imannya. Machiavelli secara lebih tegas menyatakan bahwa dibutuhkan kemampuan untuk menyamarkan sikap, untuk menjadi seorang yang pandai berpura-pura dan menyembunyikan diri, menjadi manusia yang sederhana dan siap memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Juga, menegaskan bahwa bagaimanapun juga seorang raja harus terlihat seperti seorang yang religius. Gagasan-gagasan Machiavelli terlihat masih jauh lebih dangkal dan tidak rinci sebagaimana uraian *Cāṇakya* tentang

seorang raja, Menteri maupun pembesar kerajaan. Namun hal yang penting dari gagasannya adalah pentingnya memperjuangkan tujuan politik dengan memilih cara yang tepat. Persoalan tentang cara ini dapat dikaji secara ilmiah semata tanpa mempertimbangkan kebaikan dan keburukan tujuannya. Bagi seorang santa, jika terjun ke dunia politik pasti menginginkan keberhasilan sebagaimana juga seorang pendosa. Namun demikian, ia menulis-contoh-contoh pendosa yang berhasil lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan santa-santa yang berhasil. Secara samar-samar ia menguraikan bahwa ilmu tentang keberhasilan harus dipelajari sama baiknya baik oleh orang jahat maupun orang baik. Seolah ia ingin menyampaikan bahwa orang baik, tidak sama gigihnya memperjuangkan keberhasilan yang dingin diraihnyanya, dibandingkan dengan orang jahat.

Persoalan puncaknya menurut Machiavelli adalah kekuasaan. Kekuasaan seringkali bergantung pada opini dan opini bergantung pada propaganda, juga benar bahwa sebuah keuntungan yang terdapat dalam propaganda tampaknya lebih berbudi daripada musuhnya dan bahwa cara agar tampak berbudi, pastilah berbudi. Dengan alasan ini kadangkala terjadi bahwa kemenangan berada di pihak yang memiliki sebagian besar dari apa yang dianggap baik oleh publik pada umumnya. Pendapat Machiavelli ini sesuai dengan keadaan jamannya di Barat ketika itu. Periode kaotik ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang bangsat. Namun kata Machiavelli sebenarnya sangat perlu menunjukkan sebuah wujud kebenaran di hadapan publik yang bodoh.

Moralisme Kauṭilya mengikuti sila tradisional *rājadharmā* (tugas raja), yakni seorang Raja harus berpegang teguh pada dharma, sementara Machiavelli dipandu oleh ketegangan antara moral dan keharusan. Meskipun keduanya sepakat bahwa keberhasilan adalah *sumum bonum* kehidupan politik, mereka menekankan dua aspek yang berbeda. Seorang *brāhmin* Hindu, Kauṭilya ingin menemukan kekuatan politis pada *dharma* atau kebajikan. Seorang pengamat yang tajam dari Italia

kontemporenya, Machiavelli benar skeptis tentang kemanjuran moralitas belaka dan dengan demikian ingin melihat kebajikan dibentengi dengan kekuatan nyata (Sil, 1985: 101-102). Serat Niti Sruti juga mengajarkan tentang etika dalam berperang, menunjukkan watak rendah dan dengan beraninya mengatakan agar orang lain bersabar (Purwadi, 2009: 280). Watak seorang raja yang demikian dikatakan bukan menunjukkan keberanian melainkan watak yang rendah dan diliputi rasa takut.

Cāṅkya ketika menutup karyanya menegaskan bahwa sumber kehidupan umat manusia adalah *artha* (kesejahteraan), dengan kata lain adalah bumi (dengan segala isinya) yang didiami manusia. Ilmu yang mencakup cara untuk mencapai dan melindungi bumi adalah Arthaśāstra, ilmu politik (Chati, Avalokitesvari dan Surpi, 2018: 224). Dengan demikian, Cāṅkya memandang, ilmu politik merupakan penentu kesejahteraan masyarakat bahkan bumi ini. Olehnya, secara tersirat ia menegaskan bahwa ilmu politik harus didedikasikan untuk menjaga dan melindungi bumi, bukan merusak apalagi memperkosanya hanya karena keinginan untuk berkuasa. Barua (1998: 342) menyebut *Bṛihaspati* dan Cāṅkya sebagai *Teachers of Political Morals*.

3. Moral Politik dan Goyahnya Sendi Fundamen Bangsa

Moral politik akan berpengaruh terhadap situasi fundamen sebuah bangsa. Politik bukan sekedar mencapai kekuasaan, tetapi memiliki tujuan dan cara yang baik. Di negara kita, cara berpolitik kelompok oposisi yang paling buruk ditunjukkan dalam kontestasi politik Pilpres 2019 yang oleh sejumlah media massa disebut disebut sebagai Pilpres terpanas sepanjang sejarah. Para elit Parpol dan politisi tampak oleh publik menggunakan berbagai cara. Salah satu hal yang paling menonjol adalah *playing victim* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, seorang aktivis yang kerap melancarkan protes keras terhadap pemerintah. Sejumlah media melaporkan Ratna mengaku dikeroyok oleh segerombolan orang di Bandara Husein

Sastranegara pada 21 September 2018. Bahkan ia dan kelompoknya menduga penganiayaan itu dilakukan oleh kubu Petahanan. Dengan sangat cepat, fotonya viral dan wacana sentimen bermuatan politis dan nyaris terjadi pengerahan massa. Fenomena gaya berpolitik oposisi ini menjadi penanda buruk untuk menjadikan Pilpres 2019 sebagai medan pertarungan mencari pemimpin yang baik. Calon Presiden Prabowo Subianto dan kelompoknya langsung melakukan konferensi Pers pengutuk kejadian fiktif tersebut, sampai akhirnya polisi bekerja keras membongkar kebohongan tersebut. Drama yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, dengan menyebut hasil operasi plastik sebagai pengeroyokan, bukan tidak beralasan. Ada kelompok dalam lanskap politik nasional memproduksi gagasan-gagasan sentimen rasial dan membentuk kesadaran politik ketakutan yang kuat. Pola polarisasi kelompok politik inilah yang menjadi pembentukan oposisi yang sering memproduksi gagasan sentimen dan kegaduhan-kegaduhan yang sering diasosiasikan dengan meningkatnya politik identitas di ruang publik. Kasus Ratna Sarumpaet menjadi pelajaran moral politik oposisi yang sangat penting, bahwa pencarian kekuasaan dalam iklim demokrasi haruslah diikuti juga dengan etik politik oposisi yang bermartabat.

Fenomena politik buruk di Indonesia memberikan pelajaran sekaligus ancaman serius berupa penurunan kualitas cara berpikir elite politik bangsa. Dengan jelas terlihat bagaimana api sentimen kebohongan langsung disebarkan tanpa ada konfirmasi terhadap fakta yang sebenarnya terjadi. Elite politik hari ini, terutama yang dilakukan oleh kelompok oposisi, merupakan pola pikir barbar yang sama sekali tak peduli bagaimana menyehatkan partisipasi politik masyarakat.

Menajamnya dua kutub politik ini menghasilkan kejadian-kejadian politik yang menjerumuskan kesadaran politik dan membunuh moral politik di ranah publik. Kebohongan-kebohongan yang diproduksi dan disebarkan secara massif telah mampu menggoyang sendi yang paling fundamental dari bangsa yakni persatuan. Para elit politik, para politisi tampaknya tidak

memiliki tanggung jawab membangun bangsa yang besar, selain syahwat berkuasa yang menggebu-gebu. Apa yang terjadi di Indonesia, mirip seperti apa yang dimainkan Paman Sakuni lima ribu tahun lalu dalam sejarah Mahābhārata. Sebagai kubu opisisi yang haus dengan kekuasaan, ia menganggap segala bentuk kecurangan adalah sah demi meraih tujuan kekuasaan. Bahkan keadilan menurutnya adalah apa yang menguntungkan dan sebaliknya apapun yang merugikan kelompoknya, tidak peduli sebenar apapun, tetap dianggap tidak adil. Demikian pula kerusuhan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta, pasca pengumuman hasil Pilres dan Pileg 2019, mencerminkan betapa tidak bermartabatnya cara-cara yang digunakan. Kerusuhan 22 Mei 2019 tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah kejahatan semata, tetapi rusaknya konsep berbangsa dan rusaknya moral politik para politisi. Sangat diperlukan sebuah moral politik yang dapat digunakan untuk menghasilkan fungsi politik yang baik. Hakikat politik yang baik itu tentu dapat diimplementasikan dalam proses perjuangan politik. Hadirnya moral politik oposisi yang baik tentu akan mendorong hadirnya gerbong penyeimbang yang baik dalam proses mengawal pemerintahan.

Namun, politik yang hanya mengejar kekuasaan dengan membangun sentiment politik identitas rasial serta menyebarkan ketakutan sudah tidak sesuai dengan kultur kuno Nusantara sebagaimana diajarkan dalam Lontar Sevaka Dharma, pustaka yang menjadi landasan politik kuno.

*Ini kawih panyaramani/pikawitheun ubar keueung/
Ngaran (n) pangwereg darma/ngawangun rasa sorangan/*

Sevaka Dharma. 1 (baris 1-4)

Kawih Panyaraman atau Pedoman untuk Hidup Luhur ini adalah dimaksudkan untuk menghilangkan rasa takut; membuat seseorang berani melakoni Darma atau kebajikan; serta memberdayakan dirinya yang terdalam (dengan membangkitkan pusat rasa) (Krishna, 2015: 369).

Bagaimanapun, pertarungan politik tidak boleh mengabaikan kemanusiaan apalagi berpotensi meruntuhkan sendi fundamen bangsa yakni semangat persatuan. Apa yang diajarkan oleh Cāṇakya dan Machiavelli lebih banyak pelajaran untuk menghadapi musuh dari luar yang bersifat kejam dan ingin menguasai sehingga seorang pemimpin harus bangkit dengan segala cara melindungi tanah airnya. Namun Cāṇakya dengan risalahnya yang panjang mengajarkan bagaimana pola-pola menghadapi musuh yang dekat, yakni mereka yang ingin menghancurkan tatanan kehidupan bangsa, namun tidak menimbulkan

4. Pengaruh Negatif Politisi

Pilpres memang sudah berakhir dan pemenangnya pun sudah ditetapkan. Namun persoalan tidak akan selesai, sebab bukan persoalan perhelatan politik melainkan moral politik yang rapuh. Politik ini harus ditangani dan dibangun demi membangun peradaban politik yang sehat, bermartabat dan tidak memecah belah bangsa karena syahwat kekuasaan. Dunia saat ini membutuhkan ditumbuhkannya moral politik guna mengembalikan esensi dari ilmu politik yakni demi kesejahteraan masyarakat. Politisi yang buruk, yang hanya mengejar kekuasaan, harta dan tahta telah memberikan pengaruh yang buruk di berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia. Ujaran-ujaran kebencian para politisi akan disambut dengan pengikutnya bahkan oleh mereka yang tidak memahami apa-apa tentang politik. Hanya berlandaskan kesamaan semata, walau hanya kesamaan emosi. Semburan kebencian para politisi bisa mengacaukan pikiran manusia yang membuat kehidupan menjadi merosot pada titik nadir tanpa kehormatan peradaban. Demikian pula, pola-pola kejahatan pada masyarakat akan semakin kuat apabila ada energi dukungan dari para politisi atau tokoh tertentu. Energi kejahatan ini bagai bola api yang siap menghancurkan sebuah negara.

Selain para pemikir politik, Islam pun sangat menjunjung moral politik. Menurut al-Ghozali moral dan politik adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Moral diperlukan oleh masyarakat untuk menentukan nilai baik dan buruk tindakan serta keinginan orang didalam masyarakat dan politik diperlukan sebagai pengatur masyarakat supaya sesuai dengan aturan-aturan moral yang diterima masyarakat. Sehingga dalam pembahasannya bukan moral dan politik tetapi moral politik, yang tentu saja moral politik yang dimaksud adalah moral yang didasarkan kepada agama Islam (Komariyah, 2007: 63-64). Mestinya, tidak ada halangan apapun, walaupun atas dasar agama untuk membangun politik yang menjunjung moral di Indonesia.

Simpulan

Moral politik sangat menentukan kualitas sebuah peradaban. Penguasa yang baik, dengan tujuan dan cara yang baik namun kuat sangat diperlukan untuk mendidik masyarakat. Kekuasaan yang diraih dengan cara-cara yang licik oleh orang-orang yang jahat sesungguhnya telah menghancurkan peradaban, budaya adi luhung, sebagaimana semangat yang ingin dibangun oleh orang-orang yang memiliki pikiran besar. Hasrat berkuasa telah melumpuhkan cara-cara baik dan etika-moralitas dalam dunia politik. Sebuah kemunduran akan terjadi ketika moral politik diabaikan dalam tujuan politik untuk meraih kekuasaan. Sejak jaman lampau, *Kauṭilya Pandit* dalam risalahnya *Arthaśāstra* telah mengajarkan bagaimana kekuasaan politik harus diraih dan dipertahankan namun tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat termasuk kualitas moral dan cara berpikirmya. Politik justru didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menghancurkan fundamen bangsa yang disusun atas moralitas dan kesatuan. Cāṇakya dan Machiavelli adalah dua kubu pemikir politik pada jaman yang berbeda dan tanah yang berbeda-namun ajarannya terdapat benang merah walau tersamar dalam tatanan moralitas politik guna membangun nilai kebaikan ditengah masyarakat.

Ajaran Nasionalisme dan Cinta Tanah Air dalam Hindu-bahwa umat Hindu senantiasa menjadi simbol perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada doktrin sentral dalam ajaran Hindu bahwa bumi lebih tinggi dari Surga dan setiap orang harus menghormati bumi. Dalam pengertian luas, bumi yang dimaksud adalah planet Bumi dan dalam pengertian sempit berarti tempat dimana seseorang hidup dan tinggal. Umat Hindu senantiasa menganut paham nasionalis dan tidak ingin terlibat konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Olehnya, integrasi bangsa merupakan sumbangan besar dari umat Hindu, baik dalam bentuk pikiran maupun tingkah laku. Tajamnya isu radikalisme tidak menggoyang pendirian umat Hindu, bahkan mengambil posisi sebagai penjaga Pancasila, cita-cita dan amanat luhur bangsa. Olehnya, umat Hindu dapat memberikan sumbangan pemikiran ideologi bangsa dan upaya membangun moral politik bangsa.

Daftar Pustaka

- Ādidevānanda, Svāmī, 2009. *Śrī Rāmānuja Gitā Bhāṣya: With Text in Devanagari & English Rendering, and Index of First Lines of Verses*. Madras: Sri Ramakrishna Math.
- Āryādharma, Ni Kadek Surpi, 2011. *Membedah Kasus Konversi Agama di Bali*. Surabaya: Paramita.
- Āryādharma, Ni Kadek Surpi, 2012. *Hindu di Tanah Bugis*. Surabaya: Paramita.
- Avalokitesvari, Ni Nyoman Ayu Nikki. 2019. "Analisis Diplomasi Pertahanan Negara Dalam Pandangan Cāṇakya (Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan)". *Tesis*. Fakultas Strategi Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan.
- Barua, Benimadhab, 1998. *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Boesche, Roger, 2012. "Moderate Machiavelli ? Contrasting The Prince with the Arthasāstra of Kauṭilya". *Critical Horizons* 3:2 (253-276). Koninklijke Brill NV, Leiden, 2002.

- Chati, Channarong, Ni Nyoman Ayu Nikki Avalokitesvari, Ni Kadek Surpi, 2018. "State Defense Diplomacy In Cānkyā Viewpoint (Study of Arthashastra Text as a Basis Strategy of Defense Diplomacy)". *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 2(2), 218-225.
- Kangle, R.P. 1986. *The Kauṭilya Arthasāstra*, Part 3, no. 14, Motilal Banarsidass Publ., 1986. p. 250
- Kumar, Abhishek, 2015. "The Arthashastra: Assessing the Contemporary Relevance of an Ancient Indian Treatise on Statescraft". *Tesis*. Faculty of U.S Army Command and General Staff College.
- Komariyah, Siti., 2007. "Konsep Kekuasaan Dalam Islam: Kajian Atas Pemikiran Politik AlGhozali." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Krishna, Anand., 2015. *Dvipantara Dharma Sastra*. Jakarta: Centre for Vedic & Dharmic Studies.
- Purwadi, 2009. *Kitab Jawa Kuno*. Yogyakarta: Pinus.
- Rangarajan. 1992. *The Arthashastra: Edited, Rearranged, Translated and Introduced*, (New Delhi, India: Penguin Books India Ltd, 1992), p. 542. R.P. Kangle, *The Kauṭilya Arthasāstra*, Part 3, no. 14, p. 250.
- Rāmānuja, Śrī., 2009. *Śrī Rāmānuja Gītā Bhāṣya with Text and English Translation*. Translation by Svāmī Ādidevānanda. Myslapore: Sri Ramakrishna Math.
- Russell, Bertrand, 2016. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*. History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. Penerjemah Sigit Jatmiko, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schweih, Graham M., "Vaishnava Bhakti Theology and Interfaith Dialogue" *Journal of Vaishnava Studies*, Spring 2012, pp. 51-68
- Sil, Narasingha Prosad., 1985. "Political Morality vs. Political Necessity: Kauṭilya and Machiavelli Revised". *Journal of Asian History*, Vol. 19, No. 2 (1985), pp. 101-142.

- Segara, I Nyoman Yoga, "Refleksi Filsafat Politik dalam Kauṭilya Arthaśāstra". *Laporan Penelitian*. Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama RI Tahun 2014.
- Zimmer, Heinrich, 2003. *Sejarah Filsafat India*. The Philosophy of India. Penterjemah Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

REKAYASA TRANSFORMASI GENETIKA MENTAL POLITIK: Dari Semangka Berdaun Sirih Menjadi Rambutan Berbuah Durian

I Ketut Donder*

Pendahuluan

Politik adalah ilmu atau seni memimpin, demikian sekilas definisi politik yang dilontarkan oleh orang-orang yang maniak politik. Tetapi, dalam realitasnya politik tidak lebih dari “ilmu kelicikan, ilmu cara menipu untuk saling merebutkan pengaruh dan kekuasaan”. Politik dalam realitasnya adalah “cara merebut kekuasaan dengan segala cara termasuk dengan cara-cara jahat, licik dalam istilah zaman NOW dengan cara-cara hoax”. Sangat susah untuk dipaksa mengakui pernyataan agama yang menyatakan bahwa “manusia adalah makhluk yang paling mulia”, jika predikat kemuliaan itu dilihat dari sudut pandang praktik politik, apalagi jika dilihat dengan Pratik politik tahun 2019. Bahkan dilihat dari perspektif agama, tidak cocok sama sekali manusia mendapat predikat sebagai makhluk paling mulia di antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Sebab, manusia-manusia politikus dan juga manusia-manusia agama hanya sangat pakar dan lancar berkata-kata kebijaksanaan, tetapi dalam perilakunya tidak berbeda dengan makhluk lainnya. Bahkan banyak manusia yang sangat fasih berkata-kata agama, hafal di luar kepala ayat-ayat kitab suci, tetapi perilakunya tidak lebih baik daripada perilaku binatang, bahkan lebih keji dan lebih menjijikkan daripada binatang buas. Lalu, apa yang dibanggakan dengan sebutan manusia sebagai makhluk paling mulia di antara makhluk lainnya. Apakah kemampuan manusia berbuat kejahatan atau kelicikan sistematis

* Dosen pada Fakultas Brahma Widya, IHDN Denpasar dan Sekretaris Jenderal World Hindu Parisadh (WHP). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: donderjyothi@gmail.com

seperti itu, kemudian manusia berhak mendapatkan julukan atau predikat sebagai makhluk paling mulia?

Jika demikian, maka sungguh sangat kasihan kepada anjing-anjing kurap yang kelaparan dilempari oleh para politikus yang jijik melihat anjing kurap karena mereka sedang makan kue hasil kejahatan atau hasil kelicikannya. Jika saya hari ini menjelma menjadi anjing kurap yang dilempari oleh para politikus licik itu, maka saya bersumpah untuk menghadap kepada Bhatara Yamadipati agar saya boleh menjadi *rencang* (ajudan) Bhatara Yamadipati untuk menunggu roh para politikus yang jahat dan licik itu untuk ikut merebus dan menggoreng para politikus dan para pejabat yang haus dengan kekuasaan. Sangat disayangkan sekali, karena pada saat ini saya lahir sebagai manusia yang tidak berdaya dan tidak lebih dari seekor cacing yang tidak mampu berbuat apa-apa melihat orang-orang baik dihina dan diinjak-injak kemanusiaannya. Lalu apanya yang dapat disebut mulia pada manusia? di mana dan kapan manusia itu mulia? Bila manusia berbuat melampaui perbuatan binatang buas, apakah masih boleh disebut makhluk paling mulia? Jika jawabannya adalah “apapun perbuatan manusia itu, maka manusia tetap mendapat predikat atau julukan sebagai makhluk paling mulia, maka dapat dinyatakan bahwa definisi inilah yang menjadi faktor semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan manusia di bumi ini.

Untuk memperbaiki kualitas manusia, umat beragama harus sepakat untuk mendefinisikan ulang tentang predikat kemuliaan manusia. Jika ada manusia perilakunya seperti anjing yang suka mengkritik saja tanpa memberikan solusi, pokoknya hanya menggonggong seperti anjing, maka kepadanya tidak boleh disebut sebagai makhluk paling mulia, tetapi kepadanya dapat dipanggil sebagai anjing intelek. Kemudian jika ada seorang manusia yang perilakunya sangat korup, baik di bidang harta benda maupun di bidang ilmu (nyontek dan plagiat), maka kepadanya dapat panggilan sebagai tikus intelek. Reformasi mental yang sedang digalakkan dewasa ini dengan tetap melekatkan predikat atau julukan sebagai makhluk paling mulia

kepada orang-orang jahat, maka reformasi mental itu hanya sebatas wacana belaka.

Pembahasan

Teologi Politik, Idealisasi Teori Politik, dan Kualitas Praktik Politik

1. Terminologi Teologi

Donder (2015) dalam satu Seminar Nasional dengan tema seminar: *Kepemimpinan Tri Hita Karana* menguraikan bahwa kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari *theos* dan *logos*; *theos* artinya 'Tuhan' dan *logos* berarti 'ilmu'. Jadi, teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Nico Syukur Dister (dalam Donder, 2015) menguraikan bahwa "Teologi adalah pengetahuan adi-kodrati yang metodis, sistematis, dan koheren tentang apa yang diimani sebagai wahyu Allah atau berkaitan dengan wahyu itu. Teologi harus digolongkan dalam kegiatan intelektual manusia yang disebut "tahu" dan "mengetahui". Teologi bersifat metodis, sistematis dan koheren atau "bertalian". Dengan demikian, teologi merupakan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Untuk menghindari kesalahpahaman, di sini perlu digaris bawahi bahwa walaupun Teologi adalah ilmu tentang Tuhan, tetapi tidak semua pembahasan tentang Tuhan termasuk dalam ilmu Teologi. Teologi harus mengacu pada pustaka suci atau kitab suci.

Lebih lanjut Donder (2015) menulis bahwa jika seseorang berbicara atau membahas teologi, maka ia harus banyak-banyak menghadirkan teks pustaka suci sebagai rujukannya. Hal ini relevan dengan pernyataan pustaka suci *Brahma Sutra* I.1.3, yang berbunyi *sastra yonittvat* 'pustaka suci adalah alat yang paling tepat untuk memahami Tuhan'. Karena teologi harus merujuk pustaka suci (kitab suci) yang nota bene berasal dari wahyu Tuhan, maka dalam mempelajarinya harus di bawah bimbingan guru yang mapan, baik dalam hal ilmu pengetahuan intelektual maupun dalam hal rohani. Itulah sebabnya pustaka suci *Bhagavadgita* IV.34 menyatakan: "pelajarilah hal ini dengan rasa rendah hati, dengan berguru". Tanpa memperoleh bimbingan yang benar dari guru

yang mapan, maka pengetahuan tentang Tuhan (teologi) tidak dijamin kebenarannya. Karena itu pula, pustaka *Sarasamuscaya* 39 menyatakan bahwa *Veda* sebagai pustaka *sruti* takut dengan orang yang sedikit pengetahuannya. Hal ini dipertegas lagi dalam *Geguritan Sucita* I.XII.40 yang menyatakan: *Reh suksma daginging sastra lan agama, tan gampang pacang manampi, yan tan paguruwang, makadi yan tan kaswecan, antuk Ida Sang Hyang Widhi, bisa sungsang, kawuhe kakden kangen* ('Karena demikian halus dan luhurnya isi sastra dan agama, tidak mudah untuk memahaminya, jika tidak diterima dari para guru yang mapan, seperti tidak memperoleh anugerah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa bingung, sebagaimana arah Barat disangkanya Timur'). Berbagai pustaka memperingatkan agar seseorang tidak ceroboh atau sembarangan menggunakan pikiran liar dalam memahami agama, dalam hal ini teologi. Sebab, pengetahuan yang salah dapat menyesatkan seseorang, karena itu berhati-hati dalam memahami pengetahuan yang satu ini.

Donder (2015) juga menyatakan bahwa untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap berbagai pengetahuan tentang Tuhan, maka pemahaman tentang teologi harus dipisahkan dengan pemahaman tentang yang didasarkan pada perspektif lain. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa teologi harus merujuk pada pustaka suci, maka pembahasan tentang Tuhan yang tidak merujuk pada acuan pustaka suci, namun menggunakan spekulasi akal pikiran yang cerdas, maka ilmu tersebut termasuk dalam ranah Filsafat Ketuhanan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maharsi Vasista dalam pustakan suci *Vasista Smrti* sebagaimana dikutip oleh Radhakrshnan (2010:133), yang berbunyi:

*Yukti-yuktam upādeyam vacanam balakād api
anyat tṛnam iva tvājyam apy uktam padma janmanā*

'Walaupun kata-kata itu datang dari seorang anak kecil, jika kata-katanya masuk akal harus diterima, sebaliknya walaupun kata-kata itu dinyatakan datang dari Yang Maha Kuasa, jika tidak masuk akal harus ditotlak'.

Tradisi pembahasan tentang Tuhan dan ketuhanan di kalangan Hindu kerap sekali tidak membedakan secara jelas antara epistemology teologi dan epistemology filsafata Ketuhanan. Sehingga ada banyak pernyataan bahwa Teologi Hindu itu kabur, alias tidak jelas. Jika seseorang belajar secara sungguh-sungguh dan mendalam serta berguru pada guru yang berkualifikasi dalam bidang Teologi Hindu, tentu pernyataan dan pertanyaan seperti itu tidak akan terjadi.

2. Teologi Politik

Donder (2015) juga menyatakan bahwa ada banyak definisi tentang politik, secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polis* yang berarti 'kota' atau 'negara kota'. Kemudian arti kata itu berkembang menjadi beberapa istilah, seperti *polites* yang berarti warganegara, juga menjadi kata *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, Juga menjadi *politika* yang berarti 'pemerintahan negara', serta kata *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Politik adalah 'suatu teknik dan teori untuk mempengaruhi orang sipil atau individu'. Politik juga berarti 'cara seseorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan atau organisasi lainnya.

Lebih lanjut, Donder (2015) menyatakan bahwa banyak yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan individu.

Idealisasi Teori Politik dan Kualitas Praktik Politik

Donder (2015) dalam Seminar Nasional *Kepemimpinan Tri Hita Karana* pada Universitas Warmadewa, Denpasar, menguraikan

bahwa jika teologi adalah ilmu tentang Tuhan yang merujuk atau mengacu pada pustaka (kitab) suci, sebagaimana pernyataan pustaka *Brahma Sutra* I.1.3; dan politik adalah segala sesuatu yang tidak hanya berkisar pada lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa Negara; serta politik juga selalu menyangkut tujuan-tujuan kebaikan dan kebijaksanaan untuk seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk tujuan pribadi, maka *Teologi Politik* adalah: “tindakan-tindakan mulia para penguasa negara yang mengacu kepada kebijaksanaan yang bersumber dari pustaka suci (*Veda*). Hal ini berarti bahwa seorang politikus harus memiliki pengetahuan teologis sesuai dengan ajaran pustaka suci. Hanya ketika seseorang memahami secara mendalam hakikat politik dalam konteks *Veda* ini baru layak menjadi pemimpin. Karena itu *Manavadharmashastra* menyatakan:

*senāpatyaṅ ca rājyaṅ ca daōḍa netātvaṃ eva ca,
sarva lokādhipatyay ca veda ūstravid arhati.*
(*Manavadharmashastra* XII.100)

‘Panglima angkatan bersenjata, pejabat pemerintah, majelis hakim, dan penguasa atas seluruh dunia, dinyatakan layak untuk itu jika ia mengetahui *Veda*’.

Selain pustaka suci *Manavadharmashastra* di atas, pustaka *Arthashastra* juga menyatakan tentang standar orang yang layak menjadi pemimpin, sebagaimana sangat jelas dan secara eksplisit dituangkan dalam *sloka Arthashastra* sebagai berikut:

*Prajaa sukhe sukham raajnah
Prajanaam ca hita hitam
Naatma-priyam hitam raajnah
Prajanaam tu priyam hitam*
Arthashastra XIX.16.34 (dalam Widnya, t.t)

‘Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja (pemimpin), kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan raja (pemimpin) kesejahteraan raja (pemimpin) bukanlah apa-apa yang diinginkan oleh raja (pemimpin), tetapi, adalah apa yang menjadi kesukaan rakyat, itulah yang mensejahterakan raja (pemimpin).

Pada Arthashastra ini, pada Buku V dituliskan perilaku anggota Istana, perihal penghargaan, hukuman; pengisian kembali perbendaharaan; tentang perbaikan subsisten kepada pegawai pemerintah; perilaku punggawa; waktu pelayanan; konsolidasi kerajaan dan kedaulatan mutlak (by R Shamasastri dalam https://csboa.com/eBooks/Arthashastra_of_Chanakya-English.pdf) Donder (2015) lebih lanjut memberi interpretasi atas definisi kemuliaan manusia kaitannya dengan politik, menyatakan bahwa seorang politisi Hindu jika ingin tampil terdepan dalam bidang politik, selain harus memiliki pengetahuan intelektual yang mapan, juga harus memiliki pengetahuan agama dan keagamaan secara mapan juga. Seorang politisi Hindu tidak boleh belajar agama setelah menjadi pejabat atau pimpinan. Sebab seorang politisi yang tidak paham dengan ajaran agamanya, maka arah perjuangannya selain tidak memiliki spirit suci juga akan tidak terarah, alias ngawur. Untuk menjadi seorang politisi dan pemimpin yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, maka ia harus memiliki sifat-sifat kedewataan (*daivasampad*). Karena dalam perspektif atau kaca mata Teologi Politik, seorang pemimpin sesungguhnya adalah representasi dari anggota Kabinet Ketuhanan.

Politik Mesti Membangun Peradaban

Pada uraian sub-bab ini akan dikutip makalah karya Ketut Widnya, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI berjudul *Politik Mesti Membangun Peradaban*. Widnya dalam makalahnya mengutip pandangan Mahatma Gandhi seorang tokoh besar India yang mengatakan bahwa hidup adalah politik, sebab setiap orang memiliki interest (kepentingan). Upaya dan proses yang digunakan untuk meraih apa yang menjadi kepentingan itu adalah politik. Sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari politik. Sejak lahir, bayi para prinsipnya telah berpolitik, seperti misalnya ketika seorang bayi haus dan lapar ia akan menangis untuk memenuhi kepentingannya. Jadi, seorang bayi menangis sebagai cara dan upaya untuk mendapatkan

maknan yang dibutuhkan. Itu wujud politik bayi dalam upaya mencapai kepentingannya, demikian seterusnya dalam hidup manusia akan tetap berpolitik sampai akhirnya kita menghembuskan nafas terakhir.

Widnya menyatakan bahwa politik yang menghancurkan juga terlihat pada era sekarang ini. Politik sarat dengan kepentingan pribadi dan golongan, bukan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Demi kekuasaan apapun bisa dilakukan dan dalam upaya mempertahankan kekuasaan maka kepentingan masyarakat dikesampingkan. Jika perhatikan pemberitaan di media massa, bahwa para politikus sepenuhnya berbicara tentang kepentingan rakyat, mereka tahu betul tentang apa yang harus dikerjakan, mereka juga tahu apa yang harus diperbaiki demi kepentingan rakyat, tetapi dalam implementasinya, rakyat tidak mendapat apa-apa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh [Groucho Marx](http://www.goodreads.com) (dalam www.goodreads.com):

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies" (Politik adalah seni melihat permasalahan, menemukannya dimanapun berada, mendiagnose permasalahan tersebut dengan benar dan kemudian memberikan obatnya yang salah).

Widnya lebih lanjut menyatakan bahwa melihat hal tersebut, maka politik mestinya mampu mengantarkan masyarakatnya untuk hidup aman, tentram, damai dan sejahtera. Peradaban mestinya terwujud. Para politikus Hindu harus memahami secara baik dan benar terhadap ajaran Agama Hindu yang dianutnya. Agama Hindu memandang bahwa politik tidak saja sebagai cara untuk mencari, dan mempertahankan kekuasaan, tetapi politik adalah sarana untuk penegakkan *Dharma*. Ajaran ini banyak diuraikan dalam percakapan antara Bhagawan Bhisma dengan Prabhu Yudhistira pasca perang *Bharatayudha*, yaitu dalam *Shanti Parwa-1: LXIII* sebagai diterjemahkan oleh (Nila, 1995), sebagai berikut:

“Manakala politik telah sirna, veda pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua berlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, pada politiklah semua dunia terpusatkan”.

Dalam *Shanti Parva* pada bab yang lain juga dijelaskan pula bahwa:

“Ketika tujuan hidup manusia—*dharma, artha, kama*, dan *moksa* semakin jauh. Begitu juga pembagian masyarakat semakin kacau, maka pada politiklah semua berlindung, pada politiklah semua kegiatan agama/yajna diikatkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, dan pada politiklah dunia terpusatkan”

Widnya kemudian menyatakan bahwa berdasarkan teks *Shanti Parva* tersebut dapat dilihat bahwa politik seharusnya digunakan untuk menjalankan dan menegakkan *Dharma*. Terminologi *Dharma* meliputi pengertian sebagai hukum, kewajiban, dan kebenaran yang apabila dilanggar akan berakibat pada kehancuran umat manusia. Sebaliknya jika *Dharma* dijaga akan membawa kemuliaan (*dharma raksati raksitah*).

Kesimpulan Widnya terhadap hakikat *Dharma* ini, sangat relevan dengan uraian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba dalam *Discourses on the Bhagavad Gita* yang menyatakan bahwa dalam pustaka suci Bhagavadgita mencantumkan kata *Dharma* pada Bab pertama *sloka* pertama (Bhagavadgita I.1) dan kata *mama* pada Bab akhir *sloka* terakhir (Bhagavadgita XVIII.78). Jika kedua kata yang tertulis pada bagian awal dan akhir Bhagavadgita itu, maka akan menjadi kata *Dharma mama* yang berarti sama dengan *Swadharma* yang berarti kewajiban suci masing-masing’. Oleh sebab itu, jika insan politik juga menjalankan Swadharma suci sebagai penegak *Dharma*, maka dunia ini adalah sorga yang nyata.

Politik dengan Prinsip

Pada sub-bab ini masih bersumber pada makalah Widnya dengan judul yang sama dengan judul makalahnya di atas. Sebagaimana diuraikan bahwa politik merupakan menyangga atau penopang

Dharma. Tegaknya *Dharma* adalah tujuan utama politik, sehingga jika realitas politik menunjukkan hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan, maka itu sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai penopang atau penyangga *Dharma*. Politik yang hanya sebagai arena perebutan kursi kekuasaan, maka itu hanya layak disebut sebagai perbuatan *Adharma*. Jika politik masih ingin dinilai sebagai suatu aktivitas *Dharma*, maka politik harus dalam kerangka dan upaya mengemban, menopang, atau menyangga *Dharma*, inilah yang seharusnya menjadi prinsip pada tataran praktis. M. Gandhi sebagaimana dikutip Widnya, menyatakan bahwa ada tujuh kejahatan social termasuk juga di dalamnya kejahatan politik, politik disebutnya sebagai kejahatan jika politik tidak menggunakan prinsip. Mahatma Gandhi dalam *The Seven Social Sins*, menulis:

1. *Wealth without work* (Kaya tanpa kerja)
2. *Pleasure without conscience* (kenikmatan tanpa kesadaran)
3. *Education without character* (pendidikan tanpa karakter)
4. *Commerce without morality* (perdagangan tanpa moralitas)
5. *Science without humanity* (Ilmu Pengetahuan tanpa kemanusiaan)
6. *Worship without sacrifice* (pemujaan tanpa persembahan)
7. *Politics without principle* (politik tanpa prinsip)

Seseorang yang terjun ke dalam dunia politik praktis menurut Gandhi harus memiliki visi dan misi yang jelas dan bertindak sesuai dengannya. Visi dan misi ini merupakan sebuah ideal, cita-cita atau tujuan yang ingin dibangun. Tujuan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, egalitarian, kemanusiaan dan ketuhanan. Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam sebuah *master plan* yang jelas yang senantiasa memperhitungkan prinsip-prinsip tersebut. Setelah tujuan dan rencana dibuat kemudian mesti dicarikan strategi yang mantap agar sampai dengan yang hendak dituju. Yang yang paling penting setelah itu adalah niat baik, loyalitas, totalitas dan transparansi diri kita sendiri sangat menentukan apakah rancangan

awal bisa berjalan atau tidak. Jangan sampai pernyataan Groucho Marx di depan menjadi benar, yakni tujuan bagus, perencanaan bagus, tetapi ketika kita mengaktualisasikannya, kita melakukannya dengan ceroboh sehingga berakibat fatal. Antara tujuan yang dibuat dan realita di lapangan menjadi bertolak belakang.

Tujuan yang bagus, perencanaan yang bagus dan kemudian pelaksanaan di lapangan yang bagus merupakan sebuah strategi politik dengan prinsip. Membuat tujuan serta perencanaannya sangat gampang sebab hal tersebut tampak pada kejadian-kejadian empiris di lapangan. Tetapi untuk dapat melaksanakan perencanaan tersebut dengan baik di lapangan membutuhkan kualitas individu yang khusus. Mereka yang berambisi untuk kekuasaan, kekayaan dan nama besar tidak akan mampu melaksanakan perencanaan tersebut dengan baik, sebab ambisi tersebutlah yang menghalanginya. Sementara pemimpin yang tidak memiliki ambisi, yang kedudukannya digunakan sepenuhnya untuk mengabdikan kepada masyarakat, hidup sederhana, seorang yang *vairagi*, dan kehendak yang baik akan mampu merealisasikan perencanaan tersebut dengan baik. Pemimpin yang baik tidak untuk mengejar kesenangan dirinya, melainkan kesenangan rakyatnya. Kautilya Arthashastra (2000) menguraikan hal tersebut dengan baik sebagai berikut:

“Apa yang membuat Raja senang bukanlah kesejahteraan, tetapi yang membuat rakyat sejahtera itulah kesenangan seorang Raja”.

Kualitas individu pemimpin inilah yang sering bermasalah sehingga ketiga aspek politik (tujuan, perencanaan dan pelaksanaan) tidak dapat berjalan dengan baik. Kualitas individu inilah yang menentukan apakah politik yang diperagakannya memiliki prinsip atau tidak. Kualitas individu yang baik sangat menentukan arah pemerintahan yang lebih baik. Jika seorang pemimpin memiliki kualitas yang baik di dalamnya, maka di dalam kepemimpinannya akan mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dia akan mampu menjadi

pelindung bagi masyarakatnya. Terlalu indah untuk dikatakan dan juga terlalu indah untuk dibayangkan hakikat politik itu; politik sama dengan senjata bom atom, jika salah bisa memusnahkan bukan saja orang yang membawa bom, tetapi memusnahkan orang di sekelilingnya bahkan semua makhluk.

Asta Brata sebagai Wujud Ideal Praktik Teologi Politik

Kepemimpinan menurut Hindu sangat banyak dibahas dalam literatur Hindu salah satu di antaranya ada dalam pustaka suci *Manavadharmasastra* dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus menanamkan delapan sifat dewa di dalam dirinya yang disebut *Asta Brata*, kedelapan sifat dewa yang diuraikan dalam pustaka *Manavadharmasastra* itu adalah *Indra, Sūrya, Vāyu, Yama, Waruna, Candra, Agni dan Prithivi*. Selain ajaran *Asta Brata* dalam *Manavadharmasastra* juga terdapat dalam pustaka *Itihasa Ramayana*. Diuraikan bahwa *Asta Brata* adalah delapan kualitas kepemimpinan yang mencerminkan sifat-sifat atau karakter kedewataan yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin agar layak dihormati dan dipatuhi oleh rakyatnya. Ajaran *Asta Brata Itihasa Ramayana* ini diberikan oleh Sri Rama kepada Wibhisana, yaitu adik Rahwana sebagai Raja Alengkapura untuk menggantikan kakaknya, yaitu Rahwana yang gugur dalam perang melawan Sri Rama. Kedelapan deva tersebut adalah (1) Deva Indra, (2) Deva Yama, (3) Deva Surya, (4) Deva Chandra, (5) Deva Vayu, (6) Deva Kuwera, (7) Deva Baruna; (8) Deva Agni.

Politik dan Penghancuran Hakikat Kemanusiaan

1. Politik Pandita Berjubah Singa

Sampai saai ini manusia baik manusia Barat apalagi manusia Timur masih sebagian besar menganut sikap *paternalistik* yang memandang bahwa seorang bapak atau seorang pemimpin sebagai panutan yang harus dicontoh dan dipatuhi perintahnya. Akhir-akhir ini muncul ketidak-patuhan sebagian masyarakat kepada pemimpinnya bahkan menghina pemimpin disebabkan karena adanya pemimpin liar (inskonstusional) yang menjadikan

dirinya sebagai pemimpin liar dan juga memimpin orang-orang liar. Kepemimpinan orang-orang liar dan tidak sabar tersebut menggunakan agama (suatu hal yang sangat sensitif) sebagai pembenaran atas keliarannya dan juga tema kebebasan berserikat sesuai UU dan HAM sebagai pledoinya untuk menurunkan pemimpinnya. Kesadaran rendah semacam itu akan menciptakan kekacauan politik yang tidak dapat diramal dengan Teori Probabilitas Matematik; tidak bisa ditanggulangi, sebab kekacauan itu telah berjalan sesuai teori *Chaos* atau teori 'Ketakteraturan' atau 'Kekacau-balauan' dan terus meningkat sesuai dengan rumus Entalphi.

Ada perihal penting yang harus diperbuat oleh para ksatria intelektual religius atau akademisi religius yang belum dikebiri; atau para intelektual yang tidak mandul untuk berteriak dengan kreas menggunakan kecerdasan otak kiri dan otak kanan untuk memperingati para politikus-politikus busuk yang menghancurkan tatanan kemanusiaan. Teriakan itu tidak perlu dengan mulut menganga seperti harimau yang ingin menyergap kijang, cukup berbicara dengan mulut pena dengan mengutip rujukan yang diambil dari pustaka suci. Catatan penting yang harus diingat oleh para kritikus intelektual sebelum mengayunkan penanya, adalah 'apakah dirinya tidak sedang berselingkuh atau melacurkan dirinya kepada pelacur-pelacur politik. Jika tidak sedang berselingkuh atau melacurkan diri dalam bidang politik, maka suarakan *sloka* berikut:

*yad-yad àcarati ùreùphas tat-tad evetaro janaà,
sa yat pramaòaj kurute lokas tad anuvartate*
(Bhagavadgita III.21).

'Apapun juga kebiasaan yang baik itu dilakukan (oleh orang besar atau tokoh), maka orang lain (masyarakat umum) juga akan mengikutinya; teladan apapun yang dilakukannya, maka (seluruh) dunia bahkan akan mengikutinya'

*na buddhi-bhedañ janayed ajñanañ karma-saòginàm,
joñayet sarva-karmaòì vidvàn yuktaà samàcaran.*
(Bhagavadgita III.26)

‘(karena itu) maka mereka yang (dianggap) bijaksana (tokoh) jangan membingungkan orang awam yang masih terikat (berharap akan pahala) atas kegiatan kerja; melainkan (para tokoh) seharusnya mengajak (memotivasi) semuanya untuk bekerja keras dan bekerjasama atas dasar itu (rasa *bhakti*).

Demikian seharusnya para tokoh politik yang dianggap sebagai orang besar yang senantiasa memberikan contoh dan teladan yang bijaksana. Bukan sebaliknya mempertontonkan sifat-sifat binatang dengan menyebar hoax, dengan *ngoceh* atau menggonggong tidak karuan seperti anjing berkelahi berebut tulang tanpa isi seraya menganggap diri paling suci-murni dan menuding orang lain berbuat kejahatan yang hanya layak menghuni neraka. Politikus-politikus seperti ini tidak lain adalah penjelmaan singa yang menggunakan jubah pendeta. Ketika politikus sudah seperti singa yang berjubah suci, maka singa politik itu memiliki hak yang legal menurut UU Singa atau Perpu Singa untuk menyantap daging manusia suci di atas altar yang suci. Benar-benar tontonan politik yang sesungguhnya sama sekali tidak layak tayang. Tetapi, kembali kepada hakikat era Kaliyuga bahwa kejahatanlah yang unggul dan kebenaran harus babak-belur. Sehingga subhasita Veda dalam *Mundaka Upanishad* III.1.6 (Radhakrishnan, 2008:538) yang menyatakan *satyam eva jayate* itu tidak boleh diartikan hanya dengan arti bahwa ‘pada akhirnya kebenaran pada akhirnya pasti menang’. Tetapi di era politik yang anomaly saat ini, maka *subhasita Veda satyam eva jayate* itu harus diartikan bahwa ‘kebenaran itu pada akhirnya menang dan sebelum meraih kemenangan maka kebenaran harus siap babak-belur’.

2. Politik Semangka Berdaun Sirih

Sejak perang besar keluarga Bhàrata (*Mahàbhàratayuddha*) berlangsung pada tahun tahun 3.138 S.M., merupakan akhir dari era *Dvāparayuga* hal itu artinya bahwa dunia sudah masuk ke era *Kaliyuga*. Keterangan ini diperoleh berdasarkan bukti prasasti Aihole yang dikeluarkan oleh raja Puleskin II. Pada era ini juga

terjadi peristiwa penting yaitu penobatan raja Pariksit, cucu Arjuna berlangsung pada tanggal 18 Februari 3.102 S.M. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli Astronomi India yang sangat terkenal bernama Aryabhata. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Maharsi Garga, Varamihira, dan Kalhana (Titib, 1996:7).

Sejak Pariksit dinobatkan itu, maka era *Kaliyuga* telah dimulai, suatu zaman yang kerap disimbolkan sebagai zaman besi berkarat atau juga disimbolkan sebagai meja yang kehilangan tiga kakinya. Jadi dapat dibayangkan bagaimana sulitnya menggunakan atau menempatkan meja yang berkaki satu; bahkan kadang kala menempatkan meja berkaki empat saja susah mencapai keseimbangan apalagi meja berkaki satu. Demikianlah perumpamaan tentang bagaimana sulitnya menegakkan dharma atau kebenaran di era *Kaliyuga* ini. Kepalsuan-kepalsuan, atau perihal yang abnormal, aneh, sesuatu yang menyimpang dari hal yang sepatutnya, lelaki berambut panjang, tetapi wanita berambut pendek bahkan gundul. Wanita mengejar lelaki, dan lelaki lari ketakutan dikejar wanita, guru mencabuli muridnya dan murid membunuh guru, dan berbagai hal-hal aneh terus terjadi dan membanjiri kehidupan manusia. Karena keanehan-keanehan, keabnormalan bahkan kejahatan telah dimaklumi sebagai hal yang lumrah di era *Kaliyuga*, maka kejahatan-kejahatan atas nama agama juga seakan-akan legal untuk dilakukan.

Memperhatikan watak *Kaliyuga* yang demikian amburadul (tidak karu-karuan) itu maka hal itu dijadikan sarana pembenaran kejahatan-kejahatan politiknya oleh sebagian politikus yang berotak *Kaliyuga*. Oleh sebab itu jangan heran jika yang dikatakan oleh para politikus A namun yang dilaksanakan N bahkan Z, itulah kepalsuan yang diciptakan sendiri oleh manusia. Sehingga mirip alegori yang digambarkan oleh Bob Totupoli sebagai “buah semangka berdaun sirih”.

Teknologi Rekayasa Genetika Politik Pohon Rambutan Berbuah Durian

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak orang terpelajar yang memenuhi bumi ini, semakin hari semakin banyak sarjana dengan derajat gelar S1, S2, S3. Jika berjalan di jalan raya, di toko, super market, di mall, di pasar tradisional, di warung akan ditemukan orang-orang terpelajar dengan pendidikan tinggi dan gelar-gelar yang hebat. Singkatnya, melalui pencapaian pendidikan tinggi, sehingga manusia di seluruh dunia saat ini mencapai kemajuan teknologi canggih dalam berbagai bidang. Hal itu membuat hidup manusia dirasakan semakin mudah dan gampang dalam memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi, sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi tersebut mengapa tingkat kejahatan manusia juga sangat pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Agama seakan hanya membeo, agama tidak lagi menjadi pembimbing manusia-manusia berpendidikan tinggi yang menguasai teknologi tinggi. Agama hanya dijadikan sebagai alat pembenar kejahatan manusia yang berpendidikan.

Jika manusia mau jujur, sesungguhnya agama telah gagal membimbing manusia menjadi makhluk paling mulia, agama seakan telah menjadi alat untuk menyetujui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat intelektual. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pendidikan yang tidak disertai dengan pendidikan karakter yang baik. Pendidikan yang instan dengan sistem SKS (Satuan Kredit Semester) di seluruh dunia saat hanya berorientasi gelar dan ijazah (baca: buku *Sisya Sista: Pedoman Menjadi Sisya Mulia* dan buku *Acarya Sista: Guru dan Dosen yang Bijaksana*, keduanya karya Donder). Karena efek negatif dari sistem pendidikan yang buruk, maka sistem pendidikan mestinya diperbaiki. Untuk apa mencetak para sarjana dengan gelar tinggi-tinggi tetapi kualitas kejahatannya juga tinggi.

Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi yang semakin canggih, semestinya semua hal dapat direkayasa atau diciptakan, seperti rekayasa genetika terhadap tumbuhan dan binatang telah menciptakan tumbuhan yang cepat berbuah, selain

cepat berbuah juga buahnya semakin besar dan dan semakin banyak. Hasil rekayasa genetika pada binatang maka tercipta binatang-binatang unggul. Melalui hasil perkawinan silang dan atau teknologi cloning, banyak dihasilkan jenis bintang dan tumbuhan yang memiliki kualitas unggul. Konon melalui teknologi kloning manusia juga dapat dikloning dengan mengambil sedikit irisan bagian tubuh manusia yang kemudian akan melahirkan manusia dengan bentuk dan perilakunya sama persis dengan manusia yang diambil bagian tubuhnya. Artinya dengan teknologi kloning seakan manusia bisa dicopy dibuat duplikat atau kembarannya sebanyak yang dikehendaki. Kloning untuk digunakan pada manusia belum disetujui oleh semua pemimpin agama di seluruh dunia. Tetapi, jika seandainya teknologi kloning dapat melakukan rekayasa genetika *mindset* politik dari jahat menjadi bijaksana, maka kloning terhadap manusia semestinya direkomendasi oleh para pemimpin agama daripada agama diplintir untuk membenarkan kejahatan. Jika saat ini banyak orang mampu mencuci otak orang yang tadinya baik-baik bisa menjadi teroris, lalu mengapa tidak ada upaya mencuci otak orang-orang jahat menjadi orang bijaksana. Semua kondisi ini terjadi karena para pimpinan agama telah berkonfirmasi dengan para penguasa untuk membagi-bagi roti dan korsi kekuasaan, realitas ini terlihat dengan mata dan terdengar dengan telinga, tetapi tidak boleh dibilang-bilang. Panorama pemandangan dosa yang tidak elok ini sesungguhnya disadari dan dinikmati oleh para politikus *Kaliyuga* yang di otaknya hanya ada 3-ta (harta, tahta, dan wanita). Manusia-manusia politikus yang senafas dengan karakter *Kaliyuga* tidak takut dengan dosa dan hukum *karmaphala*.

Walaupun demikian semestinya seiring dengan kemajuan sains dan teknologi dewasa ini sudah semestinya para pakar bidang sains dan teknologi menciptakan teknologi rekayasa genetika politik. Sebagaimana judul sub-bab di atas tentang teknologi rekayasa genetika politik rambutan berbuah durian dimaksudkan agar para pakar di bidang sains dan teknologi berupaya menembus ketidakmungkinan-ketidakmungkinan

melalui suatu upaya yang keras dan sungguh-sungguh untuk menciptakan suatu teknologi yang dapat membuat manusia jahat menjadi baik; dapat membuat politikus licik menjadi politikus bijaksana. Jika semua hal yang dahulu dianggap tidak mungkin, namun segala ketidakmungkinan ternyata dapat terwujud, lalu mengapa tidak mungkin menciptakan teknologi rekayasa genetika politik yang sama mungkinnya untuk membuat pohon rambutan berbuah durian.

Kabinet Ketuhanan dan Teologi Politik Hindu

Ajaran Hindu sejak dahulu sampai saat ini, seorang raja atau pemimpin secara teologi dianggap sebagai titisan dewa. Karena itu siapapun pemimpin itu pasti memiliki kelebihan dibandingkan manusia pada umumnya. Walaupun konsep ini mungkin saat ini sudah dianggap using atau ketinggalan zaman, tetapi secara aksiologis, konsep kepemimpinan “teokrasi” ini cukup efektif untuk memaksa setiap warga negara untuk mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berbeda dengan konsep pemimpin dan kepemimpinan yang demokratis, apalagi demokrasi yang sudah kebablasan seperti sekarang ini, realitas tersebut “kadang membuat undang-undang dan atau peraturan pemerintah tidak memiliki wibawa. Melalui tema-tema demokrasi, maka orang-orang entah berpendidikan atau tidak seakan-akan boleh ngomong apa saja dengan alasan hak kebebasan berpendapat. Tema-tema hak kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat itu menyebabkan banyak orang seperti gila yang ngomong tidak dipahami apa yang diomongkan. Setelah tersandung menjadi tersangka, lalu ia mengklarifikasi bahwa bukan itu yang dimaksud. Ia akan berkelid dengan alasan ada kesalahpahaman dan memahami konteks; berkelid menyatakan tidak melakukan makar tetapi niat dan ucapan serta tindakan adalah makar. Untuk menanggulangi kekacauan praktik demokrasi, maka keyakinan terhadap pemimpin (raja atau presiden) sebagai wakil Tuhan (Guru Wisesa) tampaknya perlu dipertimbangkan kembali.

Tema-tema demokrasi yang menyalahgunakan hakikat kebebasan mengeluarkan pendapat dan senantiasa membela mati-matian kesalahpahaman seperti itu harus disika atau dibasmi, jika tidak akibatnya banyak sekali unsur pimpinan akan ragu-ragu bahkan takut memberikan sanksi pada orang yang terbukti secara sungguh-sungguh telah berbuat salah. Karena ketidakberanian raja atau pimpinan untuk menjatuhkan sanksi kepada orang bersalah membuat bawahannya atau masyarakat justeru menghina, melawan bahkan memberontak. Ketakutan unsur para pimpinan semacam ini tidak akan ada jika para pemimpin menerapkan ajaran *Asta Vrata (Asta Brata)*. Ajaran ini mengajarkan bahwa raja atau pemimpin itu bukan saja harus berperilaku baik dan kaya raya, tetapi raja itu juga harus pemberani, adil dan jugas tegas dalam menegakkan kebenaran sehingga ia mampu menegakkan keadilan melalui perlindungan kepada orang-orang yang lemah sebagaimana diajarkan dalam pustaka *Manavadharmasastra* IX.303-311.

Jadi ajaran *Astra Brata* yang di dalamnya mengajarkan agar para raja atau pemimpin mencontoh karakter delapan dewa, yaitu *Indra, Sūrya, Vāyu, Yama, Waruma, Candra, Agni dan Prithivi*. Ideologi teologis demokrasi dari Kabinet Ketuhanan yang membagi habis seluruh kekuasaan secara adil dan demokratis demi sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan, atau kebahagiaan seluruh ciptaan, maka ideologi kabinet ketuhanan ini adalah ideologi kepemimpinan yang sangat ideal. Ideologi ini memberikan jaminan terhadap terwujudnya masyarakat adil, makmur, sejahtera, aman, sentosa. Keberhasilannya terletak pada seberapa jauh para pemimpin menguasai dan menerapkan ajaran demokrasi teologis kabinet ketuhanan sebagaimana diajarkan dalam agama Hindu ini.

Sukses Kekuasaan Berbasis Etika Politik Sri Rama

Para politikus yang ingin berkuasa sesuai *dharma* yang akan tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan *dharma* atau pahlawan kebajikan, maka amat penting memahami kisah perjalanan politik

yang dialami oleh Sri Rama. Beliau adalah *avatara* Vishnu yang turun ke dunia untuk menegakkan *dharma*. Tetapi tugasnya tersandung oleh sumpah ayahnya kepada ibu tirinya, walau demikian Sri Rama tetap tegak dalam *dharma* dan melindungi sumpah ayahnya dengan jalan melepaskan jabatannya sebagai raja sesuai dengan permintaan ibu tirinya, yaitu Kaikeyi yang melahirkan adik tirinya, yaitu Bharata. Sri Rama walaupun berhak dan sah menduduki jabatannya sebagai raja, namun dengan ikhlas Sri Rama menyerahkan jabatannya.

Dasarata ayah Sri Rama menyaksikan kemuliaan Sri Rama itu, membuat ia merasa sangat berdoas, karena itu ia merasa sangat menyesal dengan sumpahnya. Kemuliaan Sri Rama yang secara ikhlas meletakkan jabatannya sebagai raja dan diserahkan kepada adiknya, yaitu Bharata, tetapi Kaikeyi sangat terkejut karena ternyata Bharata bukannya merasa senang menerima jabatan sebagai raja, Bharata menolak keras penyerahan jabatan tersebut dan hal itu diyakini sebagai wujud ketidakadilan ibunya, yaitu Kaikey terhadap Sri Rama. Akhirnya, Bharata seorang adik yang memiliki kearifan hampir sama atau sederajat lebih rendah sedikit dibandingkan dengan Sri Rama malah justru memarahi ibunya seraya mengutuk ibu kandungnya dengan kata-kata: "lebih baik aku lahir dari perut serigala daripada lahir dari perut ibu Kaikey". Tetapi, Sri Rama demi untuk menyelamatkan sumpah suci ayahnya, Sri Rama membujuk agar mau menerima tahtah kerajaan. Melalui sebuah dialog yang etis-dialogis-teologis, Sri Rama mampu membujuk adiknya yaitu Bharata menggantikan dirinya sebagai raja. Bharata mengajuka syarat bahwa ia hanya mau menjadi simbol Sri Rama, ia akan memimpin kerajaan atas nama Sri Rama. Setiap ia akan hadir dalam suatu acara sebesar apapun ia akan menjunjung sandal Sri Rama sebagai symbol bahwa Sri Rama hadir dalam acara tersebut dan Bharata tidak pernah duduk di kursi tahtah kerajaan. Semua rakyat memuji kemuliaan Bharata yang tidak mau menggulingkan pimpinan atau raja yang sah.

Kisah ini sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan situasi politik kepemimpinan saat ini. Politik kepemimpinan dewasa ini penuh dengan intrik-intrik dengan harapan menjatuhkan kepemimpinan yang sah. Hal ini disebabkan karena dunia politik kepemimpinan dewasa ini lebih banyak dihuni oleh orang-orang yang jelas-jelas dan terbukti secara sah melakukan kejahatan pidana korupsi, kejahatan perdata, kejahatan kesusilaan, dan kejahatan kemanusiaan, dan lainnya, tetapi mereka tetap juga mereka gelur-gelur menuding orang-orang yang baik sebagai orang jahat dan kejahatan dirinya dianggap sebagai kemuliaan dengan motif ingin menjadi pemimpin yang berkuasa. Betapa kotornya isi kepala sebagian politikus sekarang ini. Bagaimana preman-preman jahat bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, bahagia, aman dan sentosa?

Berdasarkan uraian realitas dunia perpolitikan yang *chaos* (kacau-balau) semacam sampah yang terhampar dan bertaburan di atas lautan yang telah mengotori samudera luas sebagai tempat suci untuk mengambil *tirtha amrtha*, maka harus ada strategi sistematis yang direncanakan secara matang untuk mencetak kader-kader pemimpin yang memiliki kadar kemanusiaan yang tinggi dan mengurangi kadar kebinatangannya. Salah satu, strategi dapat digunakan yaitu dengan cara hanya memberikan sebutan atau julukan “mhaluk paling mulia” kepada orang yang memiliki kadar kemanusiaan yang tinggi. Kepada orang-orang pelaku kejahatan harus ditempelkan nama atau predikat sebagai binatang intelektual. Hal ini akan dapat mencegah kejahatan manusia.

Perbaiki Dunia Perpolitikan Melalui Strategi Duri Ditusuk Duri

Berdasarkan ilmu kedokteran, bahwa kanker yang tumbuh pada bagian tubuh manusia yang sudah mencapai stadium akut, maka tubuh itu harus diamputasi (dipotong). Mau tidak mau, terima atau tidak terima, maka tindakan memotong bagian tubuh yang terkena kanker itu harus dilakukan oleh seorang dokter. Demikian pula orang suci menyatakan bahwa ketika seseorang masuk dalam hutan belantara dan di sana ternyata telapak kaki tertusuk oleh

duri, dan apa bila durinya hanya kecil saja dan menusuknya tidak terlalu dalam, maka cara mengeluarkannya cukup dengan cara memejet bagian telapak kaki yang tertusuk duri itu. Tetapi, jika telapak kaki tertusuk oleh duri yang besar dan masuk jauh ke dalam telapak kaki, maka cara mengeluarkannya harus mencongkel dengan duri yang besar juga. Bila perlu duri yang digunakan adalah duri yang lebih tajam, lebih kokoh, dan lebih besar daripada duri yang menusuk telapak kaki.

Duri harus dicongkel dengan duri, hal ini juga sebagai alegori bahwa pada suatu saat jika kejahatan telah memuncak melampaui batas, maka orang-orang baik atau orang-orang bijaksana mesti menggunakan strategi pemberangusan terhadap kejahatan. Sri Krishna *avatar* memberikan contoh atas kejahatan Si Supaya yang selalu menghina perbuatan Sri Krishna. Secara berkala Sri Krishna telah memperingatkan agar kejahatan Si Supala tidak melampaui batas, Sri Krishna menyatakan agar Si Supala tidak menghina hingga melampaui hitungan ke-100 kali, jika sampai batas hitungan ke-100 itu dilampaui, maka dengan terpaksa Si Supala harus mati di tangan Sri Krishna. Ternyata si Supala dasar orang congkak dan bebal, ia menghina Sri Krishna hingga hitungan ke-100 kali itu, sehingga Sri Krishna terpaksa harus mengeluarkan chakra sudharsana untuk melenyapkan kejahatan yang bersarang di kepala si Supala dengan cara memisahkan atau memenggal kepala si Supala. Maka tewaslah salah satu sumber kejahatan itu.

Negara dengan pemerintahan sah yang dilandasi oleh sistem pemerintahan demokratis dan jauh dari pemerintahan otoriter yang dilengkapi dengan aparatur Negara yang kuat dan lengkap harus memberi hukuman yang sepadan sesuai dengan UU yang berlaku kepada penjahat baik yang berasal dari dalam negeri apalagi berasal dari Negara lain. Hanya melalui penegakkan hukum secara tegas akan tercipta kondisi politik Negara yang kondusif sehingga Negara mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara aman. Terminologi pendekatan keamanan bukan berarti Negara bersifat ditaktor.

Tetapi, Negara harus menegakkan keamanan untuk membangun dan melindungi rakyatnya.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kondisi perpolitikan Indonesia dan perpolitikan dunia saat ini sudah sedemikian buruknya. Politik seakan telah mengabaikan kebijakan. Sehingga politik tanpa prinsip, *money* politik, politik identitas dengan menggunakan tameng agama untuk melindungi kejahatan-kejahatan politik sudah patut diperbaiki oleh para intelektual yang masih ingin mendapat predikat sebagai mahluk paling mulia. Harus ada upaya-upaya rekayasa semacam transformasi genetika mental politik agar terwujud perpolitikan bangsa yang elok ditonton. Harus ada rekayasa genetika *mindset* politik dari *mindset* politik yang buruk bisa diubah menjadi *mindset* politik yang baik; seperti hasil rekayasa genetika pada tumbuhan yang dapat menanggulangi fenomena ajaib semangka berdaun sirih dengan membuat fenomena tandingan dengan cara menjadikan pohon rambutan politik berbuah durian politik. Juga ada upaya rekayasa genetika yang mengubah hewan politik dari singa politik berjubah bisa menjadi *Ksatriya* Parasu Rama politiknya berkapak kebijaksanaan.

Kesimpulan di atas berarti bahwa harus ada upaya intelektual seperti upaya yang dilakukan oleh para filosof Aristoteles, Plato, pada zaman purba. Jika manusia-manusia purbakala mampu berpikir besar, mengapa manusia post-modern justru mundur. Harus ada upaya intelektual kampus sebagai pusat dan puncak peradaban untuk membuat sebuah "Mega Proyek" untuk memperbaiki kualitas perpolitikan Indonesia carut-marut dengan *hoax*. Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjunjung tinggi agama, tetapi perilaku perpolitikan para politikus Indonesia walau menggunakan tema atau identitas agama, tetapi sangat malu untuk ditonton oleh anak kecil (*malu-maluin kata anak-anak kecil*). Perbaikan harus dilakukan oleh para akademisi kampus karena kampus sebagai tempat, pusat dan puncak peradaban manusia. Intelektual kampus harus membekali

pengetahuan dan contoh perilaku bijaksana kepada para politikus. Para intelektual akademik harus jujur menyelenggarakan pendidikan, sikap nyontek, mencuri tugas orang lain, plagiat, minta dibuatkan (artikel, makalah, dan jurnal) dll., perilaku tidak bermutu semacam ini tidak boleh ditunjukkan di lingkungan kampus. Jika para akademisi menerapkan praktik-praktik politik yang licik, walaupun kecil-kecilan, maka dunia akan mengikuti.

Daftar Pustaka

- Aurobindo, Sri. 1986. *Isha Upanishad*. Tamil Nadu: Lotus Press.
- Donder, I Ketut, 2004. *Sisya Sista: Pedoman Menjadi Siswa Mulya*, Surabaya: Paramita
- Donder, I Ketut, 2008. *Acarya Sista: Guru dan Dosen Bijaksana*, Surabaya: Paramita
- Donder, I Ketut, 2015. "Teologi Politik dalam Kepemimpinan Hindu: Kepemimpinan Tri Hita Karana". *Makalah Seminar Nasional Denpasar*, Universitas Warmadewa
- Drucker, A. 1988. *Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Discourses on the Bhagavad Gita*, Prashanti Nilayam: Sri Sathya Sai Books and Publications Trust
- Gautama, Ki Guru Pasek Budha, 2012. *Panuntun Malajah Wirama Kakawin Ramayana*, Marx, Groucho. 2015. *Politics Quotes*. Dalam <http://www.goodreads.com>. Diunduh: 02-10-2015
Surabaya: Paramita
- Gautama, Ki Guru Pasek Budha, 2012. *Panuntun Malajah Wirama Kakawin Ramayana*, Surabaya: Paramita
- Gupta, Gauri Shankar. 2012. *Unraveling mysteries of Life Modern Science and Ancient Wisdom*. Zoltán Gyimesi & Kornél Králik.
- Kadjeng, I Nyoman dkk., 2003. *Sarasamuscaya*, Surabaya: Paramita
- Kautilya, 2000. *The Arthashastra*. London: Penguin.
- Nazareth, Pascal Alan. 2013. *Keagungan Kepemimpinan Gandhi*. Denpasar: Ashram Gandhi Puri
- Nila, K. 1995. *Santi Parwa 1*. Denpasar: Upada Sastra.

- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004. *Manavadharmasastra*, Surabaya: Paramita
- Radhakrishnan, S. 2007. *Bhagavad-gita*. Surabaya: Paramita.
- Radhakrishnan, S. 2008. *Upanisad-upanisad Utama*, Surabaya: Paramita
- Radhakrishnan, S. rept. 2010. *The Principle of Upanisad*, Uttar Pradesh: HarperCollins Publisher
- Radhakrishnan, S. rept. 2014. *The Bhagavadgita*, Uttar Pradesh: HarperCollins Publisher
- Suwantana, I Gede. 2012. *Gandhi Giri Ajaran Mahatma di Bali*. Denpasar: Ashram Gandhi Puri.
- Titib, I Made, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Surabaya: Paramita
- Vivekananda, Swami. 2011. *My Idea of Education* (compiled by Dr. Kiran Walia), Hyderabad: Vivekananda Institute of Human Excellence
- Widnya, I Ketut, tt. Makalah “Politik Mesti Membangun Perabadian”, tidak diterbitkan

Website:

- Mahabharata-VOL-9 <http://www.holybooks.com/wp-content/uploads/Mahabharata-VOL-9.pdf>
- Artha shastra (eng) - [http://merki.lvvedas.com/Artha%20shastra%20\(eng\).pdf](http://merki.lvvedas.com/Artha%20shastra%20(eng).pdf)
- Arthashastra_of_Chanakya_-_English - https://scsboa.com/books/Arthashastra_of_Chanakya_-_English.pdf
- Juliana, Pande. 2012. *Asta Bratha—Ajaran Kepemimpinan menurut Hindu* (dalam <https://pandejuliana.wordpress.com>). Diunduh: 03-10-2015
- Kautilyas_Arthashastra_A_Recognizable_Source_of_t - https://www.researchgate.net/publication/293012145_Kautilyas_Arthashastra_A_Recognizable_Source_of_the_Wealth_of_Nations/download

KautilyasArthashastra -

https://www.researchgate.net/publication/323923178_Kautilya's_'Arthashastra'_and_Modern_Economics/download

Marx, Groucho. 2015. *Politics Quotes*. Dalam

<http://www.goodreads.com>. Diunduh: 02-10-2015

monograph20 - <https://sida.insystemfiles.com/monograph20.pdf>

Political Values in Shantiparva 08_chapter 4 -

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/95242/808_chapter%204.pdf

ppssastri-shantiparva-part1 -

<http://www.dvaipayana.net/books/ppssastri-mbhppssastri-shantiparva-part1.pdf>

Summray of Shnatiparvba:

<http://www.rsvidyapeetha.ac.in/mahabharathasummaryeng12.pdf>

https://csboa.com/eBooks/Arthashastra_of_Chanakya-English.pdf

POLITIK HINDU, ANTARA NATURAL DAN MORAL

I Gede Suwantana*

Pendahuluan

Hindu tidak tabu politik. Teks Manawadharma Sastra, Niti sastra, Artha Sastra dan yang lain menjustifikasinya. Banyak tokoh spiritual dengan landasan ajaran Hindu seperti Maharsi Chanakya, Mahatma Gandhi, dan yang lainnya konsisten berjuang di ranah politik tanpa mesti kehilangan atau menurunkan tingkat kesuciannya. Meskipun banyak ajaran yang mengajarkan bahwa orang yang sedang berproses dalam perkembangan spiritual meski menghindari politik, namun bergerak di ranah politik bukanlah sebuah larangan. Mungkin dalam sebuah tradisi (perguruan spiritual) tertentu memiliki sistem atau tata cara yang melarang seseorang yang telah mencapai tahapan tertentu untuk terjun ke dalam politik praktis. Seperti misalnya tradisi kesulinggihan di Bali sangat melarang terjun ke dalam politik praktis jika telah melaksanakan upacara dwijati dan menjadi sulinggih. Namun, itu adalah aturan tradisi yang harus diikuti jika mereka berada pada sistem tersebut. Sementara itu, kesadaran spiritual adalah sesuatu yang universal, baik mereka yang berada pada sistem tertentu itu atau tidak. Hindu memberikan kebebasan untuk memilih. Jika memang memilih untuk terjun ke politik praktis, mereka mesti tidak memasuki kedudukan khusus tertentu di dalam sistem keagamaan seperti model kesulinggihan itu. Meskipun demikian siapapun mereka mesti tetap berada dalam kesadaran spiritualnya.

Permasalahan pokok dalam politik Hindu bukanlah itu, karena hanya bersifat teknis. Yang menjadi pokok justru mengenai bagaimana politik itu mestinya berjalan. Maksudnya, ada beberapa

* Dosen IHDN Denpasar dan Sekretaris Prodi Magister Brahma Widya Pascasarjana IHDN Denpasar. Penulis dapat dihubungi melalui email: gedesuwantana@gmail.com

kriteria yang harus dipertimbangkan dalam kehidupan politik. Beberapa diantaranya adalah *pertama*, siapa dari mereka yang mau terjun ke dunia politik praktis? *Kedua*, apa yang diperjuangkan di dalam dunia politik tersebut? Dan *ketiga*, bagaimana mestinya mereka melakukan perjuangan itu? Saat bertanya siapa, disini melingkupi kriteria orang yang layak masuk ke dunia politik, apa latar belakang, pendidikan, karakter dan ketentuan lainnya. Pertanyaan tentang apa yang diperjuangkan ini menyangkut isi dan tujuan dari perjuangan di dalamnya. Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk terjun ke ranah politik, dia juga mesti tau apa yang mesti dilakukan dan kemana arah yang akan dituju secara benar. Kemudian, masalah bagaimana politik dijalankan lebih pada sebuah strategi bagaimana perjuangan itu diambil. Hindu memberikan banyak tentang hal ini dan sangat layak untuk direnungkan.

Pondasi dari pemikiran tentang politik Hindu yang terpenting adalah dialektika filosofis yang ada di dalamnya. Menurut Hindu, siapapun mereka, apapun yang diperjuangkannya, apapun strategi yang digunakannya, politik akan mengarah pada dua jalur yang berbeda. Pertama adalah jalur moral-transendental dan kedua jalur natural. Moral transcendental artinya, mereka berjuang dalam keluasan kesadarannya dan tujuannya adalah untuk meraih keluasan tersebut secara makro. Sementara natural maksudnya, politik yang berkembang sesuai dengan naluri manusia, yakni keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk kaya dan keinginan untuk menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan di dalamnya. Dunia politik pada prinsipnya adalah pertarungan antara kedua sifat dan sikap manusia ini. Kemenangan sebuah perjuangan politik ditentukan oleh kedua pondasi ini.

Pembahasan

Mahatma Gandhi merupakan politikus yang mengedepankan nilai-nilai moral (Suwantana, 2013). Dirinya memandang bahwa politik adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk meraih

sebuah kebenaran bersama. Perjuangan manusia pada prinsipnya adalah meraih kebebasan. Politik adalah salah satu alat yang paling efektif untuk membebaskan manusia dari berbagai sistem tirani yang mengungkungnya selama ini. Penjajahan, perbudakan, eksploitasi, hegemoni, ketimpangan sistem sosial dan yang sejenisnya yang telah mengakar di masyarakat dapat dilawan dengan pendekatan-pendekatan politik. Bagi Gandhi politik dalam hal ini bukan dalam rangka memusuhi mereka, melainkan berupaya untuk merangkul dan menyadarkan mereka-mereka baik yang nyaman sebagai penjajah atau penguasa dan yang ternyamankan sebagai budak atau pihak terjajah bahwa kehidupan seperti demikian bukanlah kehidupan yang merdeka, egaliter dan berperikemanusiaan (Nazareth, 2013). Dalam tataran pemikiran yang lebih tinggi, kehidupan manusia pada prinsipnya adalah sama, yakni sama-sama makhluk hidup yang merdeka, saling mengasihi dan menyayangi, bukan manusia yang saling menguasai dan memusuhi. Makanya, senjata perjuangan Mahatma Gandhi bukanlah persenjataan mutahir, melainkan tanpa kekerasan (*ahimsa*), kebenaran (*satya*), dan welas asih (*karuna*).

Manusia akan mampu melihat orang lain sebagai dirinya hanya ketika dia memiliki kesadaran diri yang luas. Gerakan politik Gandhi dalam hal ini sesungguhnya adalah sebuah upaya terus-menerus untuk menyadarkan manusia akan hakikatnya yang sejati. Tujuan ultimate politik adalah bangkitnya kesadaran manusia sehingga mereka mampu melihat dirinya pada orang lain dan orang lain pada dirinya. Sebagai konsekuensinya, terlahir rasa kebersamaan, toleransi, saling menghormati, kasih sayang, dan tolong menolong. Teks Niti Sastra secara konsisten menyarankan kepada semua orang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran dirinya, seperti berikut:

*Yavat svastho hyayam dehe Yavan mrtiyus ca duratah
Tavad atma-hitam kuryat Pranante kim karisyam*
(Chanakya Niti Sastra, IV: 4)

Sepanjang badan masih sehat dan kuat serta kematian masih jauh, lakukanlah sesuatu yang menyebabkan kebaikan bagi jiwa, yaitu proses kesadaran diri, sebab saat kematian menjelang apapun tidak bisa dilakukan (Sharma, 2014).

Apa yang disebut perjuangan politik sebenarnya adalah ini, karena tujuannya bersifat transenden. Sementara sesuatu yang terjadi dan yang dipahami secara umum oleh masyarakat tentang politik adalah segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan cara-cara memperolehnya. Sementara program kerja yang diajukan sebagai jargonnya merupakan barang dagangannya. Secara natural orang memiliki nafsu berkuasa yang tinggi dan politik adalah alat yang paling efektif untuk itu. Makanya tidak salah jika orang bersedia mengeluarkan banyak uang, walau berhutang hanya untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan. Makanya, tidak perlu terkejut jika tiba-tiba orang tiba-tiba baik dan bersahabat padahal sebelumnya tidak bersilaturahmi barang sekali. Tidak perlu terkejut pula jika akhirnya banyak dari mereka yang mendadak serangan jantung atau stress jika ambisinya tersebut tidak tercapai.

Jika orang terjun ke dunia politik oleh karena semata-mata nafsu untuk berkuasa, maka ia sebenarnya bukan melakukan perjuangan sama sekali. Apa yang dilakukan hanya sekedar memenuhi ambisinya. Politik hanyalah sekedar alat. Setiap makhluk pada prinsipnya memiliki ambisinya masing-masing. Singa memiliki ambisi untuk merobohkan kijang agar bisa bertahan hidup. Beberapa hewan berupaya mengusir hewan lain yang masuk ke wilayah teritorialnya. Baik hewan maupun manusia memiliki upaya yang sama agar bisa bertahan hidup, berkuasa, nyaman dan bereproduksi. Itu adalah sifat alami semua makhluk. Dalam ranah politik praktis sebagai warga yang berbangsa dan bernegara, berpolitik dalam upaya memenuhi kebutuhan natural tersebut bukanlah sebuah perjuangan yang istimewa karena setiap makhluk melakukannya tanpa kecuali. Tidak salah apa yang hadir kemudian adalah korupsi, kolusi, ambisi, nepotisme, kekacauan,

kebodohan, kegilaan, tidak peduli pada kepentingan bangsa, bekerja hanya untuk kepentingan sendiri dan kehancuran.

Oleh karena itu, kendaraan politik digunakan dengan benar apabila mampu bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama dalam bingkai kesadaran diri yang lebih mementingkan kepentingan umat manusia dibandingkan kepentingan dirinya. Orang bisa dikatakan berjuang di ranah politik hanya ketika mampu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan pada masyarakat. Seorang politikus sejati adalah ia yang mampu melahirkan individu-individu utama yang siap mengabdikan hidupnya demi nilai-nilai kemanusiaan seluruh bangsa. Satu-satunya kerinduan seorang politikus bukanlah kekuasaan, melainkan kesempatan mengabdikan untuk menjadikan kehidupan yang damai, sejahtera, bahagia dan merdeka.

Syarat Orang Boleh Berpolitik

Hindu memiliki persyaratan khusus tentang siapa saja yang boleh terjun ke dalam politik praktis. Oleh karena politik berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan yang mengatur orang banyak, maka diperlukan syarat khusus. Tidak semua orang yang punya uang yang bisa masuk ke ranah ini, meskipun secara pragmatis orang kaya sangat diperlukan untuk membesarkan partai. Kualitas diri sangat menentukan apakah seseorang itu layak untuk masuk ranah politik atau tidak. Sebab, jika orang yang masuk ke dalamnya kebanyakan yang tidak layak, dipastikan sistem ketatanegaraan akan mengalami pengeroposan dan tidak tertutup kemungkinan mengalami kehancuran. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa seorang yang terjun ke dalam politik praktis yang nantinya layak untuk memimpin dan memegang kekuasaan mesti memiliki beberapa kualitas kepemimpinan. Beberapa teks tersebut diantaranya adalah *sad Warnaning Rajaniti*, *Catur Kotamaning Nrpati*, *Tri Upaya Sandi*, *Pañca Upaya Sandi*, *Asta Brata*, *Nawa Natya*, *Pañca Dasa Paramiteng Prabhu*, *Sad Upaya Guna*, *Pañca Satya* dan yang lainnya.

Sad warnaning rajaniti menyebutkan sebagai berikut: *Abhigamika* (mampu menarik perhatian positif dari rakyat); *Prajña* (bijaksana); *Utsaha* (memiliki daya kreatif); *Atma Sampad* (bermoral luhur); *Sakya* (mampu mengontrol bawahannya); dan *Aksudra Parisatka* (mampu memimpin sidang dan menarik kebijakan yang tepat). *Catur Kotamaning Nrpati* terdiri dari: *Jñana Wisesa Suddha* (memiliki pengetahuan yang luhur dan suci); *Kaprahitaning Praja* (welas kasih kepada rakyat); *Kawiryana* (pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan); dan *Wibawa* (berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya). *Tri upaya sandhi* (disebutkan dalam Lontar Raja Pati Gondala) terdiri dari *Rupa* (mampu mengamati wajah rakyat); *Wangsa* (mengetahui susunan masyarakat agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan), dan *Guna* (mengetahui tingkat kepandaian dari rakyat).

Panca upaya sandhi (disebutkan dalam Lontar Siwa Buddha Gama Tattwa) terdiri dari: *Maya* (upaya mengumpulkan data atau permasalahan yang belum jelas duduk perkaranya); *Upeksha* (mampu meneliti dan menganalisis semua data-data dan mengkodifikasikan secara profesional dan proporsional); *Indra Jala* (mampu mencari jalan keluar setiap persoalan); *Wikrama* (melakukan upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan); dan *Logika* (mengedepankan pertimbangan-pertimbangan logis dalam menindak lanjuti masalah). *Asta brata* (disebutkan dalam Manawadharma Sastra, IX. 303 dan ditegaskan dalam Kakawin Ramayana XXIV. 52) terdiri dari: *Indra Brata* (seperti Dewa Indra atau Dewa hujan, yakni pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdikan untuk rakyat); *Yama Brata* (menegakkan keadilan bagaikan Sang Hyang Yama); *Surya Brata* (memberikan penerangan bagaikan Surya); *Candra Brata* (tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan Candra); *Bayu Brata* (mengetahui pikiran atau kehendak rakyat); *Baruna Brata* (dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat laksana Baruna membersihkan segala bentuk kotoran); *Agni Brata* (bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis

bagaikan Agni); *Kvera* atau *Prthiwi Brata* (selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana bumi).

Nawa Natya terdiri dari: *Prajña Nidagda* (bijaksana dan teguh pendiriannya); *Wira Sarwa Yudha* (pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang); *Paramartha* (bersifat mulia dan luhur); *Dhirotsaha* (tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan); *Wragi Wakya* (pandai berbicara atau berdiplomasi); *Samaupaya* (selalu setia pada janji); *Lagawangartha* (tidak pamrih pada harta benda); *Wruh Ring Sarwa Bastra* (bisa mengatasi segala kerusuhan); dan *Wiweka* (dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk). *Panca Dasa Pramiteng Prabu* (dalam Lontar Nagara Kertagama) terdiri dari: *Wijayana* (bijaksana dalam setiap masalah); *Mantri Wira* (pemberani dalam membela negara); *Wicaksananengnaya* (sangat bijaksana dalam memimpin); *Natangguan* (dipercaya oleh rakyat dan negaranya); *Satya Bhakti Prabhu* (selalu setia dan taat pada atasan); *Wagmiwak* (Pandai bicara dan berdiplomasi); *Sarjawa Upasama* (sabar dan rendah hati); *Dhirotsaha* (teguh hati dalam setiap usaha); *Teulelana* (teguh iman dan optimistis); *Tan Satsna* (tidak terlihat pada kepentingan golongan atau pribadi); *Dibyacita* (lapang dada dan toleransi); *Nayakken Musuh* (mampu membersihkan musuh-musuh negara); *Masihi Samasta Bawana* (menyayangi isi alam); *Sumantri* (menjadi abdi negara yang baik); dan *Gineng Pratigina* (senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk).

Sad Upaya Guna (dalam Lontar Raja Pati Gondala) terdiri dari: *Siddhi* (kemampuan bersahabat); *Wigrha* (mampu memecahkan setiap persoalan); *Wibawa* (mampu menjaga kewibawaan); *Winarya* (cakap dalam memimpin); *Gascarya* (mampu menghadapi lawan yang kuat) dan *Starha* (menjaga hubungan baik). *Panca Satya* terdiri dari: *Satya Hrdaya* (jujur terhadap diri sendiri / setia dalam hati); *Satya Wacana* (jujur dalam perkataan / setia dalam ucapan); *Satya Samaya* (setia pada janji); *Satya Mitra* (setia pada sahabat); dan *Satya Laksana* (jujur dalam perbuatan).

Demikian juga seorang politisi mestinya adalah mereka yang karakternya telah tumbuh menjadi pohon yang kuat, berbuah manis dan lebat. Ada dua puluh tujuh buah karakter seorang politikus Hindu yang harus dimiliki sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad-gita (Putu Putra, 2016), yakni: kejujuran (*arjavam*); kebenaran (*satyam*); keberanian (*abhayam*); kepahlawanan (*sauryam*); tahan uji (*titiksa*); ketetapan hati (*sankalpa*); hidup sederhana (*tapasya*); hidup penuh semangat (*tejah*); pengendalian diri (*dama*); kebijaksanaan yang mantap (*samah samya*); tidak mencari kesalahan orang lain (*apaipunam*); rendah hati (*aminatvam*); tanpa kekerasan (*ahimsa*); tidak membenci (*advesta*); tidak marah (*akrodah*); tidak serakah (*alouptvam*); kedermawanan (*danam*); berterimakasih (*kritajna*); suci (*saucam*); pantangan seksual (*brahmacharya*); ketidakterikatan (*vairagya*); kesabaran (*ksantih*); pengampunan (*ksama*); welas asih (*karuna*); pertemanan (*maitri*); kelemahan-lembutan (*mardavam*); dan damai (*santih*). Demikianlah kualitas individu yang menjadi persyaratan pokok yang harus diperhatikan bagi seorang politikus.

Tujuan Politik

Landasan Politik Hindu adalah *Catur Purusa Artha*, artinya, orang yang terjun ke dunia politik harus memahami dengan benar peta jalan pemikiran Hindu tentang hidup beserta tujuannya. Menurut Hindu, orang yang lahir ke dunia ini pada prinsipnya adalah untuk menjalankan dharma-nya dengan benar. Secara natural manusia harus memenuhi kebutuhannya untuk makan, tidur dan berketurunan. Secara *transcendental* manusia mesti menggunakan kecerdasannya untuk mengembangkan kesadaran dirinya sehingga mampu melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti melayani, mengasahi, menciptakan perdamaian dan yang sejenisnya. Kedua jenis dharma ini mengantarkan mereka pada kebebasan (*moksa*). Kebebasan memiliki makna dua, yakni *moksartham jagadhita*, kebebasan individu (*moksa*), dan kesejahteraan dan kebahagiaan dunia (*jagadhita*). Dalam rangka menjalankan *dharma* guna mencapai *moksa* ini diperlukan

kekayaan materi (*artha*) dan kehendak atau niat atau nafsu (*kama*). *Artha* dan *kama* hanya alat bantu untuk meraih kebebasan. *Artha* dan *kama* digunakan di dalam dunia politik hanya untuk meraih tujuan tersebut, bukan sebaliknya politik digunakan untuk meraih kekayaan dan kesenangan. Bhagavad-gita mengatakan bahwa tujuan akhir orang adalah menyadari bahwa dirinya adalah Yang Tertinggi itu, dan benda material dan keinginan-keinginan di dalam diri harus digunakan secara efektif dan efisien (Osho, 2016).

Politik praktis mesti melahirkan *jagadhita*, yakni dunia yang adil dan makmur, sejahtera dan bahagia. Idealisasi ini mesti tetap menjadi pegangan sejak awal. Ini adalah visi Hindu tentang politik. Guna meraih visi tersebut politisi Hindu mesti secara konsisten memegang prinsip politiknya. Gandhi menyebut bahwa mereka yang berpolitik tanpa prinsip akan mendatangkan dosa sosial. Pemimpin mesti secara konsisten berupaya menciptakan *good government*, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, inovatif, saling hormat menghormati, menjaga keutuhan bangsa dan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Guna menciptakan pemerintahan yang baik, seorang pemimpin mesti memiliki kemampuan manajemen yang baik, mampu menempatkan orang secara benar (*right man on the right place*). Demikian juga ia mesti memiliki strategi pemerintahan yang jitu, mampu membuat perencanaan yang matang, menjadi eksekutor yang baik, memiliki kemampuan manajemen konflik, memiliki strategi alternatif jika strategi awal mengalami hambatan atau kegagalan, dan mampu memprediksi sebuah kejadian secara tepat melalui tanda-tanda dari apa yang terjadi secara riil di lapangan.

Strategi Politik Hindu

Strategi yang dimaksudkan adalah cara atau teknik bagaimana semestinya orang melakukan perjuangan di dalam politik praktis. Hindu memandang bahwa strategi tidak serta merta bicara *skill* yang bisa dipelajari dan dihafal secara tekstual. Hindu melihat bahwa strategi yang utama yang harus dimiliki adalah sesuatu

yang menjadi bagian dari dirinya sendiri, bukan hanya sebuah pengetahuan yang ditempelkan. Boleh dikatakan bahwa seorang politisi Hindu harus memiliki skill inheren, skill yang muncul dari pengetahuan, dan pengalaman. Yang termasuk dari skill inheren adalah taksu dan anugerah Ilahi. Skill yang muncul dari pengetahuan meliputi pemahaman atas peta politik dunia, pemahaman tentang dunia politik secara komprehensif, pengetahuan tentang ketatanegaraan, pengetahuan strategi dan skill komunikasi, memahami tentang kepartaian dan yang lainnya. Pengalaman akan muncul jika seseorang senantiasa ikut berperan aktif di dalam setiap kegiatan, mengikuti jenjang karier politik dari bawah.

Taksu atau Yoni menurut Hindu sangat penting, meskipun di dunia kontemporer ini tidak banyak yang memahaminya. Saat ini orang lebih sering menyebutnya sebagai bakat alam, sesuatu yang telah dibawa sejak lahir. Apapun sebutannya, hal yang satu ini sangat menentukan karena orang yang bekerja sesuai dengan Yoninya akan kelihatan pantas dan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Teks Bhagavad-gita mengatakan bahwa orang telah digariskan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan guna dan karmanya. Jika memiliki kelahiran Brahmana, maka pekerjaan yang berhubungan dengan kebrahmanaan adalah pekerjaannya, demikian juga bagi mereka yang Ksatria, Vaishya dan Sudra (Sankaracharya, 2014). Orang Bali menyebut bahwa pekerjaannya tampak metaksu apabila seseorang secara totalitas berada dan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Disamping taksu, anugerah Tuhan juga memegang peranan penting. Sehebat apapun orang berusaha, sebanyak apapun pengetahuan, pengalaman dan skill yang dikuasainya, jika Tuhan tidak berkenan, maka ia tidak akan bisa maksimal atau bahkan mengalami kegagalan. Anugerah Tuhan ini bisa dihubungkan dengan respon alam terhadap tindakan seseorang. Jika seseorang yang pribadinya sudah kelihatan kualified untuk terjun di bidang politik dan kemudian dia tampak sangat lihai

memainkan politik dan bekerja keras, namun Tuhan memiliki kehendak lain, dia tidak akan mampu mencapai puncak kariernya dalam kancah politik. Makanya, Bhagavad-gita secara tegas mengatakan bahwa agar seseorang tetap merasakan kebahagiaan, ia disarankan untuk tidak terikat dengan hasilnya. Setiap orang disarankan untuk fokus pada tindakannya dan membiarkan Tuhan yang bekerja untuk hasilnya (Yogananda, 2016). Teks Yoga Sutra Patanjali menyebutkan *Ishwara Pranidana*, yakni berserah sepenuhnya ke hadapan Tuhan, sebab hanya dengan itu, seseorang bisa berkembang kesadarannya (Bryant, 2009).

Skill yang bersumber dari pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, diskusi, belajar otodidak, penelitian dan yang sejenisnya. Pengetahuan ini bisa berupa konsepsional, filosofi maupun teknis. Skill ini akan bisa dimiliki hanya ketika seseorang mendapatkan pelajaran yang bersumber dari luar, baik dari mentor, buku, *expert*, maupun sumber lainnya. Seorang politisi harusnya terpelajar yang paham secara teori maupun praktik, tidak hanya kaya saja. Seperti halnya Arjuna di dalam kisah Mahabharata, secara individu dirinya adalah seorang Ksatriya dan untuk mengasahnya diperlukan seorang guru Drona sehingga skillful. Jadi seorang politisi yang sempurna adalah dia yang berkepribadian mantap dan yang ahli di bidangnya. Bhagavad-gita menyebutnya sebagai seseorang yang *Sthita Pradnya* (Chinmayananda, 2002).

Pengalaman berhubungan dengan jam terbang seseorang di dalam melakoni kehidupan politiknya. Seseorang yang Yoninya di bidang politik seharusnya sejak awal sudah berkecimpung di dalamnya, apakah itu di keorganisasian pemuda, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang banyak, ikut dalam kepanitiaan sebuah kegiatan dan terjun dari dasar di dalam politik praktis. Dengan pengalaman yang lama, seseorang dikatakan mapan sehingga posisinya layak diperhitungkan. Jam terbang ini pula yang menjadi medan ujian apakah antara Yoni dan skill yang dipelajari telah cocok. Jika orang telah nyaman di sana, maka antara

Yoni dan kemampuannya telah sesuai sehingga apapun rintangannya dia akan merangkak terus sehingga sampai pada puncak kariernya sebagai seorang politikus.

Simpulan

Hindu memberikan ruang yang sangat luas di bidang politik, baik mengenai sumber daya manusianya, skill atau strategi politiknya maupun tujuan yang hendak dituju dalam berpolitik. Satu hal yang pokok disini adalah politik hanyalah salah satu jenis kendaraan yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik. Melalui kekuasaan dalam hubungannya dengan pemerintahan negara bangsa, kendaraan politik ini bisa dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat yang merdeka, adil dan makmur. Dunia politik tidak bisa dipisahkan dari bidang kehidupan lainnya. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Siapapun dari mereka harus berpatokan dari prinsip Catur Purusa Artha di dalam menjalani bidang-bidang kehidupannya, tidak terkecuali di ranah politik praktis. Jadi, politik adalah bagian integral dari bidang-bidang kehidupan manusia di dalam upaya membangun kesadaran mereka ke arah yang lebih maju sehingga benar, moksartham jagathita bisa terwujud.

Masalahnya, politik ditumpangi oleh ambisi pribadi manusia-manusia yang terjun di dalamnya, yakni keinginan untuk berkuasa. Keinginan ini sangat kuat dan susah ditundukkan oleh karena late nada pada diri manusia, sehingga politik hanya dijadikan alat untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan, bukan politik digunakan sebagai kendaraan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini terjadi dimana-mana, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara untuk meraihnya. Uniknya, mereka yang terjun ke ranah politik adalah mereka yang telah mapan secara finansial alias kaya. Apa yang mereka cari dalam politik adalah kekuasaan dan ketenaran. Mereka tidak memperhatikan apakah kualitas dirinya telah sampai pada tingkat itu atau belum. Masalahnya siapapun tidak terlalu mempermasalahkannya itu, sebab secara pragmatis uang lebih

diperlukan ketimbang skill. Orang yang kaya kemudian masuk partai dan kemudian royal terhadap partai itu tentu secara otomatis diberikan kedudukan yang prestisius sehingga kesempatannya untuk meraih kekuasaan sangat tinggi.

Hindu mengatakan bahwa menggunakan materi atau kekayaan bukanlah sebuah masalah, sebab tidak ada apapun yang bisa berjalan dengan baik tanpa materi. Hanya saja, apapun bidang kehidupan yang dilakoni mestinya tidak boleh menyimpang dari teori dasar yang telah digariskan. Agar mampu mencipta, seperti halnya dalam dunia politik untuk menciptakan kesejahteraan dunia, hal yang utama dan pertama dipentingkan adalah Saraswati, yakni kemampuan dan pengetahuan. Setelah itu baru dipertahankan melalui Laksmi atau kekayaan. Jika keduanya ini berjalan secara tepat dan seimbang, dipastikan Sakti (kemampuan untuk memimpin) akan tumbuh.

Daftar Pustaka

- Bryant, Edwin F., 2009. *The Yoga Sutras of Patanjali*. North Point Press: New York.
- Chinmayananda, Swami. 2002. *The Holy Gita*. Chinmaya Mission Trush: Mumbai.
- Nazareth, Pascal Alan, 2013. *Keagungan Kepemimpinan Gandhi*. (Trans. I Gede Suwantana). Ashram Gandhi Puri-Indra Udayana Institute of Vedanta: Klungkung.
- Osho, 2016. *Gita Darshan*. Osho International Foundation: New Delhi.
- Pudja, Gde dan Sudharta, Tjokorda Rai, 1878, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra)*, Dit. Jen Bimas Hindu dan Departemen Agama RI, Jakarta.
- Putu Putra, Ngakan, 2016. *Membangun Karakter dengan Keutamaan Bhagavad-gita*. Media Hindu: Jakarta.
- Sankaracharya, Adi, 2014. *Bhagavad-Gita*. (Trans. Swami Gambhirananda). Advaita Ashrama: Uttarakhand.
- Sharma, 2014. *Complete Chanakya Neeti*. Manoj Publication: Delhi.

- Soewito, Santoso. 1980. *Ramayana Kakawin*. New Delhi: International Academy of Indian Culture, vol. 3.
- Suwantana, I Gede, 2013. *Gandhi Giri Ajaran Mahatma di Bali*. Ashram Gandhi Puri–Indra Udayana Institute of Vedanta: Klungkung.
- Yogananda, Sri Sri Paramahansa. 2016. *God Talks With Arjuna The Bhagavad Gita– Royal Science of God-Realization*. Yogoda Satsanga Society of India: Kolkata.

Lontar:

Lontar Raja Pati Gondala

Lontar Nagara Kertagama

Lontar Siwa Buddha Gama Tattwa

ANTARA POLITIK, PSIKOSOMATIS DAN YOGA: Refleksi Pembentuk Karakter Moral dan Spritual Sosial

I Gusti Made Widya Sena*

Pendahuluan

Manusia adalah bagian dari anggota kelompok. Latar belakang berdirinya kelompok-kelompok tersebut adalah karena manusia memiliki dua sifat yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Di satu sisi manusia ingin kerjasama namun di sisi lainnya manusia cenderung untuk bersaing dengan sesamanya. Di dalam kehidupan kelompoknya dan hubungan antar manusia yang terjadi didalamnya, pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai.

Menurut Budiardjo (1976: 33) adapun nilai-nilai tersebut terkategori menjadi delapan nilai, antara lain: kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, kejujuran dan keadilan serta keseganan. Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Masyarakatlah yang mencakup semua hubungan dan kelompok didalam suatu wilayah.

Dunia politik adalah dunia abu-abu, dunia dimana seseorang dapat mencapai tujuan yang diinginkannya melalui jalur partai ataupun jalur perseorangan. Sebagai salah satu simbol yang menguatkan tujuan tersebut tentunya adalah memiliki rasa dan kepentingan yang sama dalam membangun sebuah negeri. Walaupun didalamnya kepentingan itu kadang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi, waktu, kondisi, kebutuhan dan kebijakan yang diberlakukan.

* Dosen IHDN Denpasar dan praktisi Yoga Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: email: gusti_sena@yahoo.com

Saat ini kecendrungan politik tidak lagi dilihat sebagai kebebasan untuk memproduksi kebijakan dan keutamaan bagi kehidupan kolektif, melainkan lebih dipandang sebagai kesempatan yang disediakan oleh hak dasar yang melekat pada setiap manusia bebas. Politik akhirnya akan menjadi sangat konkret, yakni seolah-olah hanya kekuasaan itu sendiri (Haris, 2014: 16). Tentunya jika hal ini tidak disadari dengan baik, maka kondisi sosial masyarakat akan mengikuti perkembangan politik. Psikologi masyarakat akan terus mengalami perubahan naik dan turun, senang dan sedih, bahagia dan kecewa yang pada akhirnya akan berdampak pada karakter moral sosial, kepribadian, dan kesehatan tubuh dan jiwa pribadi maupun sosial.

Jika terus dibiarkan berlarut-larut maka tidak hanya praktisi politik saja yang dapat stress namun masyarakat juga akan mengalami hal yang serupa. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan mengancam kehidupan manusia secara makro. Untuk itu peran yoga sebagai jalan praktis-spiritual mengantarkan seseorang agar dapat melepaskan dan membebaskan dirinya dari berbagai belenggu pikiran yang dapat menyebabkan penyakit psikosomatis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat tulisan ini karena sebelumnya belum pernah ada tulisan atau artikel ilmiah terkait tema yang penulis angkat. Selain itu dengan menulis artikel ini diharapkan agar nantinya artikel-artikel ilmiah yang sejenis semakin banyak berkembang dan memberikan sumbangan bagi dunia sains, politik dan kesehatan.

Pembahasan

Politik Sosial

Di alam ini terdapat makhluk hidup yang belum berkembang dan tidak memiliki sel-sel saraf atau jaringan saraf, yang dimiliki sebagian besar adalah hanya menggunakan insting saja untuk melakukan segala aktivitas hidupnya. Manusia memiliki sel-sel saraf dan serabut saraf, namun mereka juga kadangkala berperilaku sesuai dengan insting mereka. Contohnya, seorang

anak kecil tersenyum dan mencakup kedua tangannya karena insting mereka. Dalam hal ini mereka tidak diminta oleh pengetahuan atau kecendrungan intelektual apapun yang memintanya untuk melakukan hal itu.

Senada dengan itu manusia merupakan makhluk hidup sosial kreatif yang dapat menciptakan sesuatu dalam setiap aktivitas yang dilakukannya demi kesejahteraan lingkungannya. Kontak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terjadi atas dua tindakan, yakni yang bersifat positif dan negatif. Artinya seseorang melakukan tindakan tidak saja atas kemauan atau egois melainkan atas keperluan yang harus ia lakukan. Semua tindakan itu memiliki makna dan tujuan dalam hidupnya.

Max Webber mengemukakan bahwa ada tujuan yang ingin dicapai saat seseorang melakukan tindakan. Contohnya ketika seseorang pergi ke sebuah mall, pasti memiliki tujuan atas tindakan yang dilakukannya, apakah untuk membeli barang ataupun hanya ingin melihat-lihat dan melakukan pengamatan suasana di mall. Tindakan tersebut pasti memiliki tujuan dalam meraih keinginan atas perbuatannya. Tujuan yang akan dicapai merupakan salah satu cara masyarakat untuk bisa melangsungkan kehidupan sebagai seorang manusia. Begitupula halnya dengan politik sosial.

Jika mengacu konsep di atas, maka hal ini dapat berbanding lurus dengan kondisi politik sosial saat ini. Politik yang hidup dan berkembang dewasa ini merupakan cerminan simbolisasi dari dua sisi mata uang, dimana satu sisinya memiliki "gambaran" sebagai simbol kesadaran dalam sikap berpolitik, dan pada sisi lainnya memiliki makna sebagai "nilai" tujuan dalam berpolitik. Kedua sisi ini walaupun berbeda namun memiliki akhir yang sama, yakni untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan tentunya kekuasaan politik. Terlepas di dalamnya politik digunakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintah dapat diperoleh, diterapkan dan dikelola dengan norma hukum yang berlaku demi kesejahteraan seluruh kelompok atau masyarakat yang dipimpinnya. Menurut Indraddin dan Irwan

(2016: 72), menguraikan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan tentunya ilmuwan politik menggunakan alat seperti partai.

Partai adalah salah satu jalan untuk mendapatkan tujuan atau kekuasaan. Ini menggambarkan bahwa tujuan dari politik adalah bagaimana orang bisa berkuasa dengan baik dan mencapai tujuan dari keinginan individu atau kelompok tersebut. Pengerahan massa dan kekuasaan didalamnya membawa kehidupan politik masuk ke dalam ranah sosial. Itu mengapa peran partai dalam menghubungkan idealisme personal dalam mencapai kekuatan dan kekuasaan politik menjadi media kendaraan yang sangat penting dalam menyalurkan dunia ide seorang politikus kepada masyarakat agar lebih dikenal dan dipilih oleh masyarakat hingga nantinya terpilih.

Salah satu ciri kehidupan politik sosial yang berkembang khususnya di Indonesia dewasa ini adalah kehidupan politik yang pada akhirnya mengarah pada konsensus atau kesepakatan bersama. Memang pada awalnya proses kehidupan politik sebagian besar yang terjadi di lapangan akan bermuara pada jalan konflik, yakni konflik antar pribadi, kelompok hingga sosial dalam tatanan verbal dan praktis. Hal ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan politik karena ketika politik masuk dalam ranah sosial maka politik akan masuk dan berbuah pada emosi masyarakat.

Segala jalan akan dilegalkan dan dimaksimalkan oleh lawan politik demi mendapatkan simpati dan suara dari kelompok pendukungnya. Pada umumnya untuk memperoleh simpati dan suara dari masyarakat dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan melakukan kampanye positif, melakukan kampanye negatif (*negative campaign*) dan dengan melakukan kampanye hitam (*black campaign*).

Kampanye positif artinya kampanye tentang program, yang dilakukan dengan menyebarluaskan info tentang apa saja program yang akan dilakukannya ketika terpilih nanti. Ini adalah bentuk kampanye yang benar, walaupun belum terbukti kebenarannya. Kampanye negatif adalah kampanye yang sebagian

besarnya selalu menonjolkan sisi negatif lawan politik agar publik juga mengetahui kelemahannya.

Sedangkan kampanye hitam adalah bentuk kampanye yang memberikan atau menggambarkan info tentang lawan politik yang tidak berdasarkan fakta yang akurat. Kampanye dengan cara ini sangat berbahaya, karena akan memperkeruh kondisi psiko-sosial masyarakat yang pada akhirnya akan mengakibatkan konflik sosial, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal seperti yang terjadi belakangan ini dengan menyebarkan berbagai hoaks dan fitnah di masyarakat.

Sejarah kehidupan politik di Indonesia menggambarkan betapa berbahayanya kampanye hitam ini jika dilakukan di bumi pertiwi. Karena kampanye dengan bentuk ini dapat menyebabkan keresahan dan ketidakpedulian sosial yang setiap saat dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Layaknya bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan kehidupan pluralis di Indonesia yang terbingkai Pancasila.

Mendapatkan simpati yang berujung pada perolehan suara dari masyarakat dan mengerahkan massa dalam mencapai keinginan seorang politikus adalah salah satu contoh bagaimana pola politik ini masuk dalam ranah sosial. Ada tiga komponen yang menunjang seseorang menggunakan gagasannya dalam politik sosial. Pertama adalah komponen masyarakat. Masyarakat adalah komponen utama bagi seorang politikus dalam menyebarkan gagasan dan menjadi perpanjangan lidah agar dirinya dapat terpilih, komponen kedua adalah dunia gagasan atau ide.

Komponen kedua memiliki peran yang tidak kalah penting karena melalui dunia ide atau gagasan seseorang akan dapat menyampaikan apa yang dikehendakinya sekalipun dengan cara menjatuhkan lawan politiknya. Komponen ketiga adalah unsur partai. Partai adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Partai digunakan sebagai kendaraan politik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi

politik, sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan sebagai manajemen konflik (Budiardjo, 1976: 164).

Komunikasi politik yang terjalin dalam ranah sosial hingga menyebabkan konflik pada akhirnya akan mencapai kesepakatan atau konsensus politik. Ini dikarenakan selain prioritas utamanya mengupayakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat juga didalamnya terdapat kegiatan lobi politik transaksional untuk memperoleh kekuasaan.

Politik-Stress-Psikosomatis

Menurut Gunawan (2012: 49), istilah psikosomatis pertama kali disebut oleh Flanders Dunbar di awal tahun 1940-an, tidak lama setelah Hans Selye mengenalkan konsep stress. Secara etimologi, kata psikosomatis berasal dari kata *psychosomatic* terdiri dari dua kata, yakni "*psyche* dan *somato* atau *soma*". *Psyche* secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya kehidupan, dan terjemahan bebasnya adalah jiwa atau pikiran dan *somato* artinya tubuh.

Artinya pikiran dan tubuh masing-masing. Jadi penyakit psikosomatis adalah penyakit-penyakit yang walaupun berasal dari jiwa, didiagnosis secara klinis melalui gejala somatik yang dimanifestasikan dalam tubuh. Dalam bahasa yang sederhana, psikosomatis adalah masalah pada pikiran-tubuh yang memiliki interaksi simultan dan saling mempengaruhi.

Pada umumnya, itu diyakini sebagai dampak emosi yang disebabkan oleh stress dan tensi dari kehidupan modern yang diterjemahkan ke dalam gangguan somatik. Sakit pada ulkus, saraf, jantung, migrain, asma, kepala pusing, kolitis, eksim dan gangguan sistem pencernaan adalah beberapa gangguan psikosomatis yang umumnya terjadi pada seseorang. Ini sangat memungkinkan terjadi pada seseorang yang hidup pada dunia ide dan politik.

Persepsi dan evaluasi pada situasi dapat meningkatkan emosi seseorang dan hal tersebut adalah bentuk ekspresi dari psikologi yang dikontrol oleh pikiran. Sejumlah struktur di inti otak

terlibat langsung dalam mengatur dan mengkoordinasikan pola aktivitas karakteristik dari rasa takut, marah, senang dan bahagia. Stress adalah bagian integral dari lembaran kehidupan yang alami. Sebagian terjadi karena kita terlalu berusaha keras untuk melakukan terlalu banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dan beberapa kesulitan lainnya berhubungan dengan kehidupan intern dan antarpersonal, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Menurut Lazarus dalam Nath (1992: 14), stress dapat digambarkan lebih sederhana sebagai jenis transaksi khusus antara seseorang dengan lingkungannya. Pandangan ini menempatkan penekanan yang sama pada tuntutan lingkungan dan ketrampilan individu. Dalam pengertian yang sederhana, stress mengacu pada keadaan yang menempatkan tuntutan fisik dan jiwa seorang individu dan reaksi emosional yang dialami dalam sebuah situasi atau kompilasi dari beberapa situasi. Banyak pemicu stress kecil dan tingkatan stress yang dapat meningkat hingga ratusan kali dalam sehari. Tanpa kita sadari ini adalah bagian dari hidup kita yang kita terima dalam keseharian hingga pada akhirnya menyebabkan gangguan psikosomatis.

Proses mengatasi stress dan kecemasan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia agar pikiran, tubuh fisik dan mentalnya kembali normal. Situasi apapun dimana perilaku seseorang dievaluasi oleh orang lain dapat mengakibatkan stress, bahkan dengan bangun di pagi hari saja dapat menyebabkan cukup stress bagi seseorang yang berkarier dalam panggung politik. Hal ini tentunya dapat menyebabkan seseorang tidak saja mengalami penurunan dalam kebugaran tubuh jasmaninya saja namun juga dapat menderita berbagai penyakit psikosomatis.

Jika menjadi seorang politikus tentunya stress adalah keadaan yang terbiasa terjadi dalam kehidupan politik. Keadaan ini akan semakin meningkat dan menumpuk melalui berbagai panggilan telpon, membangun relasi sosial, mengatur jadwal kampanye, mempersiapkan bahan presentasi, persaingan calon,

kampanye negatif (hoax), terpisah dari keluarga, tampil di depan umum, menyusun strategi kemenangan, kepanikan, cemas, sedih, marah dan bahkan ada beberapa yang menjadi gila saat tidak lolos adalah salah satu contoh diantara banyaknya sumber stress yang berpotensi dapat mengganggu pikiran dan berdampak negatif bagi jiwa seseorang.

Membangun Karakter Moral dan Spritual Sosial

Ada banyak sekali pendapat para ahli yang memberikan definisinya tentang moral. Seperti Chaplin dalam Ibung (2009:3) yang menjelaskan tentang moral, menurutnya moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum (adat kebiasaan) yang mengatur tingkah laku. Di sisi lainnya, Hurlock dalam Ibung (2009:3) juga memberikan definisi tentang moral. Menurutnya moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Jadi moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan buruk, sesuai dengan kesepakatan sosial, yang mendasari tindakan atau pemikiran seseorang. Moral berhubungan dengan lima hal, antara lain: benar salah, baik buruk, keyakinan, diri sendiri dan lingkungan sosial.

Agama adalah sumber moralitas, tentunya setiap kitab suci berisi ajaran tentang moral dan kemanusiaan. Tetapi baik agama maupun kitab suci tidak berbicara sendiri, sebab etika ataupun makna-maknanya secara hermeneutik muncul dari proses tafsiran oleh para pengikutnya melalui desakan sejarah yang berbeda-beda, bahkan sesuai dengan minat dan kepentingan kelas sosial masing-masing.

Membangun moral dan spritual adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang heterogen, karena melalui peran kedua faktor ini kehidupan masyarakat akan lebih dinamis dan harmoni. Moral mengajak seseorang untuk selalu mempraktekkan dan meningkatkan sikap mawas diri sedangkan jalan spritual berguna dalam mempertahankan sikap tersebut agar selalu berada pada

jalan kebenaran. Itu mengapa peran moral dan spritual sangat penting dalam membangun karakter sosial.

Dewasa ini untuk membangun karakter moral dan spritual sosial tidak saja membutuhkan peran perorangan saja melainkan juga peran dan kesadaran dari segala lapisan masyarakat, termasuk pemerintah didalamnya. Artinya dalam membangun karakter moral dan spritual sosial adalah kebutuhan bersama yang harus dilakukan bersama demi kepentingan bersama.

Peningkatan karakter moral seperti sikap empati, kejujuran, toleransi dan kepedulian pada lingkungan adalah sebuah paradigma sosial yang sederhana jika saja ajaran tersebut sudah mendarah daging dalam praktek kesehariannya. Hal ini menjadi modal utama bagi peningkatan kualitas hidup dan keberlangsungan negara dalam kacamata dunia politik.

Yoga sebagai Jalan Praktik Spritual dalam Mengatasi Psikosomatis

Dunia politik dapat membawa sejuta warna pada pikiran seseorang untuk terus berpikir dan menggunakan akal dalam mencapai tujuan politiknya. Berbagai masalah yang muncul di kemudian hari sebagai dampak dari kesalahan, kekeliruan dan serangan dari lawan politik tentunya akan berdampak pada kesehatan pikiran dan tubuh seseorang. Jika pikiran penuh dengan beban stress dan trauma akan mengakibatkan tubuh dan jiwa tidak lagi sehat.

Akibat lebih luasnya adalah sakit fisik yang disebabkan oleh psikologi dan bahkan dapat semakin parah karena faktor psikologis tersebut, hal ini disebut dengan istilah psikosomatis. Penyakit psikosomatis akan mempengaruhi setiap organ tubuh manusia dan perkembangan penyakit ini akan memperhatikan berbagai faktor seperti: faktor karakteristik seseorang, kondisi psikologis dan stress karena faktor lingkungan.

Yoga adalah salah satu jalan praktek spritual yang dapat mengantarkan seseorang agar bebas dari berbagai pengaruh

belunggu dalam pikiran. Yoga membantu diri untuk merasakan dan memahami keinginan yang sebenarnya dari kelahiran seseorang di dunia. Dengan yoga seseorang akan merasakan betapa mulianya hidup di dunia ini sekalipun dirinya berada di tengah-tengah persimpangan jalan yang membingungkan.

Melalui jalan ini seseorang dapat membebaskan dirinya dari ikatan pikiran, terbebas dari pengaruh suka atau tidak suka dalam hidupnya. Berbagai konflik yang terjadi, baik yang berasal dari dalam diri ataupun yang terjadi di luar diri kita adalah sebuah simbol bagaimana rasa suka dan tidak suka itu muncul dalam pikiran dan menjadi sebuah dogma baru bagi pikiran untuk bersikap dalam menghadapi dunia sekitar.

Pengaruh pikiran pada tubuh dapat menjadi positif ataupun negatif. Jika positif, maka sugesti dari pikiran akan membentuk tubuh sehat dan kuat. Sebaliknya jika kecendrungan pikirannya negatif maka fungsi tubuh akan terganggu dan menjadi penyakit. Melalui praktek yoga inilah maka pikiran suka-tidak suka dan berbagai kecendrungan pikiran negatif dapat berkurang dan menghilang dari kepala dan tubuh kita. Adapun berbagai kecendrungan pikiran negatif dan positif dapat kita lihat seperti pada bagan berikut ini:

Kecendrungan Pikiran Negatif	Kecendrungan Pikiran Positif
1. Takut	1. Kasih sayang
2. Kebingungan	2. Keberanian
3. Rasa tidak berharga dan tidak mampu	3. Kejermihan Pikiran
4. Pikiran gelisah karena berbagai emosi	4. Kedamaian bathin, keseimbangan bathin
5. Fragmentasi pikiran, perasaan dan perbuatan	5. Kematangan emosi
6. Kurangnya kontrol terhadap diri sendiri	6. Disiplin diri
7. Egosentrisitas	7. Penerimaan realitas
8. Pelarian	8. Akomodasi untuk orang lain

Didalam pikiran tidak terdapat divisi yang bisa diatasi dengan cara mengelolanya namun jalan sederhana agar pikiran

tidak stress dan berkembang menjadi psikosomatis adalah membiarkan pikiran layaknya air yang mengalir melalui praktek yoga. Karena didalam yoga terdapat praktik *asanas* (pose tubuh), *bandha* (kuncian), *mudra* (gerak tangan, kaki dan kepala), *pranayama* (pengaturan napas) dan meditasi (praktik rileksasi pikiran) yang jika kesemuanya dipraktekkan dengan benar atas tuntunan seorang guru, maka yoga yang dipraktekkan akan membawa rileksasi pada pikiran dan mendamaikan tubuh, pikiran dan jiwa seseorang.

Yoga adalah jalan pengobatan alami dengan memperhatikan dan menanggulangi permasalahan kesehatan tubuh seseorang melalui penanganan yang holistik, tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan tubuh, pikiran dan jiwa. Dengan begitu tubuh, pikiran dan jiwa akan bersinergi secara harmoni dalam menjalani aktivitas keseharian.

Simpulan

Perkembangan alam demokrasi di Indonesia saat ini sudah semakin baik, hal ini ditandai dengan kebebasan seseorang dalam menggunakan pendapat telah difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Belum lagi dengan beragamnya partai sebagai kendaraan politik, membuat masyarakat semakin mudah dalam menyalurkan komunikasi politik, sosialisasi politik dan manajemen konflik politik dalam hidupnya.

Saat ini kecendrungan politik tidak lagi dilihat sebagai kebebasan untuk memproduksi kebijakan dan keutamaan bagi kehidupan kolektif, melainkan lebih dipandang sebagai kesempatan yang disediakan oleh hak dasar yang melekat pada setiap manusia bebas. Politik akhirnya akan menjadi sangat konkret, yakni seolah-olah hanya kekuasaan itu sendiri. Tentunya jika hal ini tidak disadari dengan baik, maka kondisi sosial masyarakat akan mengikuti perkembangan politik. Psikologi masyarakat akan terus mengalami perubahan hingga pada akhirnya akan berdampak pada karakter moral sosial, kepribadian, dan kesehatan.

Yoga adalah salah satu jalan praktek spritual yang dapat mengantarkan seseorang agar bebas dari berbagai pengaruh belenggu dalam pikiran. Ikatan pikiran yang dapat membawa seseorang menjadi terganggu fungsi tubuhnya dan menjadi sakit. Sakit fisik yang disebabkan oleh psikologi dan bahkan dapat semakin parah karena faktor psikologis tersebut (psikosomatis).

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Imam. 1976. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan, Adi W. 2012. *The Miracle Of Mind Body Medicine (How To Use Your Mind For Better Health)*. Jakarta: Gramedia.
- Ibung, Dian. 2009. *Mengembangkan Nilai Moral Pada Anak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indraddin dan Irwan. 2016. *Strategi Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nath, Pandit Shambu. 1992. *Stress Management Through Yoga and Meditation*. Bangalore: Sterling Paperbacks.

POLITIK SPIRITUAL MENURUT AJARAN HINDU

Ida Bagus Benny Surya Adi Pramana*

Pendahuluan

Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa politik adalah tindakan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dan kehidupan yang baik. Mahatma Gandhi juga menyatakan politik tanpa prinsip menimbulkan dosa sosial. Prinsip politik adalah pengabdian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun, aman, damai, adil dan sejahtera.

Citra politik di sementara kalangan sepertinya mengalami kemerosotan. Karena itu wajib bagi siapapun untuk mengembalikan citra kehidupan berpolitik itu sebagai kegiatan hidup yang mulia. (Wiana, 2015: 1). Mencari pengaruh dan kekuasaan sesungguhnya mulia karena filosofi mempengaruhi dan kekuasaan adalah untuk pengabdian pada masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang benar baik dan wajar. Mempengaruhi untuk mengajak orang menjadi benar, baik dan adil. Demikian juga mencari kekuasaan untuk dapat mengabdikan diri pada yang dikuasai. Guru menguasai murid dikelasnya artinya guru dapat belajar dengan baik. Pemimpin mampu mempengaruhi rakyatnya untuk mematuhi hukum. Tokoh agama dapat mempengaruhi umatnya menjadi umat yang taat pada agamanya. Inilah filosofi mempengaruhi dan kekuasaan.

Pembahasan

*Politisi Itu adalah Ksatriya Warna
Prajnam raksanam dhanam*

* Alumni Magister Prodi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram. Penulis dapat dihubungi melalui email: pramanaidabagus585@gmail.com.

*Ijya dhyayanamewa ca
Wisayeswaprasaktatisca
Ksariyasca samsatah*

Orang yang disebut Ksatriya warna adalah mereka yang selalu mengupayakan adanya rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat luas. Ksatria juga hendaknya senantiasa berbakti pada tuhan, gemar belajar weda dan selalu dengan maksimal mengendalikan sendiri hawa nafsunya (Manawadharmasastra I.89).

Dalam setiap pemilihan pemimpin baik itu legislatif maupun wuntut pemimpin di eksekutif baik di tingkat nasional maupun daerah masyarakat pemilih seyogianya memiliki satu pegangan kuat dalam menentukan pilihannya. Pemilih hendaknya semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Apa lagi dalam pemilu para calon bertarung bebas. Berbagai pegangan formal sudah ada berbagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat pemilih. Disamping itu sebagian umat beragama, seyogianya nilai-nilai agama yang dianut dapat juga dijadikan dasar menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan dalam memilih pemimpin. Menurut ajaran Hindu pemimpin itu tergolong *ksatria warna*. Idealnya pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang memiliki sifat *ksatria warna* dalam pustaka Manawa Dharmasastra. 1.89 yang dikutip di atas menyatakan ciri-ciri mereka yang dapat di golongan *ksatria warna* adalah *raksanam*, *dhanam*, *dhyayanam* dan *wisayeswaprasaktati*.

Raksanam artinya *swadharma* para *warna ksatriya* wajib mengupayakan terus menerus adanya kerukunan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Adanya rasa aman damai dalam masyarakat. Adanya rasa aman damai itu suatu kondisi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi sosial yang aman damai itulah yang menumbuhkan nilai-nilai kehidupan yang wajar dalam masyarakat. Dari kondisi tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai mental spiritual dan fisik material yang dibutuhkan dalam hidup ini. *Dhanam* artinya mengupayakan keadaan ekonomi yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya secara adil dan beradab sebagai dasar membangun hidup sejahtera lahir batin.

Dua hal inilah kewajiban *ksatriya warna* yang duduk sebagai pemimpin lembaga yang memangku kepentingan public. Agar *ksatriya warna* itu bisa melakukan dua tugas pokok itu mereka yang menjadi pemimpin lembaga tersebut harus melakukan tiga hal yaitu.

Ijya artinya melakukan pemujaan pada Tuhan yang dilakukan atas dasar niat yang kuat dan mantapnya *sraddha* dan bhakti pada Tuhan itu dapat berfungsi sebagai aktor atau kendali segala dinamika kehidupan bagi mereka yang memimpin lembaga publik tersebut. Dinamika dalam mengembangkan pikiran, ucapan maupun pelaksanaan selalu berlandaskan *Sraddha* dan bhakti pada Tuhan. Sikap *Ijya* itu akan dapat dibangun apa bila pemimpin tersebut tidak hanya melakukan pemujaan pada Tuhan hanya melalui ritual formal semata. Pemujaan pada Tuhan hanya melalui ritual formal semata. Pemujaan pada Tuhan harus dilakukan melalui *Nava Widha Bhakti* sebagaimana diajarkan dalam Bhagawata Purana. VII.5.23, yaitu *Srawanam, smaranam, kirtanam, arcanam, asyanam, padasevanam, vandanam, sakayanam, atmanivedanam*

Dhyayana artinya *ksatria warna* yang menjabat sebagai pemimpin publik itu harus senantiasa belajar terus baik melalui proses akademis di perpustakaan maupun melalui proses mempelajari berbagai persoalan public di tengah-tengah masyarakat. Dalam Wrehaspati 33 dinyatakan bahwa *Dhyayana* itu harus dilanjutkan dengan *tarka jnyana* artinya terapkan ilmu tersebut dalam praktek kehidupan sebagai pemimpin. Dapat diartikan *dhyayana* itu adalah ilmu murni sedangkan *tarka jnyana* itu adalah ilmu terapan. Karena seorang *ksatria* itu haruslah orang yang sakti. Dalam Wrehaspati tattwa 14 yang disebut sakti itu adalah *sakti ngaran sang sarwa jnyana sarwa karya*. Maksudnya, sakti namanya orang yang banyak ilmu dan banyak kerja atas dasar ilmu tersebut. Pemimpin yang berilmu dan bekerja atas dasar ilmu tersebut. Pemimpin yang berilmu dan bekerja atas dasar ilmunya itulah yang akan berhasil atau *wahya sidhi* dan *adyatmika sidhi* atau sukses secara duniawi dan secara rohani. *Ksatria warna* apa lagi

yang memimpin lembaga yang memangku kepentingan public tanpa melakukan *dhyayana* dan *tarka jnyana* ia akan ngawur dalam memimpin, akan menjadi pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaannya dalam memimpin. Dari sinilah akan melahirkan pemimpin yang dictator dengan sewenang-wenang menghandalkan kekuasaannya semata.

Wisayeswaprasaktatih adalah *ksatriya varna* yang senantiasa mengendalikan hawa nafsu atau indrianya dengan kekuatannya sendiri. Kata *wisaya* dalam bahasa Sanskerta artinya nafsu dan *swaprasaktatih* artinya dengan kemampuan sendiri. Menjadi pejabat publik yang banyak punya kewenangan mengurus kepentingan umum akan banyak mendapat berbagai macam godaan. Karena itu kegiatan menguasai hawa nafsu harus merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh seorang pemimpin. Seperti mengkonsumsi makanan yang *satvika* seperti yang diajarkan dalam Bhagawad Gita XVII.8. Melakukan *dhyana* atau meditasi seperti yang diajarkan dalam Sarasamuscaya 260 yang menyatakan *dhyana ngaran siwasmaramanam* artinya *dhyana* namanya selalu mengingat secara rohani Tuhan Siwa. Demikian juga menguatkan *guna satwam* dan *guna rajah* nya seperti yang diajarkan dalam Wrehespati tattwa 21. Itulah konsep pengendalian nafsu menurut ajaran Hindu. Kalau konsep tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh penuh disiplin, maka pengendalian tersebut akan dicapai.

Penguasa Melindungi Catur Asrama dan Catur Warna

Svesve dharma nivistaanaam

Saroesaamapuuvacah

Varnaanaanmasramanam ca

Raja srsto bhiraksita

Penguasa (raja) diciptakan untuk melindungi tegaknya *dharma* dari catur asrama dan catur warna agar mereka dapat melakukan *svadharmanya* masing-masing dengan baik dan benar (Manawadharmasastra VII. 35).

Norma dinamika sosial masyarakat menurut ajaran Hindu adalah dinamika yang vertikal dan horizontal. Dinamika

sosial yang vertikal berdasarkan ajaran Catur Asrama. Artinya tahapan hidup yang vertikal dari bawah keatas. Dari tahapan hidup *brahmacari* mendaki menuju *grahasta*, *wanaprastha* dan terakhir tahapan hidup untuk meninggalkan dunia sekala ini menuju dunia niskala yang disebut *sanyasin*.

Sedangkan dinamika sosial yang paralel horizontal berdasarkan ajaran *Catur Warna*. Menurut Yajurveda XXX. 5 Tuhan menciptakan *Brahmana* untuk memelihara ilmu pengetahuan. *Ksatria* untuk perlindungan. *Waisya* untuk kesejahteraan ekonomi dan *Sudra* untuk menggerakkan tenaga jasmani. Keempat golongan profesi ini menurut Manawa Dharma Sastra 1. 31 untuk menjamin kebahagiaan dunia. Setiap orang yang mendambakan hidup bahagia membutuhkan peran keempat golongan profesi yang disebut *Catur Warna*. Keempat golongan ini berperan secara paralel horizontal dan sinergis.

Pendakian tahapan hidup yang vertikal seyogianya mengikuti normanya masing-masing. Ada norma untuk *brahmacari* sebagai tahapan hidup pertama. Kalau ini berhasil maka tahapan hidup selanjutnya akan lebih sukses. Tentunya kalau saat *Grahasta* tetap konsisten hidup berdasarkan norma hidup seorang *grahasta*, demikian juga selanjutnya Dinamika sosial yang paralel horizontal adalah dinamika berdasarkan ajaran catur warna, yaitu *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra* pada hakekatnya setara bersaudara dan masing-masing merdeka mengembangkan diri sesuai *swadharmanya* masing-masing. *Warna* seseorang menurut Bhagavad Gita IV. 13 ditentukan oleh *Guna* dan *Karma*. *Guna* artinya bakat dan minat sedangkan *karma*. *Guna* artinya bakat dan minat sedangkan *Karma* artinya pekerjaan. Setiap orang seyogianya berusaha menemukan *guna* dan *karmanya*. Itu artinya orang akan mendapatkan kehidupan yang bergairah dan bahagia apabila dapat bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya. *Warna* seseorang bukan ditentukan oleh keturunannya.

Dinamika sosial berdasarkan *warna asrama dharma* ini berjalan sesuai dengan normanya membangun kehidupan social yang dinamis harmonis dan produktif menumbuhkan nilai-nilai

fisik material dan mental spiritual secara seimbang dan berkelanjutan. Ajaran *warna asrama dharma* ini adalah konsep membangun dinamika kehidupan masyarakat aman dan sejahtera atau *Jagat Hita*. Hal itu akan berhasil amat tergantung pada kemauan, tekad dan kemampuan setiap orang untuk melakukan *swadharmanya* sesuai dengan ajaran catur asrama dan catur warna.

Keberhasilan itu juga amat ditentukan oleh kondisi alam lingkungan hidup dan kondisi sosial. Dalam hal inilah Tuhan menciptakan manusia yang berbakat pemimpin menjadi penguasa. Tujuan terciptanya penguasa itu untuk mengabdikan pada yang dikuasai dalam menjalankan *dharma* sesuai dengan asrama dan warnanya masing-masing. Penguasa wajib memimpin masyarakat agar kondisi alam lingkungan dan kondisi sosial senantiasa kondusif. Alam harus dijaga agar selalu bersih dan hijau. Demikian juga kondisi sosial harus kondusif mendorong setiap orang hidup berdasarkan asrama dan warnanya masing-masing. Terpadunya kondisi lingkungan alam dan kondisi sosial menjadi kondisi kehidupan. Terbangunnya kondisi kehidupan yang kondusif itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkuasa untuk memimpinya. Iklim pendidikan harus diciptakan untuk mendorong mereka yang sedang berada pada tahapan hidup *Brahmacari*. Iklim pendidikan yang kondusif harus diciptakan di tiga pusat pendidikan. Tiga pusat pendidikan formal, masyarakat luas pusat pendidikan non formal dan keluarga pusat pendidikan informal. Tiga pusat pendidikan itu harus diperhatikan secara seimbang dan sungguh-sungguh oleh penguasa.

Demikian juga mereka yang *Grhasta* harus dimotivasi oleh penguasa untuk mampu mandiri membangun rumah tangganya menyelenggarakan kehidupannya mandiri membangun rumah tangganya menyelenggarakan kehidupannya. Mandiri dalam mensejahterakan rumah tangganya dan mandiri dalam mengembangkan kehidupan mental spiritual keluarganya. Dalam Agastya Parwa ada dinyatakan *grahasta ngarania yatha sakti kayika dharma*, artinya *Grahasta* namanya dia yang dengan kemampuannya (sakti) sendiri mengamalkan *dharmanya*.

Pemerintah wajib mengupayakan kondisi kehidupan publik yang mampu memotivasi para *Grhastin* mengembangkan *swadharma*nya.

Sedangkan para pensiunan yang menempuh *wanaprastha* agar ikhlas menyerahkan estafet kehidupan *Grahasta* menuju *Wanaprastha*. Para *Wanaprastha* harus juga diupayakan dapat hidup tenang dan terjamin masa tuanya sampai memasuki *sanyasin asrama*. Penguasa yang baik akan berusaha untuk mengupayakan berbagai hal yang dapat memfasilitasi para *Wanaprastha* dan *Sanyasin* mengembangkan kehidupan yang bahagia dimasa-masa tuanya.

Penguasa juga seyogiannya menciptakan berbagai hal untuk memotivasi dan melindungi catur warna mengembangkan diri sesuai dengan warnanya masing-masing, keadaan masyarakat akan menjadi kondusif apabila setiap orang memiliki profesi atau warna dengan kualitas tinggi. Untuk itu penguasa harus bekerja keras bersama dengan seluruh jajarannya untuk membangun berbagai hal agar seluruh masyarakat dapat mengembangkan profesinya serta mendapatkan tempat yang layak dalam mengimplementasikan profesinya. Dengan demikian tidak ada warna yang nganggur tanpa kerja. Penguasa yang cerdas mampu menciptakan iklim hidup sehingga para profesi tersebut atas motifasi pemerintah mampu menciptakan sendiri lapangan kerja, melindungi catur asrama dan catur warna tujuannya penguasa diciptakan perkawinan.

Pemimpin Blusukan itulah Bayu Brata

Pravisiya sarvabhutani yatha carati

Marutah tatha caraih pravestavyam

Vrata memetaaddhi marutam

Laksana *bayu* atau angin bergerak kemana-mana, masuk member nafas pada seluruh makhluk hidup. Demikianlah pejabat publik bersama stafnya masuk kemana-mana. Karena ia bagaikan angin berembus dari tekanan yang tinggi menuju makanan yang lebih rendah (Manawadharmastra IX. 306).

Sifat angin selalu berembus dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Berembusnya angin tersebut selalu

berembus menuju ketekanan yang rendah memberikan kesejukan pada semua makhluk hidup yang dilaluinya. Itulah yang diibaratkan dalam sloka Manawa Dharmasastra IX. 306 yang dikutip di atas yang disebut *Bayu Brata*. Hal inilah yang diulang dalam pustaka Ramayana kekawin sebagai salah satu dari *Asta Brata*. Demikianlah seharusnya pemimpin yang punya tugas memangku kepentingan publik.

Pejabat publik atau para ksatria hendaknya *blusukan* ke mana-mana agar mengetahui keadaan rakyat yang sebenarnya terutama yang keduanya dihimpit derita. Seperti miskin secara ekonomi, tinggal ditempati dengan lingkungan yang kumuh, dengan fasilitas umum yang rendah. Seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah jauh dari standar wajar. Melihat keadaan rakyat yang dirundung derita itulah yang semestinya paling mendapatkan perhatian pejabat public atau ksatria warna. Untuk dibantu mengatasi penderitaannya.

Dalam ajaran Hindu pejabat yang mempunyai tugas mengurus kepentingan rakyat hendaknya mereka yang memiliki bakat atau tabiat atau *guna* dan *karma* sebagai ksatria warna. Setelah duduk memegang jabatan disebut *raaja* bukan raja. Kata *raaja* berasal dari kata *rajintah*, artinya ksatria warna yang telah terbukti berpengalaman membahagiakan masyarakat banyak. Bukan seperti Raja yang hidupnya selalu mengumbar nafsu *rajasnya*.

Kalau saja para pejabat publik mau *blusukan* seperti itu sebagai bentuk pengamalan *Bayu Brata* atau angin berembus memberikan kesejukan pada rakyat. Pejabat publik jangan hanya menghadiri undangan pengusaha kaya untuk menikmati kehormatan palsu berpesta pora hidup bersenang-senang. Ujung-ujungnya penguasa dan pengusaha bikin proyek fiktif untuk bagi-bagi duit yang *kasmala artha* atau uang yang penuh noda. Hidup dengan uang yang penuh noda akan menimbulkan vibrasi buruk dari kejahatan menyalah gunakan uang rakyat.

Dalam Manawa Dharmasastra VII. 44 menyatakan hendaknya pejabat publik (*Raaja*) itu siang dan malam senantiasa berusaha sekuat tenaganya mengendalikan indrianya (*Indrianam*

jaye yogam) Pejabat publik yang telah berhasil menundukan indrianya (*Jitendriyah*) sendiri akan berwibawa dan akan berhasil dipatuhi oleh rakyatnya. Dewasa ini masih ada pejabat publik yang sangat kurang serius menahan indrianya untuk hidup bersenang-senang. Seperti buat anggaran untuk plesiran ramai-ramai bahkan sampai keluar negeri dengan dengan kedok studi banding. Buat pesta-pesta dengan uang bansos dengan kedok agar dekat dengan rakyat.

Seharusnya pejabat publik mengembangkan gaya hidup bertenang-tenang. Dengan demikian pejabat public itu tidak hidup dengan gaya "*hight coos economic*" atau dengan gaya hidup biaya tinggi. Politisi hendaknya tidak menjadikan jabatan dilembaga pemerintahan sebagai media untuk mengais rejeki untuk memperkaya diri. Memang masih banyak pejabat public yang rela hidup bersahaja mengutamakan pengabdian pada kepentingan rakyat. Masih ada yang mau blusukan kerakyat yang hidup menderita dan memberikan solusi nyata mengatasi penderitaan rakyat tersebut.

Sebagai pemimpin pejabat publik itu juga datang pada rakyat yang hidupnya lebih beruntung baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan dan status sosialnya. Blusukan ketempat rakyat yang hidup lebih beruntung untuk diajak bersama-sama pemeperhatikan memperbaiki keadaan rekannya yang masih terhimpit derita lahir batin. Dengan melakukan *blusukan* yang seimbang dengan tujuan mencarikan solusi pada berbagai persoalan masyarakat yang luas dan kompleks, itulah sesungguhnya hakekat *Bayu Brata* menurut ajaran Hindu. *Bayu Brata* itu bukan *blusukan* untuk memenuhi kebutuhan sosilogis untuk disanjung-sanjung atau dielu-elukan oleh rakyat.

Pejabat publik akan menaruh belas kasihan pada rakyat apabila dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan indrianya. Mereka *blusukan* bukan memamerkan kemewahan dengan tampil mengistimewakan diri ke desa-desa menikmati sanjungan palsu dari rakyat. Apa lagi datang dengan mobil mewah dengan kawalan mobil pakai serine memekakan telinga dan

membuat kacaunya lalu lintas rakyat. Pejabat publik yang *blusukan* dengan konsep *Bayu Brata* itu datang dengan cara yang sederhana dan wajar-wajar saja. Datang secara langsung dan menimba informasi dan aspirasi yang autentik dan mencoba memahami masyarakat yang ada. Bahkan sebelumnya pejabat bersangkutan sudah memiliki informasi dan data tentang persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian tidak ada persoalan yang sampai berlarut-larut tak diketahuinya. *Blusukan* yang dapat di golongankan *Bayu Brata* itu bukanlah *blusukan* pejabat yang hanya rajin datang kerakyat tetapi tidak memberikan solusi pada persoalan yang terjadi. Karena konon ada pejabat yang suka keliling kedaerah-daerah dengan mobil dinas yang sejuk dan mewah, tetapi dia tidur lelap di jok belakang sopir. Setelah segar terus pulang dan malamnya begadang di club malam atau ke *café* main *ceki* dengan rekannya yang sehoobi dengannya. Artinya tidak semua pejabat yang suka *blusukan* itu dapat di golongankan *bayu brata*. Datang kerakyat dan member solusi pada persoalan yang sedang dihadapi rakyat dengan baik, benar dan tepat.

Tanpa Susila Kekuasaan akan Sia-Sia

Silam pradhanam purusa

Tadyasyeha pranacyate

Na tasya jivinertha

Dursilam kinparyojanam

Bersusila itu adalah hal yang paling utama dari tujuan menitis jadi manusia tanpa susila. Kekuasaan dan kebijakan tanpa susila akan sia-sia saja tanpa arti (Sarasamuscaya, 160).

Hidup di dunia ini diatur oleh empat norma. Norma agama berasal dari sabda Tuhan. Norma susila dari suara hati nurani, norma kesopanan bersumber dari masyarakat dan norma hukum dari penguasa yang berwenang. Manusia hidup di dunia ini akan berlangsung dengan baik dan wajar apa bila penyelenggaraan hidupnya itu bersandar pada keyakinannya pada Tuhan atau *sraddha* dan *bhakti*. Artinya apapun yang kita

alami saat ini adalah buah karma sebelumnya. Dari *sraddha* dan *bhakti* itu didaya gunakan untuk mencerahkan hati nurani sampai menimbulkan meningkat dan menguatnya kesadaran budhi mengendalikan kecerdasan intelektual dan kepekaan emosional.

Dengan hati nurani yang kuat sebagai pengejawantahan dari *sraddha* dan *bhakti* pada Tuhan. Tujuan berbakti pada Tuhan untuk menguatkan kemampuan hati nurani mencerahkan kesadaran budi. Kesadaran budi yang cerah itu sebagai modal dasar meningkatkan keluhuran moral dan menguatkan daya tahan mental menghadapi dinamika hidup. Moral luhur dan mental tangguh itulah yang akan mewujudkan *susila*. Tanpa moral yang luhur dan mental yang tangguh hidup di dunia ini akan terombang ambing oleh gejolak indria mengeksploitasi alam dan merusak kebersamaan. Hidup dengan penggambaran hawa nafsu adalah hidup yang bermewah-mewah menuruti kehendak indria.

Hati nurani yang cerah menguatkan kesadaran *budhi* mengekspresikan perilaku *Susila* mengamalkan *Dharma* intisari Weda sabda Tuhan. Karena itu memang tepatlah pernyataan Sarasamuscaya di atas bahwa dalam mengkonsistensikan hidup ini *Susila* itulah sebagai dasar menyelenggarakan hidup. *Susila* berasal dari suara hati nurani. Hati nurani adalah suara Sang Hyang Atman. *Atman* itu adalah *Brahman* sebagai jiwa yang ada di dalam *Bhuvana alit*.

Kekuasaan yang dijabarkan menjadi berbagai kebijakan menata yang dikuasai akan sia-sia tanpa dasar *Susila*. Pejabat publik mendapatkan kekuasaan dari suatu proses politik yang demokratis untuk mengurus dan mengabdikan pada kepentingan publik. Tapi dalam prakteknya ada pejabat publik yang tanpa hati nurani melaksanakan kekuasaannya itu. Anggaran publik itu di gelontorkan untuk mengglamourkan kehidupannya sebagai pejabat publik. Bikin kantor yang mewah dengan ruang kerja yang menghabiskan uang rakyat sampai milyaran rupiah. Uang rakyat digunakan untuk membiayai fasilitas pejabat publik yang mewah. Seperti mobil mewah, rumah jabatan mewah, biaya perjalanan yang mewah dan seterusnya. Berlalu lintas dengan pengawalan

yang sering arogan mengacaukan lalu lintas rakyat. Seharusnya pejabat publik ditingkat provinsi dan kabupaten sebaiknya ikutlah merasakan derita lalu linta yang macet itu sehingga muncul pikiran dan kebijaksanaan yang tepat dalam mengatasi lalu lintas rakyat yang amburadul menjadi lalu lintas yang aman. Lancar dan nyaman.

Gaya hidup glamour sementara pejabat publik yang demikian ini tentunya amat tidak menggunakan hati nurani menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Mereka akan disebut ber susila apa bila uang rakyat itu di gunakan terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat seperti memajukan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja untuk rakyat, fasilitas umum dan lainnya jalan, pasar, gedung, sekolah, puskesmas, saluran irigasi untuk memajukan pertanian, angkutan umum tidak di biarkan berada tanpa kualitas. Semuanya itu sepertinya diurus hanya dengan sikap asal-asalan yang hanya bernuansa formalistis yang ogah-ogahan. Tentunya masih banyak pejabat public yang mengabdikan dengan tulus ikhlas pada kepentingan publik dan tetap hidup sederhana secara wajar. Semoga pejabat pulik yang bersusila mengutamakan rakyat itulah semakin muncul di bumi persada nusantara ini.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa (1) politisi adalah seorang ksatria pembela kebenaran, (2) penguasa melindungi semua profesi, (3). seorang pemimpin harus melaksanakan *Asta Brata*, dan (4) kekuasaan harus didasari oleh Susila. Hakikat kekuasaan adalah mengabdikan pada yang dikuasai agar yang dikuasai itu memperoleh nilai lebih dalam hidupnya. Pejabat negara diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menciptakan adanya rasa aman dan sejahtera dalam masyarakat, *prajanam raksanam dhanam*. Demikian disebutkan dalam Weda Smrti yang artinya ciptakanlah rasa aman dan sejahtera untuk masyarakat luas sebagai kewajiban seorang ksatria. Eksistensi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pejabat

publik itu justru untuk meringankan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat banyak. Bukan sebaliknya kekuasaan negara diekspresikan oleh pemegang kekuasaan itu justru menyusahkan rakyat pemegang kekuasaan itu tentunya dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan norma hukum dan etika moral yang luhur.

Daftar Pustaka

- Darmayasa, 1995. *Canakya Nitisastra*. Denpasar: Yayasan Dharma Narada.
- Kadjeng, 1991. *Sarasamuscaya* (alih bahasa). Jakarta: Mayangsari.
- Mantra, Ida Bagus, 1967. *Bhagawad Gita* (alih Bahasa). Jakarta: PHDI Pusat.
- Mirsa, I Gusti Ngurah Rai, 1994. *Wrehaspati Tattwa, Kajian Teks dan Terjemahan*. Denpasar: Upada Sastra.
- Mulyana, Slamet, 1967. *Perundang-undangan Maja Pahit*. Jakarta: Bharatara.
- Oka, I Gst Agung, 1991, *Slokantara* (alih bahasa dan komentar). Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Budha Dep. Agama R.I).
- Pudja. I Gede, 1981. *Bhagawad Gita* (alih bahasa Sanskerta-Indonesia).
- Pudja. I Gde dan Tjok Rai Sudharta, 1977/1978, *Manawa Dharmasastra* (alih Bahasa). Jakarta: Departemen Agama R.I
- Poerbatjaraka, R. Ng, 1986. *Nitisastra Kekawin* (alih bahasa), diperbanyak oleh P.G.A Hindu Negeri
- Sura, I Gede, th 1985 Pengendalian diri dan Etika dalam ajaran Agama Hindu Penerbit Ditjen Bimas Hindu dan Budha Dep. Agama RI
- Sura, I Gede dkk, 1994. *Bhuwana Kosa* terjemahan, Penerbit Pemda Bali
- Sura, I Gde dkk. 1997. *Tattwa Jnyana* Alih Bahasa Dep Agama RI.
- Tititb, I Made, 1998. *Weda Sabda Suci. Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.

- Wiana, I Ketut dan Raka Santri, 1993. *Kasta dalam Hindu, Kesalah Pahaman Berabad-abad*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Wiana, I Ketut, 2006. *Berbisnis Menurut Hindu*, Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut, 2007. *Tri Hita Karana Menurut Ajaran Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut, 2013. *Weda Wakya V. Weda Sebagai Ibu Penuntun Hidup*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut, 2015. *Berpolitik Menurut Hindu*. Surabaya: Paramita.

KESADARAN POLITIK: Dari Peran Tokoh Agama dan Partisipasi Politik Umat Hindu

I Gusti Ngurah Santika, I Gede Sujana, I Made Astra Winaya*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tingkat religusitas rakyatnya sangat tinggi. Dalam kondisi seperti itu, agama mempunyai kedudukan yang spesial untuk mengatur, membimbing dan mengarahkan serta mengikat tingkah laku manusia di lingkungan masyarakatnya. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, agama diyakini bukan lagi monoton mengurus tek-tek bengek persoalan akhirat semata, tetapi kehadirannya di dunia dimaksudkan membawa kebaikan bagi umat manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk politik kenegaraan. Agama merupakan *interplay* dominan, kalau bukan satu-satunya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, termasuk dunia politik (Ruslan, 2014: 161).

Dengan sentralnya kedudukan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, otomatis menempatkan peranan dan pengaruh yang signifikan terhadap tokoh-tokoh agama yang memiliki kewajiban untuk mentransformasikan dan menerjemahkan ayat-ayat sucinya dalam hubungannya dengan berpartisipasi politik umatnya. Lebih ekstrim lagi, bahwa kini banyak tokoh agama di Indonesia secara terselubung ikut terjun langsung ke panggung politik praktis melalui keterlibatannya dalam mengumpulkan ratusan ribu pendukungnya, bahkan jutaan massa dengan muatan politis yang terasa begitu kental.

* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra. Para penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ngurahsantika88@gmail.com; dalungsujana@gmail.com; astrawinaya@yahoo.com

Kemampuan tokoh agama dalam mengumpulkan pendukungnya tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam menjembatani jurang antara ilmu agama dengan sistem politik yang berlaku di negaranya. Sebenarnya fenomena tokoh agama berkontribusi dalam mengumpulkan pendukung sudah berlangsung sejak dahulu dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Karena agama itu masih menjadi faktor yang sangat menentukan (<https://pemilu.antaranews.com/berita/827794/peran-ulama-cukup-berpengaruh-dalam-politik,3/6/2019,20;02>).

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu merupakan tonggak bersejarah yang menjadi rujukan kita untuk menandai dan mengawali masifnya keterlibatan tokoh agama dalam panggung politik Indonesia saat ini. Masuknya akar rumput ke arena politik disertai dengan meningkatnya intensitas partisipasi politiknya dari waktu ke waktu melalui berbagai gerakan politik, seperti maraknya aksi demonstrasi dan mengkampanyekan paslon tertentu tidak mungkin bisa dipisahkan dari peran tokoh agama. Berkat kapasitas dan kapabilitasnya dalam mencari dasar legitimasi bagi gerakan politiknya dalam kitab sucinya, terbukti anjuran tokoh agama mampu menjadi magnet dan daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat secara sukarela ikut berduyunduyun melibatkan dirinya dalam aktivitas politik kenegaraan. Animo masyarakat begitu antusias mengikuti petunjuk atau arahan politik tokoh agama panutannya dengan berbondong-bondong datang, bukan hanya di jalanan berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya, tetapi juga hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak politiknya. Rupanya keterlibatan tokoh agama dalam kancah politik Indonesia tidak berhenti dengan usainya perhelatan politik lokal di DKI Jakarta tetapi terus berproses dan dipraktikkan kembali pada kontestasi pilkada serentak, pileg, dan juga pilpres. Mencermati budaya politik masyarakat Indonesia, penulis memprediksi tokoh agama akan tetap mendominasi panggung politik tanah air.

Kontradiktif sekali dengan partisipasi politik Umat Hindu yang cenderung bersifat pasif dan terkesan apatis dengan sistem

politik. Tokoh agama Hindu (Rsi, Ida Pedande, Sri Empu, Pemangku dan lain sebagainya) pada umumnya masih enggan menyinggung, membahas, dan membicarakan, apalagi mendiskusikan politik bersama umatnya, karena didasari oleh persepsi yang keliru, bahwa keterlibatannya dalam politik kenegaraan akan menodai kesucian gelarnya sebagai orang suci yang dianggap sudah melepaskan diri dari urusan duniawi, termasuk politik. Oleh karena itu, sulit diharapkan menjadi pelopor demokratisasi (Alfian, 1992: 225).

Pola pikir dan orientasi sikap seperti itu akhirnya menciutkan perannya dalam kehidupan negara, karena hanya ingin berkuat dengan urusan agama saja (banten, upacara agama, dan urusan keagamaan lainnya). Padahal dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tokoh agama mempunyai peran ganda yang semestinya dijalankan secara proporsional. Peran pertama, membimbing umatnya dalam menapaki jalan Tuhan sesuai dengan norma-norma agama yang diyakininya, misalnya untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu surga. Peran kedua, sebagai warga negara Indonesia, tokoh agama mempunyai kewajiban untuk selalu mendukung arah dan kebijakan politik negara yang tertuang secara eksplisit dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sudah sewajarnya apabila tokoh agama mulai saat ini menyadari eksistensinya dan dapat mengoptimalkan perannya dalam membangkitkan kesadaran politik Umat Hindu, sehingga partisipasi politiknya meningkat demi terwujudnya demokrasi Pancasila.

Pembahasan

Demokrasi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Sejak merdeka, Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan komitmennya sebagai negara demokrasi melalui ideologi dan konstitusinya. Baik secara teoritis maupun praksis, gagasan demokrasi Indonesia tertuang dan berlandaskan pada ideologi Pancasila maupun UUD 1945. Karena itulah kemudian demokrasi

Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional (Pasandaran, 2015;45) Dua konsepsi ideal bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila dan *constitutional democracy* sama-sama menghendaki kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila tercermin dari Sila ke Empatnya yang menyatakan, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Sedangkan gagasan konseptual demokrasi konstitusional Indonesia tertuang secara normatif dalam UUD 1945. Dasar peletakan yuridis konstitusional demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah bersumber pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Winarno, 2009;106). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Masalahnya adalah bagaimana kedaulatan tersebut diorganisir? (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1992;106). Diorganisir yang dimaksud adalah dalam rangka mengimplementasikan dan juga mengaktualisasikannya di lapangan, sehingga kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (Nurtjahjo, 2006;29). Ketentuan tersebut mengisyaratkan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat apabila didukung dengan partisipasi politik dari seluruh rakyat Indonesia. Tanpa partisipasi politik, niscaya kedaulatan rakyat tidak akan pernah terwujud secara kontekstual.

UUD 1945 sebagai dasar aturan main politik (Mahmud, 2009;40) secara gmbalang menformulasikan mekanisme partisipatorik bagi rakyat Indonesia untuk menyalurkan, mengaktualisasikan, dan merefleksikan kedaulatannya secara langsung (*direct democracy*) (Wahab dan Sapriya, 2011;21). Adapun beberapa ketentuan UUD 1945 yang menjadi rujukan normatif dan legitimasi konstitusional bagi partisipasi politik rakyat Indonesia sebagai wujud implementasi atas kedaulatannya, yaitu.

- a. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden *dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.

- b. Pasal 18 ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota *dipilih secara demokratis*.”
- c. Pasal Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat *dipilih melalui pemilihan umum*”.
- d. Pasal 22C UUD 1945 berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Daerah *dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*”.
- e. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Pemilihan *umum diselenggarakan untuk memilih anggota* Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (garis miring oleh penulis).

Menurut Sundari (2005) bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan partisipatif. Melalui pemilu, rakyat Indonesia diajak secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk periode lima tahun ke depan. Dalam pemilu, rakyat Indonesia diberikan ruang seluas-luasnya secara politik untuk ikut berpartisipasi memilih dan juga menentukan wakil-wakilnya yang akan mengisi jabatan-jabatan publik kenegaraan. Oleh karena itu, pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu (Suryo, 2015: 32). Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa pemberian suara dalam kegiatan pemilu merupakan bentuk partisipasi politik (Ulfa, 2009: 6).

Peran Tokoh Agama

Di negara yang penduduknya menghargai dan menjunjung tinggi agama, seperti di Indonesia, tokoh agama memiliki kedudukan penting dan strategis, karena pengaruhnya yang amat dominan terhadap kehidupan umatnya. Tokoh agama seringkali menjadi bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat (Nasir, 2015: 31). Segala keputusan, baik menyangkut persoalan hukum, sosial, agama maupun politik sebagian besar dipatuhi dan juga diikuti oleh umat sesuai dengan

anjuran para tokoh agamanya. Masyarakat percaya sekali, bahwa apa yang disampaikan tokoh agama dalam ceramahnya merupakan refleksi dari budi pekerti atau moral yang dalam agama secara normatif mengikat pemeluk-pemeluknya (Wijaya, 2008: 414). Ketaatan umat terhadap wejangan tokoh agamanya, juga tidak mungkin bisa dipisahkan dari figurinya yang bisa diteladani dan patut dicontoh dalam kesehariannya. Hal tersebut sangat sesuai dengan makna melakat pada kata tokoh yang sering diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal dan panutan (Kamisa, 1997: 68),

Dalam dinamika kehidupan bernegara, secara faktual rupanya tokoh agama sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia politik (Abdurrahman, 2009;25. Linieritas peran tokoh agama bukan semata-mata dalam kehidupan sosial tetapi telah bergeser seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan iklim politik negara. Masyarakat kemudian memandang tokoh agama sebagai orang suci yang mampu membimbing dan mengarahkan mereka ke jalan politik yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Anggapan masyarakat seperti digambarkan di atas, memposisikan peran para pemuka agama...sebagai tokoh-tokoh yang memiliki *power* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak saja dalam urusan keagamaan (Basuki dan Isbandi, 2008: 22). Dengan demikian, tokoh agama melalui penafsirannya, telah mempersepsikan, mendefinisikan, dan memposisikan, serta menegaskan kedudukan agama bukan hanya menyangkut urusan akhirat semata, tetapi juga mengatur ranah keduniawian, yakni sistem politik negara. Terlebih lagi pada tahun-tahun politik ini, ekspansi pengaruh tokoh agama dalam atsmosfir kehidupan politik semakin terasa mendominasi iklim politik, bahkan faktanya mampu mengubah pola dan juga format politik negara, misalnya menyangkut kebijakan. Hal tersebut akan lebih jelas lagi di negara yang agamanya sangat kental, peran tokoh agama tentu sangat diperhitungkan dalam sebuah kebijakan politik pemerintah

(<https://www.quareta.com/post/peranan-tokoh-agama-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat,3/6/2019,20:15>).

Dalam kaitannya dengan partisipasi politik, maka Afif berharap tokoh agama dapat mendorong jamaah dan anggotanya untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik (Nurisman, <https://bawaslu.go.id/id/berita/inilah-peran-penting-tokoh-agama-dalam-menyukseskan-pemilu/3/6/2019,18:40>).

Berkat kefigurannya, peran tokoh agama secara sosial terbukti ampuh dan efektif dalam membangkitkan kesadaran politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa tokoh agama merupakan sosok yang menjadi panutan dan dianggap masyarakat mampu mentransformasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan politik. Lebih lanjut menurut Denny JA, bahwa banyak peran penting tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi pemilu salah satunya adalah karena tokoh agama tahu betul kriteria kepemimpinan dalam agama. (<https://video.medcom.id/opsi2sisi/4KZn3RpK-ini-peran-penting-tokoh-agama-dalam-meningkatkan-partisipasi-pemilu,3/6/2009,18:45>).

Partisipasi Politik

Keterlibatan manusia dalam aktivitas politik pada hakikatnya berkesesuaian dengan ungkapan filosof Yunani Aristoteles, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yakni makhluk politik (Luthfiyah, 2007: 3). Kontekstualisasi manusia sebagai makhluk politik termanifestasi kembali dalam negara melalui partisipasi politik. Dalam dinamika politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting terutama dalam hubungannya dengan praktik politik di sebuah negara (Sucipto, 2015: 15). Partisipasi politik merupakan salah satu indikator esensial/utama bagi sebuah negara yang mengaku dirinya menganut sistem politik demokrasi. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi (Hendrik, 2010:138).

Bahkan, negara-negara Barat telah menggunakan partisipasi politik rakyat sebagai acuan untuk mengukur dan menilai tingkat legitimasi penyelenggaraan pesta demokrasi disuatu negara.

Adapun landasan teoritis partisipasi politik dalam negara demokrasi bertolak dari paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap berada sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Asshiddiqie, 2010: 413-414). Gagasan tersebut menuntut rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk ikut berperan dan berpartisipasi secara aktif, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan dengan maksud mempengaruhi kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Budiardjo (2008: 367) bahwa partisipasi politik, adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*kebijakan publik*).

Perlu dipahami, bahwa di satu sisi suburnya partisipasi politik selalu diawali dengan lahirnya kesadaran politik. Di sisi lain, kesadaran politik berkaitan erat dengan budaya politik masyarakatnya. Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Suryo (2015: 31), bahwa budaya politik juga dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Dengan demikian, budaya politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran dan partisipasi politik. Lebih jauh lagi, bahkan budaya politik akan sangat menentukan pola pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya (Alamsyah, 2010: 418). Secara teoritis budaya politik (*political culture*), dibagi menjadi tiga, yakni budaya politik parokial (*parochial political culture*), budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan (Kesuma, 2016: 77). Negara yang penduduknya agamis, apalagi ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan warganya, pada umumnya menganut budaya parokial, di mana partisipasi politiknya lebih didominasi oleh pengaruh tokoh agama.

Optimalisasi Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Umat Hindu

Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik paling ideal yang dipilih dan ingin diwujudkan bangsa Indonesia sejak resmi mendeklarasikan kemerdekaannya hingga saat ini. Namun untuk bisa mentransformasikan dan mengkontekstualisasikan eksistensi sistem politik demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam kehidupan bernegara bukan lah perkara yang sederhana dan mudah, seperti membalikan sebuah telapak tangan. Mengingat gagasan konseptual *the founding father* tersebut bersifat umum-abstrak tetapi komplikatif. Sehingga hanya bisa tercapai bilamana didukung penuh dari segenap komponen bangsa dalam bentuk partisipasi politik. Umat Hindu sebagai bagian dari rakyat Indonesia senantiasa dituntut untuk selalu berkontribusi positif dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik kenegaraan. Dengan demikian, aspirasi konstruktif Umat Hindu untuk kemajuan bangsa Indonesia akan didengar, diperhatikan, dan diperhitungkan serta tersalurkan sesuai dengan mekanisme politik yang tersedia. Paling tidak pada tataran minimalnya, bahwa partisipasi politik Umat Hindu dapat secara efektif mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku dari mereka yang berwenang membuat keputusan mengikat. Dengan kata lain, bahwa Umat Hindu haruslah yakin dan juga percaya, bahwa partisipasi politiknya memiliki *bergaining power* terhadap kebijakan publik yang akan, sedang, dan sudah diberlakukan penguasa.

Namun untuk membangkitkan gairah partisipasi Umat Hindu dalam politik tidaklah gampang, karena akan segera dijumpai hambatan atau kendala mengenai strategi yang perlu dilancarkan ke depannya supaya mampu merangsang, membangkitkan dan memotivasi, serta mendorong maupun meningkatkan hasrat partisipasi politiknya di alam demokrasi Pancasila ini? Penulis berkeyakinan, bahwa partisipasi politik Umat Hindu baru bisa tumbuh subur bila didahului dengan lahirnya kesadaran politiknya sebagai warga negara Indonesia.

Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara meningkatnya partisipasi politik Umat Hindu dengan mulai terbangunnya jaringan kesadaran politik kolektif Umatnya. Sebab terkonstruksinya kesadaran politik dalam struktur kognitif Umat Hindu merupakan prasyarat pertama dan utama untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Karena tanpa diawali dengan kesadaran politik, mustahil Umat Hindu ikut berkecimpung dan berpartisipasi dalam masalah-masalah politik kenegaraan.

Permasalahan kompleks berikutnya yang harus kita pikirkan dan pecahkan bersama adalah mengenai bagaimana taktik membangun kesadaran politik kolektif Umat Hindu dalam rangka meningkatkan partisipasi politiknya? Secara kultural Umat Hindu selalu hidup dalam lingkup komunitas sosial yang terikat oleh adat istiadatnya dengan tingkat religusitas yang tinggi. Dalam masyarakat adat itulah berlangsung kegiatan upacara keagamaan dalam rangka memantapkan jiwa spiritual warganya. Sedangkan untuk menyelesaikan (*muput*) kegiatan upacara agamanya, Umat Hindu selalu mengundang tokoh agama atau orang suci. Bahkan jauh-jauh hari sebelum upacara keagamaan diselenggarakan, Umat Hindu sudah meminta pertimbangan, saran, dan petunjuk, serta nasihat kepada orang suci tersebut supaya apa yang direncanakannya tersebut berjalan lancar tanpa halangan yang berarti. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa yang bertugas memimpin dan membimbing Umat Hindu dalam mengarungi samudera kehidupan mempersiapkan diri menuju akhirat disebut orang suci. Setiap pemimpin agama mempunyai sebutan yang berbeda pada setiap agama. Hindu pemimpin agama disebut juga sebagai orang suci (<http://www.narayann.com/2016/09/inilah-pemimpin-umat-orang-suci-agama-hindu.html>,13/06/2019,15:00).

Dalam Hindu, orang suci itu dikategorikan dalam dua kelompok berupa golongan *Eka Jati* dan golongan *Dwi Jati*. Golongan *Eka Jati* para orang suci yang melakukan pembersihan keagamaan di tahap awal berupa *mewinten*. Usai *mewinten* golongan Eka Jati dapat memimpin ritual keagamaan yang bersifat Tri Yadnya. Mereka yang termasuk dalam golongan Eka Jati:

pemangku (pinandita), *balian*, dalang, dukun, wasi, dsb. Sedangkan Golongan Dwi Jati itu adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut (*mediksa*). Mereka yang telah mediksa itu dikatakan telah lahir dua kali, pertama terlahir dari kandungan Sang Ibu dan kelahiran yang kedua terlahir dari kaki seorang guru rohani/nabe ada juga membilang Dang Acarya. Proses mediksa telah dilakukan maka mereka itu diberi gelar Sulinggih (pandita). Pandita asal katanya adalah *pandit berarti terpelajar, pintar, juga bijaksana*. Maka tegaslah mereka mereka yang telah medwijati itu merupakan orang-orang yang bijaksana (<http://wayansuyasa-webblog.blogspot.com/2018/08/orang-suci-itu-bagi-umat-hindu.html>,13/06/2019,15:00).

Namun perlu dipahami, bahwa meskipun kultur Umat Hindu adalah religus spiritual, tetapi pola pikirnya sangat menghargai prinsip-prinsip demokratis modern. Dalam konteks demokrasi Indonesia, mengenai hubungan antara konsep negara dengan agama, Umat Hindu memandangnya terpisah (sekuler), meskipun tidak secara radikal seperti di Amerika. Disatu sisi kondisi ini sebetulnya merupakan kendala tersendiri, karena menutup peluang bagi tokoh agama untuk menggunakan kedudukan sosialnya dalam mempengaruhi partisipasi politik Umat Hindu. Dipihak lain, merupakan tantangan tersendiri bagi tokoh agama untuk mengatur strategi jitu dalam usahanya membangkitkan dan mendorong kesadaran Umat Hindu untuk ikut berpartisipasi politik. Netralitasnya sebagai orang suci akan diuji dan tentunya menjadi sorotan publik bilamana berani melangkah masuk ke dalam arena politik praktis. Maksudnya tokoh agama dalam memberikan pendidikan politik kepada Umat Hindu haruslah menjunjung tinggi prinsip-prinsip politik yang tertuang dan terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mengingat setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya.

Jadi agar tokoh agama tidak melanggar batasan normatif dalam negara demokrasi Pancasila mengenai kebebasan Umat Hindu untuk menentukan pilihan, maka upaya edukasi yang perlu

dilakukan, yakni mampu meyakinkan tentang efektivitas partisipasi politik dalam mempengaruhi kebijakan negara. Tokoh agama harus mampu menyadarkan Umat Hindu, bahwa hak-hak politiknya memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan politik negara apabila disalurkan dalam bingkai/koridor konstitusional. Batasan peranan tokoh agama dalam membimbing partisipasi politik Umat Hindu, yaitu pada tataran kriteria seorang pemimpin, misalnya pilihlah pemimpin jujur, adil, sederhana, bersih dari rekam jejak korupsi, merakyat, dan lain sebagainya. Jadi penekanan tokoh agama bukan pada penentuan pilihan politik tapi lebih kepada kriteria pilihan politik untuk mendapatkan pemimpin yang ideal dalam negara demokrasi. Dengan demikian, hak politik Umat Hindu tidak dilanggar oleh tokoh agama yang ingin membangkitkan kesadarannya dalam rangka meningkatkan partisipasi politiknya. Peran strategis yang dimainkan oleh tokoh agama dalam bernegara bukanlah politik praktis tetapi lebih kepada politik kebangsaan yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia di atas kepentingan suku, agama, rasa, antar golongan (SARA).

Deskripsi singkat di atas sesungguhnya cukup memberikan pandangan komperhensif dan holistik mengenai kedudukan tokoh agama yang memegang peranan sentral dan vital dalam lapangan kerohanian. Namun secara politik kenegaraan, fungsi dan peran orang suci tersebut sudah sepatutnya diberdayakan dan dioptimalisasikan bukan hanya dalam lapangan keagamaan/kerohanian semata, melainkan perlu juga diimplementasikan, dikonkretisasikan, dan dikontekstualisasikan secara nyata pada bidang kehidupan politik negara. Terkait dengan cara/strategi meningkatkan partisipasi politik Umat Hindu, maka sudah sewajarnya bilamana tokoh agama mulai detik ini cepat menyadari kedudukannya secara sosial politik agar dapat mengoptimalisasikan fungsi dan perannya dalam membangun kesadaran politik demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945. Jadi tokoh agama bukan hanya menjalankan kewajibannya dalam bidang kerohanian atau agama

belaka. Tetapi sebagai bagian warga negara Indonesia, tokoh agama juga wajib membekali pengikutnya dengan pendidikan politik berbasis nilai-nilai universal keagamaan yang relevansinya sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dengan peran ganda yang dimainkan tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diharapkan kesadaran politik Umat Hindu terkonstruksi dengan baik, sehingga berimplikasi pada meningkatnya partisipasi politik dalam rangka mendukung dan menyukseskan terselenggaranya demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Simpulan

Demokrasi Pancasila berlandaskan UUD 1945 hanya mungkin terwujud apabila didasari atas dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk partisipasi politik. Sedangkan partisipasi rakyat secara politik baru akan terlaksana bilamana sebelumnya didahului dengan kesadaran politik. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politiknya, umat Hindu sebagai bagian dari rakyat Indonesia haruslah mulai menyadari betul pengaruh hak-hak politiknya terhadap agenda pembangunan bangsa. Dengan demikian, untuk merangsang dan mendorong partisipasi politik Umat Hindu terlebih dahulu perlulah dibangkitkan kesadaran politiknya. Memperhatikan budaya dan iklim politik Indonesia saat ini, maka sudah waktunya peran tokoh Agama Hindu harus dioptimalisasikan, bukan semata-mata dalam rangka urusan kerohanian, tetapi juga dalam hal keduniawian terutama menyangkut urusan politik kebangsaan. Melalui politik kebangsaan kedudukan tokoh Agama Hindu sebagai orang suci tidak akan ternodai, sebab yang diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dengan optimalisasi peranan tokoh Agama Hindu dalam konstelasi politik kebangsaan setidaknya diharapkan mampu menjadi daya rangsang bagi bangkitnya kesadaran politik Umat

Hindu mengenai pentingnya partisipasi politik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. "Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik". *KARSA*, Vol. XV No. 1 April 2009.
- Alamsyah, M. Nur. "Budaya Politik dan Iklim Demokrasi Di Indonesia". *Jurnal Academica Fisip Untad*. VOL. 2 No. 02 Oktober 2010.
- Alfian dalam Oetomo dan Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi. Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Cet. III. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Ed. II. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Basuki dan Isbandi. "Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama Dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial Di Kota Mataram". Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2008.
- Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. XXX. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hendrik, Doni. "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Wali kota dan Wakil Wali kota Padang Tahun 2008". *DEMOKRASI*. Vol. IX No. 2 Th. 2010.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Kesuma, Tubagus Ali Rachman Puja. "Pengaruh Pemahaman Siswa Tentang Konsep Budaya Politik Terhadap Karakteristik Aspirasi Pemilih Pemula Di SMA AL-Kautsar Kota Bandar Lampung". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro: *Elementary*. Vol. 2 Edisi 3 Januari 2016.

- Luthfiyah. "Urgensi Pendidikan dalam Budaya Politik". STAIN Purwokerto. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania*. Vol. 12, No. 3, Sep-Des 2007.
- Mahfud, MD. 2009. *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasir, Nurlatipah. "Kyai dan Islam dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya". Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Tasikmalaya, Jawa Bara. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 6 Nomor2 Tahun 2015.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarata; Bumi Aksara.
- Pasandaran, Sjamsi. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menyiapkan Generasi Emas Indonesia Dalam Prosediing Seminar Nasional: Penguatan Komitmen Akademik Dalam Memperkokoh Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ruslan, Idrus. "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama dalam Wilayah Publik". Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. *Madania* Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.
- Sucipto, Adi. "Budaya Politik Lokal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014". Fisipol Universitas Kutai Kartanegara. *Jurnal ilmu sosial MAHAKAM*. Volume 4 No 1 2015.
- Sundari, Tri. 2005. "Peran Politik Kyai Di Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Suryo, Herhing. "Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan". *Transformasi*. No. 27 Tahun 2015 Volume I Halaman 1 – 47.

- Ulfa, Maria. "Peran Kiai Dalam Kehidupan Politik Penelitian Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal". *Skripsi*. Fakultas Universitas Semarang.
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahjono, Padmo dalam Oesman, Oetojo dan Alfian. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi. Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Cet. III. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Wijaya, Arif. "Kedudukan Norma Hukum dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila". Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.
- Winarno. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Website:

- <https://pemilu.antaranews.com/berita/827794/peran-ulama-cukup-berpengaruh-dalam-politik,3/6/2019,20:02>
- <https://www.quireta.com/post/peranan-tokoh-agama-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat,3/6/2019,20:15>
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/inilah-peran-penting-tokoh-agama-dalam-menyukseskan-pemilu/3/6/2019,18:40>
- <https://video.medcom.id/opsi2sisi/4KZn3RpK-ini-peran-penting-tokoh-agama-dalam-meningkatkan-partisipasi-pemilu,3/6/2009,18:45>
- <http://www.narayann.com/2016/09/inilah-pemimpin-umat-orang-suci-agama-hindu.html,13/06/2019,15:00>
- <http://wayansuyasa-webblog.blogspot.com/2018/08/orang-suci-itu-bagi-umat-hindu.html,13/06/2019,15:00>

KAUTILYA ARTHASASTRA: Sebuah Refleksi

I Nyoman Yoga Segara*

"Inilah enam kebijakan politik. Jika berada dalam keadaan lebih lemah dibandingkan dengan musuh, ia hendaknya menyatakan perdamaian. Jika lebih unggul, ia hendaknya menyatakan perang. (Jika ia mengira) 'Musuh tidak dapat menyerang saya, begitupun saya tidak dapat menyerangnya,' ia harus tetap netral. Jika memiliki sejumlah kelebihan sifat unggul, ia harus bersiaga. Jika kehilangan kekuasaan, ia harus mencari perlindungan. Dalam suatu pekerjaan yang bisa dicapai dengan bantuan teman, ia harus mengadakan kebijakan ganda"
(Arthasastra Buku Ketujuh, Bab Satu, Bagian 98, 99: 13-18)

Pendahuluan

Dalam arus besar pemikiran politik Hindu, nama Kautilya seolah tak bisa dilepaskan begitu saja. Tak heran, beberapa artikel yang menyoal kembali pemikiran Hindu, namanya akan selalu disebut-sebut. Seolah nama Kautilya menjadi jaminan yang menjustifikasi semua gagasan tentang politik, baik secara teoritik maupun, dan apalagi, secara praktik. Padahal sebenarnya, ada sedikit kerumitan dalam membaca siapa tokoh sebenarnya dibalik lahirnya Arthasastra. Masalahnya ada banyak nama dan banyak buku tentangnya yang beredar.

Hal lain yang membuatnya belum terang benar adalah belum ada satu buku khusus yang membahas profil Kautilya secara utuh, semacam biografi. Tidak mengherankan, jika ada kesan antara satu buku dengan buku lainnya saling dipertentangkan. Dengan memahami teks yang ada secara sungguh-sungguh dan kerja keras, masih ada beberapa buku yang implisit menunjuk Kautilya Arthasastra. Penulis akan menceritakan pengalaman dalam memahami ini.

* Dosen dan Antropolog IHDN Denpasar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yogasegara@ihdn.ac.id

Nama Canakya Pandit sepertinya tidak banyak dikenal dalam sejarah. Satu-satunya manuskrip yang cukup jelas adalah ketika ia diceritakan pernah belajar di Universitas Taksasila. Beberapa literatur lainnya menyebutnya Universitas Taxila. Ayahnya bernama Canaka, yang pada akhirnya ia disebut Canakya. Mengingat kecerdasannya yang luar biasa, khususnya dalam ilmu politik, ia diberi nama Kautilya. Nama lain yang dikaitkan dengan Kautilya adalah Wisnugupta, yaitu nama yang diberikan orang tuanya. Disebutkan kalau Wisnugupta adalah seorang perdana menteri yang cerdas, bijaksana dan ahli strategi, politik dan pemerintahan.

Selain hal di atas, adapula yang menyatakan bahwa nama Kautilya adalah sebuah ejekan yang diberikan oleh para penganut Buddha ketika terjadi gerakan untuk mereformasi sistem kehidupan keagamaan ketika itu. Namun yang cukup mengejutkan, nama Canakya diasosiasikan sebagai pribadi yang *kutila*, yaitu orang yang memiliki sifat-sifat licik dalam arti yang positif. Disebut *kutila* juga karena ia tidak mudah ditipu, suka membalas kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Atas sifat-sifat tersebut, kata *kutila* akhirnya menjadi Kautilya.

Jika merujuk saat ditulisnya Arthasastra yang diperkirakan sekitar abad ke 4 Sebelum Masehi, banyak ahli cenderung mempercayai nama Chanakya sebagai penulisnya, meskipun nama Kautilya jelas tertera, dan pada saat bersamaan di akhir ayat kitab ini, muncul nama Vishnugupta. Sedangkan nama Kautilya berkaitan dengan asal muasal keluarganya dari '*kutila gotra*'. Beragamnya nama Kautilya ini merujuk pendapat Ganapatri Sastri, seorang penulis yang dapat diandalkan, juga Jolly dalam karyanya *Arthasastra of Kautilya*. Namun jika nama Kautilya, Visnugupta dan Chanakya benar satu orang, lengkap dengan segala tafsir dan kontroversi yang menyertainya, penulis dalam artikel ini nanti hanya akan menggunakan Kautilya saja, bukan semata untuk memudahkan pembaca tetapi juga untuk menjaga konsistensi.

Mewah dan menterengnya nama Kautilya tentu tidak cukup untuk dikagumi. Harus ada insight yang dapat memandu kita di masa kini. Karenanya, artikel ini secara esensial hanya akan menyampaikan hikmah apa yang bisa dipetik. Artinya, penulis secara sadar mengambil sikap paling subjektifnya. Dan posisi ini tidaklah sepenuhnya salah. Namun tidak berhenti sampai di sini, penulis ingin juga melakukan kontekstualisasi untuk membawa pemikiran Kautilya dengan rasa Indonesia, misalnya, dalam sistem kerajaan yang pernah tumbuh di Nusantara, apakah cara Kautilya menempatkan Chandragupta sebagai raja hampir sama ketika Mpu Kanwa menjadikan Airlangga sebagai raja agung? Ini satu pertanyaan yang menggugah diskusi kritis di kemudian hari. Mengapa?

Seorang tokoh besar, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan dan akademik, tetapi sering dalam kehidupan biasa juga harus mengalami pasang surut dan melewati onak dan duri, tak terkecuali Kautilya sendiri. Ada banyak tokoh besar yang biasa mengalami ironi sejarah seperti ini, sebut saja Socrates, maha guru dari Plato dan Aristoteles mati diracun oleh penguasa Yunani karena dianggap membuat bodoh anak-anak muda pada masanya. Mahatma Gandhi tewas ditembak pengikutnya sendiri, Vinayak Godse. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela hingga John Lennon serta masih banyak lagi. Bahkan Mpu Prapanca yang notabene sastrawan agung yang menulis Nagarakrtagama juga tidak luput dari cibiran ini. Kalangan kritikus sastra misalnya, seringpula melabeli Mpu Prapanca sebagai pujangga yang terlalu subjektif bahkan suka hanya memuja muji Prabhu Rajasanagara (Hayam Wuruk), sehingga gambaran masa keemasan Majapahit melalui Nagarakrtagama dianggap begitu sempurna tanpa cela (lihat Robson, 2008: 1-17). Niccolo Machiavelli yang sering disbanding-bandingkan secara tidak adil dengan Kautilya pun setali tiga uang. Buku *Il Princice* (atau dalam bahasa Inggris *The Prince*) yang *menghebohkan* jagat ilmu politik modern saat itu, juga tidak lepas dari kritik pedas. *Il Princice* dianggap tidak lebih sebagai rayuan kepada Giuliano de' Medici agar ia kembali ke

pemerintahan setelah sebelumnya tergusur dari panggung politik. Meskipun tafsir ini juga tidak terlalu akurat.

Pendek alasan, artikel ini mengajak kita belajar kembali pada tokoh besar, Kautilya, meski sampai hari ini banyak orang terjebak dan secara serampangan memahami Kautilya sebagai sosok amoral, kejam dan haus kekuasaan. Jika kembali membaca kisahnya, sekali lagi, Kautilya adalah orang yang sukses memadukan pengetahuan etikanya melalui penguasaan Weda secara baik dengan ilmu politiknya yang mumpuni. Keduanya secara bersamaan menjadi semacam alat untuk menata kehidupan politik dan mengatur negara. Atas alasan inilah Kautilya justru memulai pemikirannya tentang politik dengan menjadikan etika dan moralitas sebagai landasan. Gagasannya lalu terkesan ‘jahat’ karena ketika dalam keadaan darurat, jika terdapat tindakan yang merugikan kepentingan bersama atau mengganggu tujuan hidup bernegara yang adil, aman dan makmur, maka Kautilya memberi jalan lapang kepada penguasa untuk memberantasnya sampai tuntas. Atas nama negara, penguasa boleh bertindak di luar hukum. Benarkah?

Pembahasan

Pentingnya Purohito dan Swamin

Harus diakui bahwa Arthashastra muncul dengan batas-batas ke-Asia-annya, maka tidak adil kalau melupakan arus pemikiran besar dibidang politik yang berkembang di Asia pada masa itu. Oleh karenanya, kitab ini juga harus dibaca “sangat Asia”, termasuk dinamika geopolitik yang memengaruhi kelahiran kitab tersebut. Misalnya, Bary (2004) menceritakan bagaimana cita-cita ideal kepemimpinan di Asia yang diharapkan datang dari hubungan raja dan/atau para bangsawan dengan masyarakatnya dan sebagai manifestasi dari apa yang disebut *The Common Good*. Hal sama diungkapkan Becker and Aram A (1979) yang menyatakan sistem koherensi yang terjadi khususnya di Asia Tenggara, yang ternyata selalu ada dialektika bolak balik antara imajinasi dan realitas yang di Bali dapat dibaca dengan mudah

pada Chapter 10: *Synthesis and Antithesis in Balinese Ritual* oleh Foster (hal 175-196) dan Chapter 14: *Balinese Temple Politics and the Religious Revitalization of Caste Ideal* oleh Boon (hal 271-291). Terakhir, Basham (1974) yang berhasil menggambarkan sejarah dan budaya dari lima negara paling penting di daratan Timur dan Selatan Asia, yakni Malaysia dan Indonesia, Cina dan Korea, dan Jepang (baca selengkapnya penjelasan ini dalam Segara, 2014).

Lalu bagaimana dengan Arthashastra yang ditulis Kautilya? Berdasarkan beberapa catatan yang ada, dalam konteks tertentu, ajaran Arthashastra sekurang-kurangnya masih cukup relevan, bahkan masih sangat bisa dilakukan. Keberhasilan atas praktik ini juga sangat tergantung kemauan politik. Thapar (1961: 214) mengatakan bahwa pada masa India kontemporer, citra Asoka (anak dari Bhindusara dan cucu Chadragupta) yang menjadikan Arthashastra sebagai buku pegangan pada kerajaan Maurya begitu populer dan mempengaruhi banyak orang. Bahkan konsep seperti ahimsa berhubungan erat dengan ide-ide Asoka. Gejala ini adalah tradisi panjang politik Asoka mulai dari non-kekerasan dan toleransi dari semua keyakinan politik dan agama, dirawat terus tak terputus selama berabad-abad dan akhirnya memuncak dalam filsafat politik Mahatma Gandhi. Ashoka pada masa India kuno, juga diceritakan telah belajar banyak dari kitab Arthashastra terutama bagaimana strateginya memperluas wilayah kekuasaan, meningkatkan komoditi, melindungi kerajaan dari musuh sekaligus mengembangkan strategi bersaing antarkerajaan.

Seturut dengan itu, kontekstualisasi beberapa ajaran Kautilya Arthashastra dapat diteruskan, melalui *pertama*, pemimpin itu juga sekaligus pemikir. Konsep ini mengingatkan penulis pada apa yang dikatakan Plato dalam *The Republic* sebagai *The Philosopher King*, yakni raja juga sekaligus pemikir yang bijak. Artinya, kepemimpinan dan kapasitas melekat menjadi satu di dalamnya. Bandingkan kini di Indonesia begitu mudah orang menjadi pemimpin, misalnya hanya bermodal populer sebagai artis atau dapat meraih kekuasaan dan jabatan hanya semata-mata

karena memiliki pengikut yang banyak, status sosial yang dibawa dari lahir dan harta berlimpah.

Kedua, keteraturan negara akan baik kalau disokong oleh nilai-nilai bersama di mana moralitas individu menjadi panglima. Bandingkan misalnya kalau Indonesia sebagai negara bangsa harus takluk kepada para teroris jihad atau lembek dalam menghadapi gerakan anarkhis yang bertujuan mengganti ideologi bersama. Kautilya, dan juga Machiavelli, menghendaki negara tidak bisa membiarkan cara-cara seperti itu. *Ketiga*, pemimpin itu harus dipersiapkan secara matang. Oleh Kautilya disebut *swamin* yang berhasil dilakukannya pada diri Chandragupta. Bagaimana dengan sekarang?

Masih berkaitan dengan poin pertama, tidak banyak orang yang ingin menjadi pemimpin atau penguasa di Indonesia harus repot mengikuti proses pematangan diri seperti digagas Kautilya. Edukasi, terutama politik belum banyak ada. Mereka hanya mengandalkan konsultan politik yang saat ini sedang menjamur, ditambah hanya bersandar pada lembaga-lembaga *survey* untuk mengetahui elektabilitasnya di masyarakat, bukan karena kapabilitas yang dimilikinya. Peran *purohito* pada masa kerajaan kini sudah tergantikan ahli atau konsultan politik. Meski perubahan seperti ini tidak bisa dihentikan, tetapi peran *purohito* (atau konsultan politik kini) mestinya tidak hanya menasehati raja atau pemimpin tentang ilmu duniawi tetapi juga rohani. Bagaimanapun, raja dan *purohito* atau pendeta di masa lalu adalah dua sosok yang bisa saling melengkapi. Oka (1970: 7) menyatakan "*wiku tan pa natha ya hilang, tan pa wiku ratu ya cirnna*" (pendeta bila tanpa didampingi atau dilindungi raja tiada berarti, demikian pula seorang raja tanpa dibantu oleh pendeta akan hancur). Sementara bagaimana hubungan yang harus dibangun seorang raja, Budhisantoso, dkk (1990: 112-114) memaparkannya sebagai *Pola Hubungan Raja dengan Rakyat* dan *Pola Hubungan Raja dengan Pendeta*.

Kautilya juga menempatkan moralitas atau budi pakerti luhur sebagai azas penting yang harus dimiliki seorang

swamin/penguasa. Hal ini seperti diuraikan Oka (1970: 20) bahwa Kautilya telah memberi sejumlah syarat, yakni seorang *swamin*/penguasa harus: *Abhigamika* (mampu menarik simpati rakyatnya), *Pradnya* (arif dan bijaksana), *Utsaha* (kreatif dan inovatif), *Atma Sampad* (berbudi pekerti yang luhur), *Sakya Samanta* (menjadi pemimpin mampu mengontrol bawahannya) dan *Aksudra Parisatka* (mampu memimpin sidang dan menyimpulkannya). Bahkan dalam menegakkan kebenaran dan membuat kepatuhan warga negara kepada penguasa, Kautilya menuangkan ajarannya menjauh dari moralitas, cenderung kejam, keji, kotor dan tidak berperikemanusiaan. Tidak banyak yang mau membaca strategi Kautilya yang digunakan untuk maksud tersebut.

Tentang *swamin* ini, Kautilya menyampaikan gagasan *rajadharm*a berupa pemerintahan sendiri *swaraj*, bergantung pada penguasaan diri dan penaklukan diri, *atma samyana*. Kautilya menghadapi suatu konsepsi tentang jabatan raja yang disingkirkan dari noda absolutisme setiap jenis dan menyatakan bahwa hanya seorang penguasa yang menguasai dirinya dapat menguasai orang dalam waktu yang lama. Menurutnya, siapa saja yang menjadi raja walaupun wilayahnya membentang sampai ke ujung dunia, bila moralnya bejat dan indranya tidak dikuasai, ia pasti akan segera binasa.

Masih tentang *swami*, Kautilya mempersepsikan raja sebagai arsitek *dharma* dan seorang *dharmapravartaka* yang terus menerus dalam pekerjaan yang benar, yang dalam kalimat suci disampaikan dengan: *rajnohi wratam uttanam yagnah karyanusasanam dakshina writi samyam. Sha dikshitasyabhisechanam*. Kautilya juga menyampaikan hal lainnya, yakni: *Dharmaya raja bhawati na kama karanaya*. Artinya, raja adalah pelindung tatanan sosial. Sementara kalimat lain menyatakan bahwa tugas-tugas dan fungsi-fungsi raja merupakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi negara (*Chaturvarnamasromo loke rajna dandena palitah. Swadharmakarmabhirato wartate sweshu wesmasu*). Beberapa alasan inilah dalam beberapa ajarannya yang ekstrim, Kautilya

menganjurkan raja tinggal di gubuk selain untuk mendekatkan dirinya dengan rakyat, tetapi juga dapat merasakan bahwa kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja, bukan sebaliknya.

Mengutamakan Triparartha

Arthashastra, mungkin tidak tepat hanya dibaca secara monolitik sebagai kitab politik semata, tetapi juga seharusnya sebagai ilmu tentang administrasi pemerintahan, mengatur dan mengelola negara, pemberdayaan aparatur (agen), mendayagunakan sumber-sumber alam untuk kemakmuran masyarakat. Namun, satu hal yang agak sama adalah semua daya upaya ini, sesuai konteksnya, diarahkan sebagai pedoman bagi pemimpin/penguasa negara. Ketika hal ini eksplisit dinyatakan, maka menjadi ideologi politik yang harus diperjuangkan, bahkan dengan cara-cara yang tidak lazim sekalipun.

Pada sisi yang lain, jika menyelami sosoknya, Kautilya terlihat menjadi glorifikasi dari perpaduan banyak karakter. Namun yang paling kentara adalah ia menjadikan dirinya sebagai brahmana yang amat sangat religius dengan kemampuan dan pengetahuan agama yang dimilikinya. Pada saat yang bersamaan ia menjadi sosok pemberani, teguh memegang kebenaran yang diyakininya, pemimpin dalam menjaga keamanan negara, bahkan dilakukannya di medan perang.

Dari dua pendekatan tersebut, kita dapat memetik pelajaran adalah tentang ajaran Kautilya yang mengisyaratkan bahwa pemimpin, termasuk politikus dalam hal ini, wajib mengutamakan *Triparartha*, yakni *dharma*, *artha*, *kama* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, raja/pemimpin/politikus harus mengusahakan *Triparartha* sebagai sesuatu yang konkret dalam hidup. Berikut *lesson learn* dari saripati gagasan Kautilya, terkait dengan *political will* yang harus dilakukan para pemimpin.

Dharma, jika diturunkan ke tataran sosial dapat diartikan sebagai: *pertama, guna*, yakni susila atau seperangkat aturan tingkah laku yang ditujukan bagi masyarakat dan sekaligus menjadi *niti*,

yakni kemampuan politik dan seni memimpin bagi raja dan perangkat pemerintah di bawah raja. Dalam konteks *niti* ini, raja disarankan untuk menerapkan delapan kepemimpinan (Astabrata). *Kedua*, mengusahakan *widya*, terutama *apara widya*, yakni “pengetahuan duniawi” bagi rakyatnya agar dapat melaksanakan *karma* atau *swadharma*. Melalui *widya* ini raja dan rakyat dapat bekerja secara profesional demi untuk kesejahteraan duniawi. *Ketiga, rta*, yakni hukum untuk menegakkan keadilan.

Artha, yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau modal sosial di samping kekayaan materiil dalam arti yang sebenarnya. Arti ini barangkali dapat diperluas sesuai dengan kepentingan kemakmuran dan keamanan negara dan rakyat. Sedangkan *Kama* dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai pelestarian dan pengembangan seni budaya. Sayangnya, tiga aspek *Triparartha* tersebut hanya diarahkan untuk meraih kekuasaan, menumpuk kekayaan pribadi, nafsu/keinginan.

Kautilya, dalam beberapa sumber dikatakan hidup pada 321-296 SM adalah tokoh yang sanggup menurunkan, kalau bukan membumikan ajaran suci dalam Arthashastra menjadi sesuatu yang *practical*, nyata. Jadi, boleh dikatakan bahwa Arthashastra menjadi semacam kompedium tentang bagaimana seorang pemimpin atau penguasa mengelola sebuah negara secara lengkap, utuh dan detail. Hal ini karena mengingat isi cakupan Arthashastra sangat luas, seperti ketatanegaraan, intelijen, kepemimpinan, ekonomi, hukum dan filsafat. Bahkan juga tentang pengobatan dan ilmu magi, namun semua ilmu tersebut berada dalam payung disiplin ilmu politik, sekurang-kurangnya menafasi seluruh ilmu yang hendak disampaikannya.

Sebagai sosok yang dianggap keras dan kejam, Kautilya bergeming dari segala kritik atau ketidakberanian banyak orang untuk membaca Arthashastra, terutama bagaimana gagasannya dalam mempertahankan keutuhan negara dan memberikan keadilan bagi rakyatnya. Ia menjadi begitu satya karena tempaan jaman yang berliku. Namun inspirasi yang dapat kita ambil maknanya, selain yang sudah banyak dibicarakan di bagian atas

adalah bagaimana ia diakhir buku Arthashastra menyatakan: *“Sumber kehidupan umat manusia adalah artha (kesejahteraan), dengan kata lain adalah Bumi dengan segala isinya yang didiami manusia. Ilmu yang mencakup cara untuk mencapai dan melindungi Bumi adalah Arthashastra, Ilmu Politik!”*

Totalitas sebuah Satya

Telah sejak muda dan ketika memasuki usia yang matang, Kautilya digambarkan sebagai orang yang memiliki karakter yang teguh untuk memegang apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Ia misalnya sangat percaya pada teori brahmana tentang alam semesta dan keterpanutannya yang kuat pada sistem sosial yang dibangun atas adat istiadat dan agama brahmana dengan empat kasta dan ashrama. Pada saat yang bersamaan, Kautilya adalah pencinta ahimsa dan melarang pembunuhan diri sendiri. Hal yang sama juga untuk binatang. Untuk pandangan ini, tampaknya Kautilya terpengaruh ajaran Buddha. Untuk mewujudkan gagasan tanpa kekerasannya, Kautilya diceritakan menyediakan tempat-tempat pemotongan binatang dan mengizinkan daging.

Kautilya dianggap brahmana yang mengalami langsung situasi saat gerakan dan ajaran Buddha menyebar dan menyerang kaum brahmana ketika itu. Namun Kautilya adalah orang yang memiliki karakter kuat untuk memegang *Trayi Dharma*. Itulah yang mewarnai tindakannya untuk menyukai perdamaian dan jauh dari ahimsa. Dalam membangun disiplin politiknya, Kautilya secara tegas mengatakan sangat berhutang budi pada Atharwa Weda dan khususnya Arthashastra. Meski dianggap ummoral, Kautilya memiliki kecintaan untuk memuliakan negara. Itulah pada banyak bab dalam beberapa buku, Kautilya memperlihatkan betapa ia rela melakukan apa saja yang dikritik sebagai tindakan yang kejam, namun misi utamanya adalah bagaimana mengelola negara agar tetap makmur dan damai. Bahkan ketika sebenarnya ia memiliki kesempatan menjadi masyur sebagai raja, ia lebih baik merasa berada di belakang dengan mempersiapkan Candragupta sebagai raja diraja. Kehebatan Candragupta adalah buah

gembelngannya sebagai purohita, seorang pemikir sekaligus brahmana. Sesuatu yang tidak bisa dicarikan bandingannya sampai hari ini.

Setelah malang melintang dengan segala onak perjuangan, Kautilya berhasil memposisikan dirinya sebagai purohita, sebagaimana Aristoteles sebagai pembanding ketika menjadi penasehat untuk Iskandar. Bagi Kautilya, purohita bukan sekadar unsur sebuah kedaulatan, tetapi agen yang sangat penting untuk mempertahankan keutuhan negara. Ia menjadi purohita karena kemampuannya dalam bidang hukum sekaligus penasehat raja yang sanggup bertarung ke medan perang.

Dengan demikian, Kautilya telah berhasil menurunkan ajaran agama yang bersifat abstrak pada kitab suci, menjadi sesuatu yang riil untuk kemanusiaan, negara dan kehidupan. Kautilya berhasil menjadi sosok religius sekaligus politikus. Menurutnya, ilmu kebajikan menuntunnya menjadi seseorang yang harus mengutamakan kesejahteraan negara. Seni politik tidak dapat memberikan kepada umat manusia di mana-mana segala yang harus ada, tetapi justru dapat menunjukkan apa negara itu pada yang terbaik.

Banyak kritik yang ditujukan kepada politik Kautilya yang dianggap terlalu keras dan seolah menghalalkan segala cara. Namun begitulah Kautilya yang menjadi sosok paling teguh dalam memilih jalan kebenaran. Ini adalah bentuk politik praktis yang sampai saat ini telah memberi nafas dalam konsep-konsep kepemimpinan, misalnya *Catur Upaya Sandi*, *Pramiteng Prabhu*, *Asta Brata* hingga *Catur Pariksa*, yang semuanya terinspirasi dari Niti Sastra. Bahkan saat-saat kematian Nanda, Wikatara berujar bahwa Raja Niti itu bagaikan wanita tuna susila yang tidak pernah menaruh cintanya di satu tempat. Begitu pula politik yang tidak pernah mencintai seseorang selamanya. Ketika Nanda terguling, politikpun menjatuhkan cintanya pada Chandragupta. Situasi yang sampai saat ini masih ajeg sejak Arthasastra dikarang ribuan tahun lalu.

Maknawi untuk Pemimpin

Secara eksplisit, beberapa pernyataan menarik yang dapat menjadi ikhtiar, khususnya bagi penguasa (raja) yang dipetik dari Canakya Niti Sastra, antara lain, *pertama*, *Sukhayasya mulam dharmah*— Sumber kebahagiaan sejati adalah kalau orang kembali kepada dharma (agama dan kewajiban) asli sang roh, yaitu melakukan pelayanan cinta kasih bhakti kepada Tuhan. *Kedua*, *Naikam cakram paribhramayati*—(kereta) tidak bisa bergerak dengan satu roda. Kerajaan tidak bisa berjalan kalau raja tanpa menteri, atau menteri tanpa raja.

Ketiga, *Apastu snehasanyuktam mitram*—yang disebut teman adalah dia yang tetap setia pada saat mengalami musibah atau keduakaan. *Keempat*, *Saktihino balavantamasrayet* – kalau merasa diri kurang kuat, bertemanlah atau bergabunglah dengan yang kuat. Dengan demikian tidak akan ada kecemasan dan rasa percaya diri akan menjadi mantap, dan *Kelima*, *Priyamapyahitam na waktawyam* – jangan mengucapkan kata-kata manis menarik tetapi tidak mengandung kebaikan dan kebenaran.

Sementara gagasan Kautilya dalam Arthasastra yang sama menariknya dapat dibaca dalam pernyataannya, yaitu *Awasendriyasaturanto'pi raja sadyo winasyati*—raja yang tidak menguasai indriya-indriyanya, walaupun raja tersebut kuat dan sakti, pasti segera binasa; *Dutamukha wai rajanah*—mata-mata adalah muka sang raja; dan *Praja sukhe sukham rajnah, prajanam ca hita hitam, natma-priyam hitam rajnah, prajanam tu priyam hitam*—Kebahagiaan rakyat adalah kebahagiaan raja. Kesejahteraan rakyat adalah kesejahteraan raja. Kesejahteraan raja bukanlah apa-apa yang diinginkan oleh raja, tetapi adalah apa yang menjadi kesukaan rakyat, itulah yang mensejahterakan raja.

Simpulan

Kautilya Arthasastra adalah kitab yang “mengejutkan” dalam arus besar pemikiran politik Hindu. Darinya, kita menemukan ragam tema yang ternyata tidak bersifat tunggal, namun berkelindan satu sama lain untuk menghasilkan konsep besar politik. Mudahnya,

tanpa kekuatan politik, sumber daya alam tak akan pernah dinikmati oleh masyarakat. Nirpolitik hanya akan menyebabkan kekacauan dalam manajemen dan administrasi bernegara. Kira-kira begitu cara sederhana memahami Kautilya Arthashastra. Dan sebagai kitab suci hasil kontemplasi Rsi Kautilya, jangkauannya melewati batas waktu kitab ini ditulis. Karenanya, sebagian besar ini kitab ini masih sangat relevan untuk dipraktikkan, sebagaimana beberapa perusahaan besar di India malah memberikan kursus singkat tentang Arthashastra. Ada baiknya, di Indonesia kitab ini menjadi buku saku para politisi Hindu, pemimpin Hindu, bahkan hingga para Bendesa Adat di Bali.

Daftar Pustaka

- Budhisantoso, S. (at al), 1990. *Niti Raja Sasana*. Depdikbud.
- Becker, Alton L. and Aram A. "The Imagination of Reality: Essay in Southeast Asian Coherence System". *Papers presented at a Conference Held at Coherence System, Yengoyan, 1979*.
- Oka, I Gusti Agung. 1970. *Niti Sastra, Rajaniti, Pengetahuan (untuk Leadership yang Berorientasi) Agama Hindu*. tp.
- Segara, I Nyoman Yoga, "Refleksi Filsafat Politik dalam Kautilya Arthasāstra". *Laporan Penelitian*. Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama RI Tahun 2014.
- Thapar, Romila. 1961. *Aśoka and the Decline of the Mauryas*. Oxford: Oxford University Press
- Robson, Stuart. "Memperkenalkan Nagarakrtagama sebagai Karya Sastra Agung". Hal 1-17. *Makalah Seminar*. Jakarta, 26 Mei 2008. Hal 10: Prapanca terlalu subjektif terhadap Rajasanagara (Hayam Wuruk).